



LPPD

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 2026





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788215, Faksimile (0293) 788122,
Laman www.inspektorat.magelangkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu karni, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kota Mungkid, 26 Maret 2026

Plt. Inspektur Kabupaten Magelang



Mulyanto, S.H., M.M.

Wakil Pembina Utama Muda

NIP. 19680711 198903 1 007



BUPATI MAGELANG
KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Shalom, Om Swastyastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Rahayu.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena atas izin dan rahmat-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah berhasil disusun. LPPD merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LPPD selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan merupakan sumber informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang hasil evaluasinya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah.

LPPD merupakan dokumen wajib tahunan bagi Kepala Daerah yang berfungsi sebagai instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting.



Ruang lingkup LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi

Melalui partisipasi Proaktif dari semua komponen Pemerintahan Daerah mulai dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat serta seluruh *stakeholders* yang menjadi *partners* dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Magelang, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang telah tercapai selama tahun 2025. Namun kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini disampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara serta daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Shalom, Om Santi Santi Santi Om,

Namo Buddhaya,

Rahayu.

Kota Mungkid, 27 Maret 2026





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. Latar Belakang	I-1
1.1. Penjelasan Umum	I-3
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-18
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-46
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-16
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-18
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-1
3.1.1 Target Kinerja	III-2
3.1.2 Realisasi Kinerja	III-3
3.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya	III-8
3.2.1. Target Kinerja	III-8
3.2.2. Realisasi Kinerja	III-8
3.3. Permasalahan dan Kendala	III-10
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III-11
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	IV-2
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-2
4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-3
4.1.3. Anggaran	IV-6
4.1.4. Dukungan Personil.....	IV-7
4.1.5. Hasil Capaian	IV-8
4.1.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-13
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	IV-15
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-15
4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-15
4.2.3 Anggaran	IV-29
4.2.4 Dukungan Personil	IV-31
4.2.5 Hasil Capaian	IV-32
4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-52
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-54
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	IV-54
4.3.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-54
4.3.3 Anggaran	IV-56



4.3.4	Dukungan Personil	IV-57
4.3.5	Hasil Capaian	IV-58
4.3.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-62
4.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-63
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-63
4.4.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-63
4.4.3	Anggaran	IV-64
4.4.4	Dukungan Personil	IV-65
4.4.5	Hasil Capaian	IV-66
4.4.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-69
4.5	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-71
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-71
4.5.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-71
4.5.3	Anggaran	IV-77
4.5.4	Dukungan Personil	IV-77
4.5.5	Hasil Capaian	IV-78
4.5.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	IV-89
4.6	Bidang Urusan Sosial	IV-91
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-91
4.6.2	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-92
4.6.3	Anggaran	IV-97
4.6.4	Dukungan Personil	IV-98
4.6.5	Hasil Capaian	IV-99
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-106
4.7	Program dan Kegiatan	IV-107
4.7.1	Urusan Pendidikan	IV-107
4.7.2	Urusan Kesehatan	IV-110
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-113
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-114
4.7.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-116
4.7.6	Urusan Sosial	IV-119
BAB V	PENUTUP	V-1
LAMPIRAN		
LAMPIRAN 2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	Lampiran 2.2.1-1
LAMPIRAN 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Lampiran 2.2.2-1
DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang	I-6
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	I-6
Tabel 1.3.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang	I-7
Tabel 1.4.	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I-8
Tabel 1.5.	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2025	I-13
Tabel 1.6.	Kondisi PPPK Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2025	I-14
Tabel 1.7.	Kondisi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2025	I-14
Tabel 1.8.	Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2025	I-15
Tabel 1.9.	Komposisi Pendidikan PPPK Kabupaten Magelang Tahun 2021 – 2025	I-15
Tabel 1.10.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025 dan TA 2024	I-16
Tabel 1.11.	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024	I-17
Tabel 1.12.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025 dan TA 2024	I-18
Tabel 1.13.	Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-19
Tabel 1.14.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	I-28
Tabel 1.15.	Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal	I-47
Tabel 1.16.	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-49
Tabel 1.17.	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-50
Tabel 1.18.	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-51
Tabel 1.19.	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-51
Tabel 1.20.	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-52
Tabel 1.21.	Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-53
Tabel 1.22.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-54
Tabel 1.23.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-54



Tabel 1.24.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-55
Tabel 1.25.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-57
Tabel 1.26.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Dalam Arah Kebijakan Satpol PP dan PK serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-58
Tabel 1.27.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025	I-58
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-16
Tabel 2.4.	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode Warna	II-19
Tabel 2.5.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Pada Indikator Tujuan	II-19
Tabel 2.6.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Pada Indikator Sasaran	II-21
Tabel 2.7.	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.....	II-23
Tabel 2.8.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025	II-29
Tabel 2.9.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2025	II-30
Tabel 2.10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2022-2025.....	II-30
Tabel 2.11.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II-31
Tabel 2.12.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, dengan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu 2022-2025.....	II-32
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024	II-33
Tabel 2.14.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang, dengan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021-2024	II-33
Tabel 2.15.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah Tahun 2025	II-35
Tabel 2.16.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2025	II-37
Tabel 2.17.	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021 – 2025	II-39
Tabel 2.18.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025	II-39
Tabel 2.19.	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-40



Tabel 2.20.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2025	II-41
Tabel 2.21.	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2021-2025	II-42
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan, Berkeselamatan, dan Berkelanjutan	II-43
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2025	II-46
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2025	II-48
Tabel 2.25.	Persentase SD/MI dan SMP/MTS yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024	II-51
Tabel 2.26.	Persentase PKBM yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024	II-51
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025	II-52
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2025	II-54
Tabel 2.29.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-54
Tabel 2.30.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat Tahun 2025	II-56
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Tahun 2025	II-57
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan Tahun 2025	II-58
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Fungsi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara memadai dan Wajar Tahun 2025	II-60
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja Tahun 2025	II-61
Tabel 2.35.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025.....	II-61
Tabel 2.36.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025.....	II-62
Tabel 2.37.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	II-63
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2025	II-64
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang Tahun 2025	II-65
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Tahun 2025	II-66
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025	II-67
Tabel 2.42.	Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025	II-67
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Risiko Bencana Tahun 2025..	II-69



Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Akuntabel, dan Transparan Tahun 2025	II-69
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Tahun 2025	II-72
Tabel 2.46.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-75
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah yang Berlokasi di Kabupaten Magelang Tahun 2025	III-4
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2025	III-9
Tabel 4.1.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM).....	IV-2
Tabel 4.2.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-3
Tabel 4.3.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-6
Tabel 4.4.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-7
Tabel 4.5.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-8
Tabel 4.6.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025	IV-9
Tabel 4.7.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar Tahun 2025	IV-10
Tabel 4.8.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025.....	IV-12
Tabel 4.9.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-13
Tabel 4.10.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-14
Tabel 4.11.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-16
Tabel 4.12.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-30
Tabel 4.13.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-31
Tabel 4.14.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-32
Tabel 4.15.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	IV-33
Tabel 4.16.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.....	IV-35
Tabel 4.17.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	IV-36
Tabel 4.18.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita	IV-38
Tabel 4.19.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	IV-39
Tabel 4.20.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	IV-41
Tabel 4.21.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	IV-42
Tabel 4.22.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	IV-44



Tabel 4.23.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	IV-45
Tabel 4.24.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	IV-47
Tabel 4.25.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	IV-48
Tabel 4.26.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	IV-49
Tabel 4.27.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-51
Tabel 4.28.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-52
Tabel 4.29.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-53
Tabel 4.30.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-56
Tabel 4.31.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-57
Tabel 4.32.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-58
Tabel 4.33.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	IV-58
Tabel 4.34.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	IV-60
Tabel 4.35.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-61
Tabel 4.36.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-62
Tabel 4.37.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-64
Tabel 4.38.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-65
Tabel 4.39.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-66
Tabel 4.40.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-66
Tabel 4.41.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-67
Tabel 4.42.	Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IV-68
Tabel 4.43.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-69
Tabel 4.44.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-70



Tabel 4.45.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-72
Tabel 4.46.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-77
Tabel 4.47.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-78
Tabel 4.48.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-79
Tabel 4.49.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	IV-80
Tabel 4.50.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	IV-81
Tabel 4.51.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	IV-83
Tabel 4.52.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	IV-86
Tabel 4.53.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	IV-87
Tabel 4.54.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-88
Tabel 4.55.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-90
Tabel 4.56.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-90
Tabel 4.57.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-93
Tabel 4.58.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-97
Tabel 4.59.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-98
Tabel 4.60.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-99
Tabel 4.61.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	IV-100
Tabel 4.62.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Disabilitas Terlantar di Luar Panti	IV-101
Tabel 4.63.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	IV-102
Tabel 4.64.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	IV-103
Tabel 4.65.	Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-104
Tabel 4.66.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-105



Tabel 4.67.	Kendala, Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-106
Tabel 4.68.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-108
Tabel 4.69.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-109
Tabel 4.70.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-111
Tabel 4.71.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-112
Tabel 4.72.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-113
Tabel 4.73.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-114
Tabel 4.74.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-115
Tabel 4.75.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-116
Tabel 4.76.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Satpol PP dan PK serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-116
Tabel 4.77.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-117
Tabel 4.78.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025.....	IV-120
Tabel 4.79.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	I-5
Gambar 2.1.	Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022-2025	II-31
Gambar 2.2.	Perbandingan LPE Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022-2024	II-36
Gambar 2.3.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025	II-38
Gambar 2.4.	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2026	II-38
Gambar 2.5.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025	II-48
Gambar 2.6.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025	II-50
Gambar 2.7.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025	II-53

BAB I

PENDAHULUAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025





BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demi mewujudkan otonomi daerah yang mengedepankan prinsip *good governance*, Bupati memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahannya. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahunan yang menyajikan informasi secara akurat dan komprehensif. Berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, Bupati wajib menyerahkan laporan tersebut kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LPPD sebagai instrumen akuntabilitas atas tata kelola dan kinerja pemerintahan di wilayahnya. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga sebagai manifestasi transparansi publik kepada masyarakat. Di dalamnya termuat capaian Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LPPD merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai basis bagi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Selain sebagai sarana penilaian kinerja, LPPD menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan serta program pembinaan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Daerah berkewajiban menyusun laporan ini dengan mengikuti format standar dari Menteri Dalam Negeri. Dalam prosesnya, pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada capaian kinerja yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, objektivitas, serta akurasi data. Upaya pengawasan terhadap kebenaran informasi yang tertuang dalam LPPD dilakukan melalui reviu APIP Inspektorat terhadap dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

LPPD menjadi alat kendali untuk memastikan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tahun 2025 merupakan masa transisi sehingga penyusunan LPPD Tahun 2025 merujuk pada target yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.



Dalam penyusunan dan penyampaian LPPD ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Magelang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-undang tersebut Kota Magelang diberi hak untuk mengatur Rumah Tangga sendiri. Dengan demikian di Kota Magelang berpusat empat (4) Badan Pemerintahan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Pemerintah Kota Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Kantor Karesidenan Kedu; dan
4. Akademi Militer.

Karena fakta-fakta tersebut maka masalah kepadatan Kota Magelang tidak terhindarkan. Di sisi lain sesuai dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap pelayanan pemerintah dan pembangunan semakin meningkat maka muncul gagasan untuk memindahkan ibu kota kabupaten. Gagasan tersebut menguat dengan pengarahannya Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1979, Nomor: OP.140/1979 perihal Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak bulan Juli 1979, saat itu Bupati Magelang dijabat oleh Drh. Soepardi mengadakan kerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang, untuk mengadakan survei lokasi ibukota Kabupaten yang menghasilkan alternatif ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Mungkid, Muntilan, Mertoyudan dan Secang. Hasil survei tersebut dikuatkan oleh survei ulang yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 135/3492/PUOD, tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Selanjutnya pemindahan ibu kota kabupaten ke Kota Mungkid ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang



Pemindahan Ibukota Kabupaten Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang tanggal 4 Agustus 1982, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid. Kota baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Mungkid, dan Mertoyudan yang terdiri atas Desa Mendut, Sawitan dan Deyangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, maka diadakan persiapan fisik maupun administrasi.

Persiapan fisik dilaksanakan dengan membangun di atas tanah seluas 8,08 ha, yang meliputi pembangunan Pendopo, Kantor Sekretariat, Gedung DPRD, Gudang, Garasi, Kantor Dinas Otonom dan Dinas Non Otonom. Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Magelang diresmikan penggunaannya oleh PJ Bupati Magelang Drs. AL Soelistiya dan Ketua DPRD Faishal Soenarto pada tanggal 23 Februari 1984. Pada waktu itu juga dibangun sarana air minum, Gedung SMP dan SMA, Lapangan Drh. Soepardi, Pelebaran jalan Karet-Sawitan dan pembangunan Masjid An Noor.

Kota Mungkid diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah M Ismail, atas nama Menteri Dalam Negeri pada Prasasti peresmian Kota Mungkid, berada di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang, dan setiap tahun pada tanggal 22 Maret diperingati sebagai hari jadi Kota Mungkid.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 1.085,730 km² (seribu delapan puluh lima koma tujuh tiga kilo meter persegi); sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, luas Kabupaten Magelang adalah 1.129,983 km² (seribu seratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan tiga kilo meter persegi).

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110°01' 51" – 110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13" – 7°42'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:



Tabel 1.1.
Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	20	-	68,75	6,08	15
2	Borobudur	20	-	57,59	5,10	4
3	Ngluwar	8	-	23,96	2,12	22
4	Salam	12	-	31,85	2,82	19
5	Srumbung	17	-	61,85	5,47	19
6	Dukun	15	-	57,60	5,10	21
7	Muntilan	13	1	30,36	2,69	17
8	Mungkid	14	2	40,23	3,56	7
9	Sawangan	15	-	73,90	6,54	15
10	Candimulyo	19	-	49,32	4,36	17
11	Mertoyudan	12	1	46,28	4,10	6
12	Tempuran	15	-	47,39	4,19	8
13	Kajoran	29	-	86,78	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	56,32	4,98	34
15	Bandongan	14	-	48,59	4,30	20
16	Windusari	20	-	62,27	5,51	25
17	Secang	19	1	51,43	4,55	22
18	Tegalrejo	21	-	38,29	3,39	22
19	Pakis	20	-	67,75	6,00	29
20	Grabag	28	-	82,63	7,31	33
21	Ngablak	16	-	46,86	4,15	37
	Jumlah	367	5	1.129,98	100	

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2025

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 mencapai 1.355.045 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (113.547 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (99.326 jiwa) dan Secang (85.470 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (33.545 jiwa).

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Salaman	39.195	38.471	77.666
2	Borobudur	33.378	33.092	66.470
3	Ngluwar	16.685	16.860	33.545
4	Salam	24.433	24.516	48.949
5	Srumbung	25.055	24.918	49.973
6	Dukun	24.320	24.270	48.590
7	Sawangan	30.028	29.774	59.802
8	Muntilan	40.788	40.775	81.563
9	Mungkid	38.066	38.150	76.216
10	Mertoyudan	56.277	57.270	113.547
11	Tempuran	27.603	27.004	54.607
12	Kajoran	32.400	31.450	63.850



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Tahun 2025
1	2	3	4	5
13	Kaliangkrik	32.845	31.716	64.561
14	Bandongan	32.628	31.497	64.125
15	Candimulyo	26.483	25.944	52.427
16	Pakis	29.508	28.482	57.990
17	Ngablak	22.379	21.794	44.173
18	Grabag	50.374	48.425	99.326
19	Tegalrejo	28.453	27.447	56.214
20	Secang	42.756	42.400	85.470
21	Windusari	28.752	26.865	55.981
	Jumlah	682.406	672.639	1.355.045

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2026

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 367 desa. Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Magelang,

Tabel 1.3.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Salaman	20	20	20
2	Borobudur	20	20	20
3	Ngluwar	8	8	8
4	Salam	12	12	12
5	Srumbung	17	17	17
6	Dukun	15	15	15
7	Muntilan	14	14	14
8	Mungkid	16	16	16
9	Sawangan	15	15	15
10	Candimulyo	19	19	19
11	Mertoyudan	13	13	13
12	Tempuran	15	15	15
13	Kajoran	29	29	29
14	Kaliangkrik	20	20	20
15	Bandongan	14	14	14
16	Windusari	20	20	20
17	Secang	20	20	20
18	Tegalrejo	21	21	21
19	Pakis	20	20	20
20	Grabag	28	28	28
21	Ngablak	16	16	16
		372	372	372

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka 2025



- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah berjumlah 18
5. Badan Daerah berjumlah 5
6. Kecamatan berjumlah 21

Tabel 1.4
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Pendukung	22	60	74	156
2	Sekretariat DPRD	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Pendukung	7	11	18	36
3	Inspektorat	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Pengawas	7	42	10	59
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan	17	5617	169	5803
5	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan	38	1169	147	1354
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan	19	29	96	144
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	3	14	22



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran	13	82	45	140
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	11	15	11	37
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bidang Perindustrian, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi	7	31	12	50
11	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan	9	30	68	107
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	11	17	34
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	15	8	31
14	Dinas Perhubungan	Bidang Perhubungan	10	16	17	43
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik	6	27	15	48
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Bidang Penanaman Modal Termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	2	17	12	31
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan	5	23	6	34



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan	15	28	12	55
19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7	13	23	43
20	Dinas Pertanian dan Pangan	Bidang Pertanian dan Bidang Pangan	10	186	20	216
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Serta Bidang Energi Sumber Daya Mineral.	8	17	44	69
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;	9	23	9	41
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan	22	18	39	79
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi di Daerah	9	27	5	41
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	8	18



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Melaksanakan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah	13	10	9	32
27	Kec. Bandongan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	1	7	14
28	Kec. Borobudur	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	2	3	11
29	Kec. Candimulyo	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	2	4	12
30	Kec. Dukun	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	8	2	1	11
31	Kec. Grabag	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	5	2	4	11
32	Kec. Kajoran	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	3	2	3	8
33	Kec. Kaliangkrik	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur	5	2	1	8
34	Kec. Mertoyudan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	9	1	7	17
35	Kec. Mungkid	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	15	3	3	21
36	Kec. Muntilan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	9	2	6	17



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
37	Kec. Ngablak	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	4	13
38	Kec. Ngluwar	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	3	12
39	Kec. Pakis	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	6	15
40	Kec. Salam	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	1	5	13
41	Kec. Salaman	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	2	6	14
42	Kec. Sawangan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	2	4	12
43	Kec. Secang	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	8	2	7	17
44	Kec. Srumbung	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	2	11
45	Kec. Tegalrejo	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	3	12
46	Kec. Tempuran	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	2	11
47	Kec. Windusari	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	5	2	5	12



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
48	RSUD Bukit Menoreh	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	3	119	5	127
49	RSUD Candi Umbul	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	4	95	5	104
50	RSUD Merah Putih	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	8	290	19	317
51	RSUD Muntilan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	10	414	35	459

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Perangkat Daerah yang memiliki jumlah ASN terbanyak dengan total sebanyak 5.803 ASN, sedangkan Kecamatan Kajoran dan Kecamatan Kaliangkrik menjadi Perangkat Daerah dengan ASN paling sedikit yaitu sejumlah 8 orang ASN.

Tabel 1.5.
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2021–2025

No	Golongan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	I	100	61	35	25	18
2	II	1.217	1.416	1.301	1.194	1.172
3	III	4.224	4.253	4.102	3.969	3.921
4	IV	1.920	1.501	1.248	1.036	867
Jumlah		7.461	7.321	6.686	6.224	5.978

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2025



Tabel 1.6.
Kondisi PPPK Kabupaten Magelang Tahun 2021–2025

No	Golongan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	I	0	0	0	0	17
2	II	79	81	186	354	582
3	III	142	2.131	2.890	3.118	3.425
4	IV	0	0	0	0	0
Jumlah		221	2.212	3.076	3.472	4.024

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 1.7.
Kondisi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Magelang Tahun 2021–2025

No	Golongan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0	0	0	0	2.446
2	I	0	0	0	0	
3	II	0	0	0	0	
4	III	0	0	0	0	
5	IV	0	0	0	0	
Jumlah		0	0	0	0	2.446

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah ASN hal ini disebabkan adanya penambahan ASN dari jalur penerimaan PPPK sebanyak 1984, tahun 2023 sebanyak 855 orang sedangkan tahun 2024 jumlah ASN hampir sama dengan tahun 2023 karena jumlah ASN yang pensiun hampir sama dengan jumlah PPPK yang diterima tahun 2024 sebanyak 405 orang.

Jumlah ASN Kabupaten Magelang sampai akhir tahun 2025 sejumlah 10.002 orang yang terdiri dari CPNS : 22, 8PNS : 5750, PPPK : 4024 dibandingkan dengan tahun 2024, jumlah ASN Kabupaten Magelang 9.696 orang terdiri dari CPNS : 2 PNS : 6222 PPPK : 3472. Dengan selisih keseluruhan kenaikan sejumlah 306 orang yang terdiri dari penambahan jumlah CPNS : 226, penambahan jumlah PPPK : 552 serta pengurangan PNS 472 orang.



Pada tahun 2025 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 54,25%; kemudian lulusan D-III sebesar 24,47%; lulusan SMA sebesar 8,48%; lulusan S2 sebesar 8,34%; lulusan D-II sebesar 1,87%; lulusan SMP sebesar 1,56%; lulusan SD sebesar 0,59% serta lulusan D-I sebesar 0,4%.

Sedangkan komposisi pendidikan PPPK Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 85%; kemudian lulusan D-III sebesar 7,65%; lulusan SMA sebesar 6,86%; lulusan SD sebesar 0,25%; lulusan SMP sebesar 0,2%; serta lulusan S2 sebesar 0,02%.

Tabel 1.8.
Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang
Tahun 2021-2025

No	Pendidikan	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2	S2	280	270	278	285	261	271	244	242	243	256
3	S1/D-IV	1.395	2.773	1.291	2.623	1.160	2464	1.065	2.347	983	2.260
4	D – III	235	982	280	1.2301.	268	1223	255	1.175	257	1.206
5	D – II	94	198	83	168	63	90	50	75	44	68
6	D – I	7	39	5	31	4	29	3	26	2	22
7	SMA	622	358	551	305	488	213	420	182	359	148
8	SMP	145	10	128	10	99	10	95	6	88	5
9	SD	51	2	48	2	41	2	37	1	34	1
Jumlah		2.82	4.632	2.666	4.655	2.384	4.30	2.169	4.055	2.01	3.96
		7.461		7.321		6.686		6.224		5.978	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 1.9.
Komposisi Pendidikan PPPK (orang) Kabupaten Magelang
Tahun 2021 – 2025

No	Pendidikan	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	1	0	5	10	3	8	2	2	1	0
3	S1/D-IV	44	97	508	1.586	701	2167	797	2.306	860	2561
4	D – III	6	19	9	27	31	98	57	204	71	237
5	D – II	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0



No	Pendidikan	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
6	D – I	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
7	SMA	42	11	42	18	50	14	84	16	216	60
8	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
9	SD	0	0	0	4	1	0	1	0	9	1
Jumlah		93	128	564	1.648	786	2.290	941	2.531	1.116	2.85
		221		2.212		3.076		3.472		4.024	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Menurut Jenis Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait pendapatan asli daerah mengacu pada pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RKPD Tahun 2025 yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Tabel 1.10.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Target TA 2025	Realisasi			% Kenaikan/ Penurunan dari realisasi tahun 2024
			TA 2025	%	TA 2024 AUDITED	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	648.525.382.378,00	713.530.211.346,00	110,02	520.847.740.395,00	36,99
2	Pendapatan Transfer	2.088.364.081.665,00	2.050.346.274.085,00	98,18	2.249.187.553.796,00	(8,84)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.504.200.000,00	9.962.280.475,00	79,67	10.495.547.244,00	(5,08)
Jumlah		2.749.393.664.043,00	2.773.838.765.906,00	100,89	2.780.530.841.435,00	(0,24)

*Sumber Data dari BPPKAD per 9 Februari 2026



Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 ditargetkan Rp2.749.393.664.043,00 dan terealisasi sebesar Rp2.773.838.765.906,00 atau sebesar 100,89%.

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah tahun 2025 ditargetkan Rp2.850.084.762.056,00 dan terrealisasi sebesar Rp2.691.353.364.242,00 atau sebesar 94,43%. Realisasi belanja daerah tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp179.297.935.494,00 atau 6,25%.

Rincian lebih lanjut target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.11.
Target dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Target TA 2025	Realisasi			% Kenaikan/ Penurunan dari realisasi tahun 2024
			TA 2025	%	TA 2024 AUDITED	
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA OPERASI	1.957.533.206.137,01	1.862.650.785.385,00	95,15	1.912.219.026.392,00	(2,59)
a	Belanja Pegawai	1.192.235.718.392,00	1.143.612.971.979,00	95,92	1.147.555.914.649,00	(0,34)
b	Belanja Barang dan Jasa	643.259.894.307,63	604.516.559.517,00	93,98	580.308.946.970,00	4,17
c	Belanja Hibah	109.492.657.447,38	103.388.826.889,00	94,43	178.695.982.973,00	(42,14)
d	Belanja Bantuan Sosial	12.544.935.990,00	11.132.427.000,00	88,74	5.658.181.800,00	96,75
2	BELANJA MODAL	220.840.567.240,61	204.445.268.939,00	92,58	300.087.089.964,00	(31,87)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.891.309.362,88	7.365.812.956,00	74,47	4.120.214.822,00	78,77
4	BELANJA TRANSFER	661.819.679.315,50	616.891.496.962,00	93,21	654.221.721.549,00	(5,71)
TOTAL BELANJA DAERAH		2.850.084.762.056,00	2.691.353.364.242,00	94,43	2.870.648.052.727,00	(6,25)

*Sumber Data dari BPPKAD per 9 Februari 2026

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya



meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah netto ditargetkan sejumlah Rp100.691.098.013,00 terealisasi Rp100.691.098.013,00. Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Target TA 2025	Realisasi			% Kenaikan/ Penurunan dari realisasi tahun 2024
			TA 2025	%	TA 2024 AUDITED	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00	100,00	157.408.613.305,00	(36,03)
b	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00		35.868.696.000,00	(100,00)
	JUMLAH	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00	100,00	193.277.309.305,00	(47,90)
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
a	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00		2.469.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	0,00	0,00		2.469.000.000,00	(100,00)
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO	100.691.098.013,00	100.691.098.013,00	100,00	190.808.309.305,00	(47,23)

*Sumber Data dari BPPKAD per 9 Februari 2026

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPD Tahun 2025-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing



urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang dikelompokkan dalam 4 (enam) bidang permasalahan:

Tabel 1.13.
Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2025
1	2	3	4
1.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan 2) Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan 3) Belum Optimalnya Keberdayaan Berbasis Gender 	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
2.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah 2) Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah 3) Masih Tingginya Jumlah PMKS 4) Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka 	Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi daerah melalui optimalisasi sektor-sektor potensial	Peningkatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat serta keterserapan tenaga kerja.
3.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur 2) Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik 	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan pemukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana
4.	<ul style="list-style-type: none"> 1) Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 2) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi 3) Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 4) Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik 5) Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian 	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kondusivitas wilayah

Sumber; Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025



b. Visi dan Misi kepala Daerah

Sehubungan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Magelang maka Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam menyusun LPPD mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan Visi “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera” atau “Magelang Anyar Gress”, maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, berdaya saing, dan sehat dengan titik fokus pada Pembangunan SDM;
2. Akselerasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
3. Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah;
5. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026, tujuan Kabupaten Magelang meliputi:

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut.
 - a) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga;
 - c) Meningkatnya keberdayaan gender;
 - d) Meningkatnya literasi masyarakat.



Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing diwujudkan melalui (1) meningkatkan penyelenggaraan layanan pendidikan; (2) meningkatkan mutu pendidikan; (3) meningkatkan pengelolaan kebudayaan; (4) meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga; (5) meningkatkan literasi dasar masyarakat; (6) meningkatkan pelayanan kesehatan; (7) meningkatkan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; serta (8) meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan sasaran sebagai berikut.
 - a) Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah;
 - b) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
 - c) Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar;
 - d) Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
 - e) Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.

Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah diwujudkan melalui (1) meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan); (2) meningkatkan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) meningkatkan pengembangan usaha masyarakat; (4) meningkatkan investasi daerah; (5) meningkatkan kinerja lembaga ekonomi daerah; (6) meningkatkan status desa maju dan mandiri; (7) meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam; (8) meningkatkan akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial; serta (9) meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut.
 - a) Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang;
 - b) Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak;
 - c) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup;
 - d) Berkurangnya risiko bencana

Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan diwujudkan melalui (1) meningkatkan



layanan infrastruktur wilayah dan penataan ruang; (2) meningkatkan administrasi kepemilikan tanah; (3) meningkatkan layanan perhubungan; (4) meningkatkan layanan komunikasi dan informatika; (5) meningkatkan pemenuhan hunian layak dan berkualitas; (6) meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup; serta (7) meningkatkan mitigasi bencana.

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, dengan sasaran sebagai berikut.
 - a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan;
 - b) Meningkatnya kondusivitas wilayah.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi diwujudkan melalui (1) meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik; (2) meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan dan layanan kearsipan; (3) meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah; (4) meningkatkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, tenteram, dan tertib; (5) meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat; serta (6) meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

- c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2026 dengan uraian program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 7) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
- 8) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 10) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



- 12) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 13) Program Pengembangan Permukiman
- 14) Program Penataan Bangunan Gedung
- 15) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 16) Program Penyelenggaraan Jalan
- 17) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 18) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 19) Program Pengembangan Perumahan
- 20) Program Kawasan Permukiman
- 21) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 22) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
- 23) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 24) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 25) Program Penanggulangan Bencana
- 26) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 27) Program Pemberdayaan Sosial
- 28) Program Rehabilitasi Sosial
- 29) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 30) Program Penanganan Bencana
- 31) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 32) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 33) Program Hubungan Industrial
- 34) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 35) Program Perlindungan Perempuan
- 36) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 37) Program Perlindungan Khusus Anak
- 38) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 39) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 40) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 41) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 42) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan



- 43) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 44) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 45) Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (Kehati)
- 46) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
- 47) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 48) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- 49) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 50) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 51) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 52) Program Pengelolaan Persampahan
- 53) Program Pendaftaran Penduduk
- 54) Program Pencatatan Sipil
- 55) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
- 56) Program Penataan Desa
- 57) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 58) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 59) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 60) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 61) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 62) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAAJ)
- 63) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 64) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 65) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 66) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 67) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 68) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 69) Program Pengembangan UMKM
- 70) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal



- 71) Program Promosi Penanaman Modal
- 72) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 73) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 74) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 75) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 76) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 77) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 78) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
- 79) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 80) Program Pengembangan Kebudayaan
- 81) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 82) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 83) Program Pembinaan Perpustakaan
- 84) Program Pengelolaan Arsip
- 85) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 86) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 87) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 88) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 89) Program Pemasaran Pariwisata
- 90) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 91) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 92) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 93) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 94) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 95) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 96) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 97) Program Penyuluhan Pertanian
- 98) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 99) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 100) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 101) Program Pengembangan Ekspor
- 102) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen



- 103) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 104) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 105) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 106) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 107) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 108) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 109) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 110) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 111) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 112) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 113) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 114) Program Kepegawaian Daerah
- 115) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 116) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 117) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 118) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 119) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 120) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 121) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 122) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 123) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 124) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 125) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 126) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 127) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 128) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah



Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Magelang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Mendasarkan kerangka pendanaan tahun 2025, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.14.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Pendidikan	1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.	Kesehatan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Peningkatan Pelayanan BLUD
		2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 5) Penerbitan <i>Sticker</i> Pembinaan pada Makanan jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 6) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Peningkatan Sumber Daya Air (SDA)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4		
		4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
		5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		6) Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		7) Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
		8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
		9) Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
		10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		
		4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				2) Program Pengembangan Perumahan	1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			5) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		3) Program Kawasan Permukiman	1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		6) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Penanggulangan Bencana	1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
6.	Sosial	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Rehabilitasi Sosial	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Penanganan Bencana	1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Hubungan Industrial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2) Program Perlindungan Perempuan	1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		4) Program Perlindungan Khusus Anak	1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pangan	2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		3) Program Penanganan Kerawanan Pangan	1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		4) Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
5.	Lingkungan Hidup	5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6) Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		7) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		8) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		9) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		10) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		11) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH	1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		12) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		13) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		14) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		15) Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		3) Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
		4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		3) Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
		4) Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9.	Perhubungan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota 8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 11) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 12) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota
10.	Komunikasi dan Informatika	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
		6) Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
12.	Penanaman Modal	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		3) Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		4) Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
14.	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
15.	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.	Kebudayaan	1) Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
17.	Perpustakaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pembinaan Perpustakaan	1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
		4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Pariwisata	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Hal Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.	Pertanian	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian
		4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		5) Program Perizinan Usaha Pertanian	1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2) Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
		6) Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 3) Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4.	Perdagangan	1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1) Penerbitan Tanda Daftar Gudang 2) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
5.	Perindustrian	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Unsur Pendukung			
1.	Sekretariat Daerah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Penataan Organisasi 9) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 10) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Perangkat Daerah 11) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1) Administrasi Tata Pemerintahan 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah 3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		3) Program Perekonomian dan Pembangunan	1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
2.	Sekretariat DPRD	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9) Layanan Administrasi DPRD
		2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4) Peningkatan Kapasitas DPRD 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7) Fasilitasi Tugas DPRD
3) Unsur Penunjang			
1.	Perencanaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2.	Keuangan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Kepegawaian	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Kepegawaian Daerah	1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2) Mutasi dan Promosi ASN 3) Pengembangan Kompetensi ASN 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4.	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Unsur Pengawasan			
1.	Inspektorat	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Pengawasan	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2) Pendampingan dan Asistensi
Unsur Kewilayahan			
1.	Kecamatan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Unsur Pemerintahan Umum			
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan



No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
		5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025, diolah



1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal harus tercapai target 100% setiap tahunnya. Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM urusan Pemerintah wajib mencakup jenis dan mutu Pelayanan Dasar dari bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta bidang urusan Sosial dengan berbagai indikatornya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan objek kebijakan (regulasi) yang mengatur penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal lebih merupakan kinerja program sektoral, tetapi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah melalui Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota dan Tim Penerapan SPM Provinsi. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah di mana penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator serta batas waktu pencapaian tetapi berdasarkan: (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Namun dalam penerapannya, seringkali pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Daerah belum optimal. Diperlukan komitmen bersama baik dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk pencapaian SPM 100%.

b. Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Magelang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;

Adapun standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Menteri teknis terkait.

Tabel 1.15.
Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal

No.	Urusan Bidang	Dasar Hukum
1.	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2.	Kesehatan	Permenkes Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023. Tentang Standar Teknis Standar



No.	Urusan Bidang	Dasar Hukum
		Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat
5.	Trantibumlinmas	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6.	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

c. Kebijakan Umum

Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM, mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah (lima tahunan) yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta jangka pendek (tahunan) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, SPM juga diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran (APBD). Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta menerapkan SPM sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan SPM tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Target Indikator SPM diintegrasikan dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD. Target tahunan indikator SPM dituangkan dalam RKPD, Renja PD, KUA PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berikut ini tabel Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan yang telah terintegrasi dalam RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.16.
Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
Yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing*	Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat*	Pengelolaan Pendidikan**	Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs**	90,36**
			Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)**	75,12**
			Jumlah ATS yang Kembali ke sekolah **	1.500**
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	Persentase Guru Bersertifikat**	67,45**

Sumber: * RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

** Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2026

Berikut ini tabel Program dan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan yang telah terintegrasi dalam RPD Kabupaten Magelang dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.17.
Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
Yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdayasaing*	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga*	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan**	100**
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	Capaian kapasitas sumber daya manusia kesehatan**	100**
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PIRT**	100**
			Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)**	85**

Sumber: * RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

** Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026

Berikut ini tabel Program dan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang telah terintegrasi dalam RPD Kabupaten Magelang dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.18.
Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
Yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan*	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan Ruang*	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik**	92,56**
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	Cakupan layanan air minum **	93,92**

Sumber: * RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

** Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2026

Berikut ini tabel Program dan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang telah terintegrasi dalam RPD Kabupaten Magelang dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025:

Tabel 1.19.
Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
Yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan*	Meningkatnya penyediaan perumahan dan Kawasan permukiman layak*	Pengembangan Perumahan**	Persentase layanan pengembangan perumahan**	100**

Sumber: * RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

** Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2026

Berikut ini tabel Program dan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas yang telah terintegrasi dalam RPD Kabupaten Magelang dan Restra Satpol PP dan PK serta Renstra BPBD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025:

Tabel 1.20.

Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi*	Meningkatnya kondusivitas wilayah*	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Persentase penertiban yang dilaksanakan**	100**
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan*	Berkurangnya risiko bencana*	Penanggulangan Bencana**	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	100**

Sumber: * RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

** Renstra Satpol PP dan PK serta Renstra BPBD Tahun 2025-2026

Berikut ini tabel Program dan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial yang telah terintegrasi dalam RPD Kabupaten Magelang dan Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA tahun 2025-2026 untuk pelaksanaan tahun 2025:

Tabel 1.21.
Program dan Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah*	Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar*	Pemberdayaan Sosial**	Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial**	11**
		Rehabilitasi Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	100**
		Perlindungan dan Jaminan Sosial**	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	88,90**

Sumber: * RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

** Renstra Dinas Sosial PPKB PPPA Tahun 2025-2026

Arah kebijakan tahun 2025 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.22.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan
Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah 3. Persentase SD/SMP yang terakreditasi minimal B	Meningkatkan penyelenggaraan layanan Pendidikan	Meningkatkan penyediaan fasilitas Pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh Pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2025 SPM Bidang Urusan Pendidikan sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPD Kabupaten Magelang.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1.23.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan
Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			Meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan serta pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
			Meningkatkan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan Pangan Industry Rumah Tangga (PIRT) sesuai standar
			Meningkatkan mutu fasilitas Kesehatan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2025 SPM Bidang Urusan Kesehatan sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Kesehatan. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPD Kabupaten Magelang.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Berikut tabel arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.24.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Pekerjaan Umum	Cakupan Pembangunan Infrastruktur wilayah berkelanjutan	Meningkatkan layanan infrastruktur wilayah dan penataan ruang	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan
			Meningkatkan layanan sanitasi layak
			Meningkatkan penyediaan dan



Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			pengaturan air untuk menunjang pertanian
			Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di Kawasan startegis
			Meningkatkan penataan bangunan Gedung dan lingkungannya
			Meningkatkan kualitas kontruksi dan Sarana Prasarana ke – PU – an
			Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2025 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPD Kabupaten Magelang.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Berikut tabel arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1.25.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Perumahan Rakyat	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Meningkatkan pemenuhan hunian layak dan berkualitas	Meningkatkan penyelenggaraan penyediaan rumah layak huni
			Meningkatkan penyelenggaraan PSU perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatkan penanganan terhadap Kawasan permukiman kumuh

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2025 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPD Kabupaten Magelang.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Berikut ini tabel arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.26.

Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Dalam Arah Kebijakan Satpol PP dan PK serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Trantibumlinmas	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kondisi wilayah yang aman, nyaman, tentram dan tertib	Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
			Meningkatkan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
		Meningkatkan Mitigasi bencana	Meningkatkan keterpaduan penanganan bencana

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2025 SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Satpol PP dan PK serta BPBD. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPD Kabupaten Magelang.

6. Bidang Urusan Sosial

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.27.

Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Urusan Sosial	Persentase penurunan PMKS	Meningkatkan akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatkan layanan kesejahteraan sosial

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026



Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2025 SPM Bidang Urusan Sosial sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Sosial PPKB PPPA. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPD Kabupaten Magelang.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025**



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Capaian kinerja makro di Kabupaten Magelang tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025	Perubahan (%)
1	2	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,10	73,09	1,37
2.	Angka Kemiskinan	10,83	9,90	-8,59
3.	Angka Pengangguran	3,55	3,52	-0,85
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,10	0,79
5.	Pendapatan per Kapita	30,57	32,60	6,64
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,364	0,400	9,89

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja makro Tahun 2025 mengalami perubahan positif. Hasilnya dilihat dari sejumlah indikator-indikator makro. Di antaranya kenaikan IPM Kabupaten Magelang naik dari angka 72,10 tahun 2024 menjadi 73,09 pada tahun 2025. Pada Angka Kemiskinan menunjukkan penurunan dari angka 10,83 persen di tahun 2024 menjadi 9,90 persen pada tahun 2025. Angka Pengangguran turun dari angka 3,55 persen pada tahun 2024 menjadi 3,52 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan pada tahun 2024 5,06 persen menjadi 5,10 persen pada tahun 2025. Pendapatan per Kapita pada tahun 2024 capaiannya sebesar 30,57 juta rupiah



kemudian mengalami peningkatan menjadi 32,60 juta rupiah pada tahun 2025. Indikator selanjutnya adalah Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 0,364 menjadi 0,400 pada tahun 2025.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Pemerintahan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Usuran Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	84,75	DISDIKBUD	
		Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,36	DISDIKBUD	
		Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	DISDIKBUD	
		Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	36,70	DISDIKBUD	
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	34,72	DISDIKBUD	
2.	Kesehatan	Persentase kematian ibu	0.05	Dinas Kesehatan	Target Jumlah kematian ibu 2025 13 orang (jumlah perempuan yang meninggal dunia selama masa kehamilan, persalinan, atau nifas (42 hari setelah melahirkan) Realisasi 6 (Ibu melahirkan atau nifas)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15.85	Dinas Kesehatan	Target Prevalensi



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Stunting 2025 pada Renstra Dinas kesehatan sebesar 15,91 %
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	97,19	Dinas Kesehatan	beberapa ibu hamil yang pada bulan desember masih belum saatnya K6.
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	96,45	Dinas Kesehatan	persalinan yang ke empat dan seterusnya bisa menyebabkan proses persalinan cepat sehingga bayi sudah lahir sebelum ibu hamil datang ke fasyankes. Persalinan yang maju dan mundur dari perkiraan persalinan juga dapat menyebabkan bayi lahir tidak di fasyankes.
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	96,94	Dinas Kesehatan	adanya bayi baru lahir yang dilayani di faskes luar Kabupaten Magelang
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,80	Dinas Kesehatan	Adanya balita yang tidak tinggal di domisili ketika adanya pelayanan kesehatan balita.
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	Sasaran usia Pendidikan dasar pada target SPM 2025 Sebanyak 169.354 dan realisasi sbesar 169.358 realisasi melebihi 100% sehingga sasaran disamakan realisasi
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	99,79	Dinas Kesehatan	Masyarakat usia produktif yang tidak tinggal di domisili ketika adanya pelayanan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					kesehatan usia produktif
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	Sasaran usia Lanjut pada target SPM 2025 Sebanyak 166.395 dan realisasi sebesar 172.485 realisasi melebihi 100% sehingga sasaran disamakan realisasi
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	95,93	Dinas Kesehatan	kurangnya kesadaran masyarakat penderita Hipertensi untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan.
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	Sasaran pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pada target SPM 2025 Sebanyak 19.610 dan realisasi sebesar 23.021 realisasi melebihi 100% sehingga sasaran disamakan realisasi
		Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	Sasaran pelayanan kesehatan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat pada target SPM 2025 Sebanyak 2.508 dan realisasi sebesar 2.616 realisasi melebihi 100% sehingga sasaran disamakan realisasi
		Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	Sasaran pelayanan kesehatan kesehatan Orang pelayanan kesehatan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					orang terduga Tuberkulosis pada target SPM 2025 Sebanyak 10.675 dan realisasi sebesar 13.874 realisasi melebihi 100% sehingga sasaran disamakan realisasi
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	98,01	Dinas Kesehatan	Sulitnya menjangkau populasi kunci (LSL, WPS, Waria).
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	72,16	DPUPR	Tingkat kerusakan lebih tinggi dari tingkat penanganan / keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan irigasi
		Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	70,72	DPUPR	Tingkat kerusakan lebih tinggi dari tingkat penanganan / keterbatasan alokasi anggaran untuk penanganan Jalan Jembatan
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	95,54	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,08	DPUPR	
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	12,78	DPUPR	Alokasi Anggaran untuk penanganan (pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan drainase) tidak dialokasikan tiap tahun, sehingga luasan yang terlindungi masih sangat kecil



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Tidak Dapat Dilaksanakan	DPUPR	Tidak terdapat wilayah pantai
		Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100,00	DPUPR	
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100,00	DPUPR	
		Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	83,98	DPUPR	Masih menunggu kelengkapan data dari bidang
		Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	10,10	DPUPR	Penilaian dilakukan untuk PKKPR yang terbit di tahun N-1. PKKPR Yang belum bisa dinilai dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1. Masih dalam proses dokumen lingkungan 2. Masih dalam proses pengurusan perizinan usaha tambang 3. Masih Dalam proses penyelesaian persyaratan dasar berusaha 4. Bangunan belum terbangun 5. Tidak Ada kontak yang bisa dihubungi 6. PKKPR perolehan hak atas tanah bukan pemanfaatan ruang 7. PKKPR yang baru terbit ditahun 2025 masih memerlukan dokumen pendukung lain dan bangunan juga belum terbangun
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00	DPRKP	
		Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	41,25	DPRKP	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	9,35	DPRKP	capaian prosesntase



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					9,35 % telah melampaui target tahunan sebesar 5,54%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Tidak Dapat Dilaksanakan	DPRKP	
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33.33	BPBD	
		Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	SATPOL PP dan PK	Capaian Belum maksimal karena ada beberapa Perda yang Sudah tidak berlaku
		Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	82,86	SATPOL PP dan PK	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.11	BPBD	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85,71	SATPOL PP dan PK	Capaian belum maksimal karena kendala Geografis dan jarak tempuh dan juga kondisi infratraktur jalan
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	64.92	Dinas Sosial PPKB PPPA	
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	2,34	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Capaian kinerja rendah karena : 1. Banyak perusahaan belum memperbarui Peraturan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					Perusahaannya yang telah habis masa berlakunya. 2. Perusahaan yang terdaftar di Portal Wajib Laporkan Ketetapan Perusahaannya (WLKP) banyak yang merupakan perusahaan kecil/perorangan yang tidak mempunyai karyawan/hanya kurang dari 10 tetapi mendaftar di WLKP sehingga syarat tata kelola yang layak tidak terpenuhi.
		Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Sosial PPKB PPPA	
9.	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	79,64	Dinas Pertanian dan Pangan	
10.	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	96,34	DPUPR	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	94,29	DPUPR	
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	20	DPUPR	Anggaran Tahun 2025 hanya cukup untuk menyusun 1 lokasi RDTR, Penyusunan yang berlanjut pada tahun 2026: 1. RDTR Kawasan Perkotaan Secang-Grabag 2. RDTR Kawasan Perkotaan Tegalrejo 3. RDTR Bagian Kawasan



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Perkotaan Muntilan Rencana Bantek: 1. RDTR Kawasan Perkotaan Borobudur 2. RDTR Kawasan Perkotaan Salaman
11.	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	40	DLH	
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	37,75	DLH	
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	98,83	DISDUKCAPIL	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	78,48	DISDUKCAPIL	Kesadaran masyarakat belum maksimal karena penggunaan KIA belum banyak digunakan untuk pelayanan publik
		Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	50	DISDUKCAPIL	Sesuai Permendagri No. 65 Tahun 2010, pada BAB III Pasal 11 bahwa Penyusunan profil kependudukan dilakukan setiap tahun anggaran
		Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	98,89	DISDUKCAPIL	-
		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	DISDUKCAPIL	
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tuntas hasil 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	18,90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum maksimal karena adanya Perubahan Kebijakan dari IDM ke ID
		Persentase fasilitasi kerja sama desa	84,21	Dinas Pemberdayaan	Belum maksimal karena belum



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Masyarakat Desa	seluruh desa terjalin kerjasama antar desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	104,43	Dinas Sosial PPKB PPPA	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	77,27	Dinas Sosial PPKB PPPA	-
		Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	63,53	Dinas Sosial PPKB PPPA	
15.	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,64	Dinas Perhubungan	Beberapa jalur trayek sudah tidak dilewati oleh angkutan umum dikarenakan sepinya penumpang dan masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan online
		Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,15	Dinas Perhubungan	
		Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	100	Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DISKOMINFO	
17.	Koperasi dan UKM	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	-45,09	DISDAGKOP UKM dan DPMPTSP	a. Data yang disajikan data per tanggal 6 Maret 2026 b. Data masih bersifat sementara karena volume usaha koperasi tahun 2025 berdasarkan RAT yang mana batas akhir periode RAT Maret 2026
		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	4,77	DISDAGKOP UKM	a. Masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftar NIB karena belum semua pelaku usaha



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					mengetahui informasi terkait NIB dan belum semua pelaku usaha membutuhkan NIB terutama untuk usaha rumahan yang berada di pelosok desa. b. Ketersediaan data NIB tahun 2023 keatas yang terbatas
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	18.48	DPMPTSP	Realisasi persentase peningkatan investasi di kabupaten magelang melampaui target Renstra DPMPTSP Kabupaten Magelang tahun 2025 yaitu target 10% realisasi 18.48%
		Realisasi total terhadap target investasi	100.23	DPMPTSP	Realisasi investasi melampaui target yang ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
19	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100	DISPARPORA	
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,01	DISPARPORA	
		Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0,47	DISPARPORA	Atlet yang masuk dalam Pemusatan Latihan Daerah Provinsi merupakan atlet senior terbaik di Jawa Tengah dan atau atlet junior usia pelajar yang dinilai potensial
		Persentase jumlah atlet berprestasi	100	DISPARPORA	
20	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100	DISKOMINFO	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
21	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	77.67	DISKOMINFO	Implementasi kebijakan, prosedur dan Penerapan perangkat teknologi keamanan informasi belum terimplem entasi secara merata, Masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan informasi
22	Kebudayaan	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	3.61	DISDIKBUD	
		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	50.10	DISDIKBUD	
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	56,06	DISPUSPA	Belum maksimal, Adanya regulasi baru tentang cara pengukuran TKM menjadi factor terbesar tldak tercapainya target kinerja tahun 2025
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	12,31	DISPUSPA	Belum maksimal, Adanya regulasi baru tentang cara pengukuran IPLM menjadi factor terbesar tldak tercapainya target kinerja tahun 2025
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	75.05	DISPUSPA	
25	Kelautan Perikanan	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	9,59	DISPETERIKAN	
		Produksi perikanan tangkap dan budidaya	101,55	DISPETERIKAN	
26	Pariwisata	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	97,21	DISPARPORA	Data bersumber dari DPMPPTSP, tidak masuk dalam renstra Disparpora



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	0,20	DISPARPORA	Secara akumulatif, realisasi kunjungan wisatawan asing pada tahun 2025 tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Dari sisi wisatawan mancanegara, penurunan laju pertumbuhan dipicu oleh kondisi geopolitik global (perang) serta ancaman resesi ekonomi dunia yang melemahkan daya beli dan minat perjalanan jarak jauh.
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	4,04	DISPARPORA	Tantangan muncul dari keterbatasan daya saing sarana prasarana, amenitas, serta variasi atraksi lokal yang belum mampu mengimbangi agresivitas daerah lain dalam pengembangan dan mempromosikan destinasi wisata baru.
27	Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	3,59	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Peningkatan produksi hortikultura	-1,09	Dinas Pertanian dan Pangan	Pada pertengahan tahun sampai akhir tahun terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini memicu serangan hama penyakit yang cukup tinggi. Petani menanam cabai tahan virus, namun kondisi cuaca ekstrem mengakibatkan varietas tersebut tidak tahan layu/angles. Beberapa



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					kecamatan pindah ke komoditas padi dan sayuran lain di luar tanaman hortikultura. Produksi durian mengalami penurunan karena banyak pohon yang tidak produktif.
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	-1,90	DISPETERIKAN	Kasus PMK pada ternak ruminansia muncul kembali, sehingga produksi daging menurun. Terdapat 1 pelaku usaha ayam petur yang tidak menjalankan usaha karena masalah internal, sehingga target produksi telur menurun.
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100	DISPETERIKAN	
28	Kehutanan	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0	DLH	Kewenangan provinsi
29	ESDM	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0	DPUPR	Kewenangan provinsi
30	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	52.98	DISDAGKOP UKM	Target Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang pada tahun 2025 sebanyak 8.500 Unit, sedangkan realisasinya sebesar 9.006 Unit salah satunya karena adanya program bernama Jempol Mas (Jemput Bola Pelayanan Metrologi untuk Masyarakat). Kegiatannya yaitu setelah selesai sidang tera ulang di pasar-pasar, kemudian ada



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Mitra Metrologi yang mendatangi pemilik timbangan yang belum sempat ikut tera sebelumnya, lalu membawa timbangan ke kantor untuk ditera di kantor. Atau ada beberapa pasar yang tidak mendapatkan jadwal, didatangi oleh Mitra Metrologi, kemudian timbangannya diterakan di kantor Metrologi.
31	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	91,7	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	18,71	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Banyak perusahaan yang tidak lapor di SIINAS
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	58,33	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kurangnya kesadaran pelaku IKM untuk mendaftarkan usahanya di SIINAS
		Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	46,51	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
32	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tidak ada kawasan transmigrasi di Kabupaten Magelang

Sumber: silppd.kemendagri.go.id, Data per 16 Maret 2026



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 8 (delapan) Urusan Pemerintahan.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Penunjang Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	BPPKAD	APBD Ditetapkan tepat waktu
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	29,65	BPPKAD	Terdapat beberapa faktor seperti : 1. Pegawai yang Pensiun 2. Formasi Jabatan belum terisi 3. Penyesuaian kondisi pegawai
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	25,72	BPPKAD	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25,72% terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari keseluruhan pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	57,65	BPPKAD	Sudah melebihi angka minimal 30 %
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	5,74	BPPKAD	Yang masuk dalam IKK ini hanya 3 OPD (DPU, DISDIK, DINKES) secara perhitungan di SIPD persentasenya 30,39 % dari semua OPD



No.	Urusan Penunjang Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3	kelembagaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	63.02	BKPPD	
4	Fungsi Pengawasan	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	5	INSPEKTORAT	
		Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5	INSPEKTORAT	
		Manajemen risiko Indeks	5	INSPEKTORAT	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	66,67	INSPEKTORAT	
5	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
		Pemanfaatan sistem pengadaan	28,33	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	Penyelesaian ePurchasing belum maksimal, Pencatatan non eTendering/ non ePurchasing (Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung) belum maksimal
		Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	21,11	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	Keterisian JF PPBJ masih jauh dari memenuhi 100% walaupun sudah di atas 60%.
6	Hubungan Perwakilan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	BPPKAD	
		Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	81.25	SEKRETARIAT DPRD	
7	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	94.68	BAGIAN ORGANISASI	Di Kabupaten Magelang Penilaian Maladministrasi pada Tahun 2025 tidak ada, karena Kabupaten Magelang tidak menjadi lokus penilaian. Sehingga menggunakan data tahun sebelumnya.
8	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100	BAPPEDA dan LITBANGDA	

Sumber: silppd.kemendagri.go.id, Data per 30 Maret 2026

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada bagian ini disajikan uraian mengenai hasil pengukuran kinerja, analisis, serta evaluasi akuntabilitas kinerja yang menggambarkan secara sistematis tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja, termasuk hambatan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi yang dicapai. Penilaian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan target indikator kinerja dengan realisasinya, serta membandingkan capaian tersebut dengan realisasi pada tahun sebelumnya dan target capaian pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator yang dibedakan menjadi dua, yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Indikator Positif** apabila indikator yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian Kinerja} \\ \text{(Indikator Positif)} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- **Indikator Negatif** apabila indikator yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai realisasi maka semakin rendah capaian kinerja. Untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka indikator negatif diberi tanda bintang (**) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian Kinerja} \\ \text{(Indikator Negatif)} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja digunakan interval nilai realisasi kinerja yang mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian capaian kinerja disusun dalam skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4 mengenai interval nilai dan predikat penilaian realisasi kinerja

Tabel 2.4.
Interval Nilai dan Predikat Penilaian dan Kode Warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2025 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dan target kinerja tahun 2025 dan target kinerja RPD pada tahun 2025, hasil analisis sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 pada Indikator Tujuan

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,98	70,96	71,56	72,1	71,57-72,07	73,09	101,42	
2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	91,81	92,91	92,21	92,21	93,02	92,21*)	99,13	
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	-1,67	5,46	5,04	5,06	4,32-5,36	5,89	136,34	
4 PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,01	28,53	30,57	32,6	32,72	34,75	106,20	
5 Pengeluaran per kapita riil yang	ribu rupiah	9.301	10.011	10.493	10.926	11.186,98	11.343	101,39	



	disesuaikan									
6	Angka Kemiskinan **)	persen	11,27	11,09	10,96	10,83	10,55-10,05	9,90	106,16	
7	Inflasi **)	persen	1,90	6,49	2,61	1,51	< 5	2,61	100	
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,6	71,93	71,93	82,76	71,72	74,17	103,41	
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	61,07	62,29	67,42	78,94	63,54	81,74	128,64	
capaian rata-rata kinerja tujuan									108,66	

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2026

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2024) karena data belum keluar/tidak ada

***) Indikator Negati

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian rata-rata kinerja tujuan pada indikator makro Kepala Daerah tahun 2025 tahun terakhir RPD telah tercapai sebesar 108,66% dengan kriteria Sangat Tinggi, jika dibandingkan dengan target RPD pada tahun 2025. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan Kepala Daerah Kabupaten Magelang terhadap target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis telah tercapai. Dari 9 (sembilan) indikator, 8 (delapan) indikator kinerja tujuan melebihi target dan 1 (satu) indikator tujuan dibawah target.

Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2025 pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 pada Indikator Sasaran

Indikator Kinerja		Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025 RPD			Ket
			2021	2022	2023	2024	Target	Capaian	%	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,79	7,81	7,82	7,83	7,86	8,04	102,29	
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,55	12,58	12,61	12,62	12,65	12,83	101,42	
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	92,67	92,35	92,03	91,63	93,02	91,45	98,31	
4	Angka Harapan Hidup	tahun	73,88	74,03	74,44	74,68	74,50	74,93	100,58	
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	69,64	69,66	70,52	66,97	70,55	66,97*)	88,70	
6	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya*)	100	
7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	NA	94,76	88,011	88,19	89,30	12,31	-	
8	PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	7.086,93	7.486,55	7.913,20	8.341,93	8.704,64	8.859,47	101,78	
9	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.794,55	8.628,27	9.633,01	10.697,97	10.032,12	11.572,25	115,35	
10	Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.366,00	1.675,34	1.675,34	1.675,34	1.947,92	2.156,45	110,71	
11	Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.667,15	4.967,87	5.381,88	5.637,40	5.776,16	5.942,53	102,88	
12	Pertumbuhan Investasi	persen	12,56	32,21	31,95	10,88	10,00	18,48	184,8	
13	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,92	79,44	79,44	80,2	80,68	73,41	90,99	
14	Persentase penurunan PMKS	persen	0,62	0,57	0,57	1,15	0,58	1,15*)	198,28	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **)	persen	5,03	4,97	4,42	3,55	4,75-4,25	3,52	117,18	
16	Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	0,635	0,71	0,70	0,735	0,725	0,724	99,86	
17	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	63,72	73,38	82,78	96,11	57,35	57,09	99,55	
18	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	NA	94,82	95,05	95,05	91,99	91,50	99,47	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (1-	71,41	70,48	65,80	69,40	65,81	73,91	112,31	



		100)								
20	Indeks resiko bencana		NA	77,9 (sedang)	86,49 (sedang)	97,42	77,00 (sedang)	97,42*)	126,52	
21	Nilai AKIP	Angka (1- 100)	61,13	62,25	63,04	63,57	64,31	64,05	99,60	
22	Indeks SPBE		2,67	3,13	3,13	3,92	3,61	4,02	111,36	
23	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,22	84,36	84,78	86,99	84,92	87,71	103,29	
25	Indeks Sistem Merit		0,64	0,64	0,71	0,71	0,78	0,71*)	91,03	
26	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat		NA	82,50	NA	NA	87,57	99	113,05	
capaian rata-rata kinerja sasaran									110,77	

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2026

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2024) karena data belum keluar/tidak ada.

***) Indikator Negatif



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2025 dibandingkan target RPD pada tahun 2025, telah tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,77% dengan kriteria Sangat Tinggi.

Dari 26 (dua puluh enam) indikator sasaran, sebanyak 24 (dua puluh empat) indikator berpredikat Sangat tinggi, 1 (satu) indikator berpredikat Tinggi dan 1 (satu) indikator sasaran tidak dapat diukur disebabkan adanya ketidaksesuaian antara target dan capaian. Hal ini dikarenakan adanya regulasi baru sehingga instrumens dan metodologi yang digunakan berbeda.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut diperlukan dukungan anggaran yang memadai guna menunjang pencapaian target kinerja. Jumlah anggaran dan realisasi per program dalam menunjang tercapainya target kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025

No.	Usuran/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Usuran Pemerintahan Bidang Pendidikan			
a	Program Pengelolaan Pendidikan	164.183.563.818.80	162.035.228.647.00	98.69
b	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.847.108.877	18.912.406.965.00	86.57
2	Usuran Pemerintahan Bidang Kesehatan			
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	193.635.540.742	180.727.840.498.00	93.33
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.007.313.683	1.001.008.056.00	99.37
c	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	504.447.669	441.149.829.00	87.45
d	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	400.463.036	384.003.000.00	95.89
3	Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13.623.709.845	9.000.338.203.00	66.06
b	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.045.936.226	2.037.530.864.00	99.59
c	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.738.870.157	5.609.548.120.00	97.75
d	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.053.054.466	7.050.685.080.00	99.97



e	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	371,859,450	369,796,135.00	99.45
f	Program Penataan Bangunan Gedung	19,175,783,038	18,697,618,965.00	97.51
g	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	191,577,949	191,561,168.00	99.99
h	Program Penyelenggaraan Jalan	42,406,189,465	40,124,514,397.00	94.62
i	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	288,206,500	280,951,989.00	97.48
j	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	747,022,749	643,617,959.00	86.16
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
a	Program Pengembangan Perumahan	578,982,042	531,643,216.00	91.82
b	Program Kawasan Permukiman	54,322,692	51,083,041.00	94.04
c	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	10,293,834,203	10,205,780,512.00	99.14
d	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	179,462,420	25,783,340.00	14.37
e	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3,750,000	2,600,000.00	69.33
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
a	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4,934,919,447	4,295,296,434.00	87.04
b	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7,982,428,550	7,821,197,119.00	97.98
c	Program Penanggulangan Bencana	2,536,990,291	2,429,950,519.00	95.78
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
a	Program Pemberdayaan Sosial	430,112,623	397,665,688.00	92.46
b	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8,899,443,668	8,658,504,922.00	97.29
c	Program Penanganan Bencana	471,457,189	469,019,611.00	99.48
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
a	Program Pengembangan Kebudayaan	397,814,797	375,599,040.00	94.42
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			
a	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38,201,487	34,459,130.00	90.20
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
a	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	150,272,550	138,238,745.00	91.99
b	Program Perlindungan Perempuan	247,851,376	151,583,742.00	61.16
c	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	212,221,460	192,697,219.00	90.80
d	Program Perlindungan Khusus Anak	272,801,623	192,382,562.00	70.52
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
a	Program Pengendalian Penduduk	655,523,158	651,346,110.00	99.36
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11,365,611,687	11,187,418,750.00	98.43



c	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6,870,404,900	6,848,571,632.00	99.68
5	Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
a	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,589,126,192	1,503,429,830.00	94.61
b	Program Penempatan Tenaga Kerja	862,381,333	778,270,416.00	90.25
c	Program Hubungan Industrial	184,444,323	162,409,615.00	88.05
6	Usuran Pemerintahan Bidang Pangan			
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	8,222,000	7,713,788.00	93.82
b	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,684,715,000	1,648,903,007.00	97.87
c	Program Penanganan Kerawanan Pangan	22,555,000	21,796,860.00	96.64
7	Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
a	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	263,945,000	262,229,383.00	99.35
b	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,277,056,213	1,188,190,432.00	93.04
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,209,220,000	3,055,834,031.00	95.22
d	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	271,912,999	268,628,169.00	98.79
e	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	46,599,220	46,396,887.00	99.57
f	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	265,100,000	264,372,004.00	99.73
g	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	207,883,500	200,377,093.00	96.39
h	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	53,952,500	46,917,578.00	86.96
i	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	44,327,264	44,119,193.00	99.53
j	Program Pengelolaan Persampahan	18,002,339,262	15,754,349,970.00	87.51
8	Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
a	Program Pendaftaran Penduduk	833,835,465	833,687,402.00	99.98
b	Program Pencatatan Sipil	742,975,947	739,573,272.00	99.54
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	145,706,202	145,480,740.00	99.85
9	Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
a	Program Penataan Desa	254,163,904	232,301,860.00	91.40
b	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	223,900,935	219,313,858.00	97.95
c	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6,036,260,330	5,844,075,555.00	96.82
d	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	7,256,951,189	5,795,011,135.00	79.85
10	Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan			



a	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29,863,474,825	28,768,314,789.00	96.33
11	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			
a	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,350,280,193	1,233,691,786.00	91.37
b	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,458,765,414	6,214,877,829.00	96.22
12	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	242,959,074	239,065,423.00	98.40
13	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	896,657,557	891,139,083.00	99.38
14	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
a	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	17,349,099	17,262,982.00	99.50
b	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	104,158,444	101,048,316.00	97.01
c	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	835,143,759	779,294,802.00	93.31
d	Program Pengembangan UMKM	7,972,500	7,356,232.00	92.27
15	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			
a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,045,480	99,473,141.00	99.43
b	Program Promosi Penanaman Modal	77,348,010	76,634,330.00	99.08
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	372,530,026	371,505,999.00	99.73
d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	207,808,630	203,626,244.00	97.99
e	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38,258,110	37,782,900.00	98.76
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
a	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3,776,393,760	3,306,592,324.00	87.56
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,385,042,638	10,125,693,704.00	97.50
c	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	312,000,000	311,996,356.00	100.00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
a	Program Pembinaan Perpustakaan	1,216,541,846	1,139,473,465.00	93.66
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
a	Program Pengelolaan Arsip	162,231,881	161,477,065.00	99.53
C	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
a	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	714,972,800	676,034,721.00	94.55
b	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	26,304,805	23,978,400.00	91.16
2	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
a	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	57,539,000	41,733,711.00	72.53
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
a	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,508,768,709	5,169,116,202.00	79.42



b	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10,384,618,179	9,611,699,141.00	92.56
c	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	425,374,056	367,608,940.00	86.42
d	Program Perizinan Usaha Pertanian	40,128,000	39,984,615.00	99.64
e	Program Penyuluhan Pertanian	1,417,015,246	1,376,418,404.00	97.14
f	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	362,609,289	356,473,135.00	98.31
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
a	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	22,392,556	20,426,195.00	91.22
b	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,635,092,182	5,422,031,055.00	96.22
c	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3,236,459,150	3,218,764,434.00	99.45
d	Program Pengembangan Ekspor	98,042,938	97,888,998.00	99.84
e	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	142,276,749	142,101,832.00	99.88
5	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,555,115,314	4,119,632,071.00	90.44
b	Program Pemasaran Pariwisata	685,849,128	685,331,491.00	99.92
d	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	177,370,274	176,986,345.00	99.78
6	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
a	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	992,859,000	856,159,642.00	86.23
b	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	132,208,000	131,922,220.00	99.78
c	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	495,753,200	475,508,904.00	95.92
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
1	Sekretariat Daerah			
a	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	568,151,484	566,338,942.00	99.68
b	Program Perekonomian Dan Pembangunan	471,342,873	451,922,068.00	95.88
2	Sekretariat DPRD			
a	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	23,441,765,490	16,550,695,296.00	70.60
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
1	Perencanaan			
a	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	978,027,219	940,400,317.00	96.15
b	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,617,608,837	1,506,225,086.00	93.11
2	Penelitian dan Pengembangan			
a	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,171,079,352	1,974,215,681.00	90.93
3	Keuangan			
a	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	673,281,610,125	625,665,986,252.00	92.93
b	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,990,261,443	1,716,873,264.00	86.26
c	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,771,219,555	9,794,952,406.00	90.94



d	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,424,607,864,543	1,363,718,893,228.00	95.73
4	Kepegawaian			
a	Program Kepegawaian Daerah	6,082,068,751	5,408,894,294.00	88.93
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
1	Inspektorat Daerah			
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	415,137,396	375,825,684.00	90.53
b	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,660,885,717	1,619,169,410.00	97.49
G	Unsur Kewilayahan			
1	Kecamatan			
a	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	421,136,334	322,651,234.00	76.61
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	161,857,184	161,852,184.00	100.00
c	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2,198,062,058	2,170,810,252.00	98.76
d	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,734,000	19,733,945.00	100.00
H	Unsur Pemerintahan Umum			
1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
a	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	919,492,259	916,519,568.00	99.68
b	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,484,252,132	3,458,863,060.00	99.27
c	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	149,244,668	148,786,000.00	99.69
d	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	200,859,130	200,420,284.00	99.78
e	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,608,647,516	1,580,316,500.00	98.24
Jumlah :		2,823,040,645,499	2,667,598,455,466	94.49

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Magelang, data realisasi keuangan diolah kondisi Februari 2026, unaudited, 2006

Keterangan : *) Tidak termasuk kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2025 mencapai rata-rata **94,49%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	98 (81,66%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	15 (12,5%)
3	66% ≤ 75%	Sedang	5 (4,24%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	1 (0,8%)
5	≤ 50%	Sangat Rendah	1 (0,8%)
Jumlah Program:			120

Berdasarkan tabel tersebut, Realisasi Anggaran Per Program pada tahun 2025 terbanyak pada kriteria sangat tinggi (91% ≤ 100%) yaitu 98 program (81,66%), Kriteria Tinggi sebanyak 15 program (12,50%), Kriteria Sedang 5 program (4,24%), Kriteria Rendah sebanyak 1 program (0,80%) dan kriteria Sangat Rendah (≤ 50%) sebanyak 1 program (0,80%).

b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2025, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2025 terhadap indikator makro berjumlah 4 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja. Selain indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 14 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Magelang 2025-2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LPPD pada pembahasan ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun 2025 RPD Kabupaten Magelang 2025-2026.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025 masih terdapat penggunaan data sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik atau lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

1) Evaluasi Tujuan Strategis

- i) Tujuan Strategis: Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pada tujuan strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Tahun 2025			Ket
		2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	70,96	71,56	72,1	71,57-72,07	73,09	101,42	
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	92,91	92,21	92,21	93,02	92,21*)	99,13	
Rata-rata capaian							100,28	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2026

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2024) karena data belum keluar/tidak ada

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Tabel 2.10.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang
Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2022-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,28	74,44	74,68	74,93
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58	12,61	12,62	12,83
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,81	7,82	7,83	8,04
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10.011	10.493	10.926	11.343

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2026

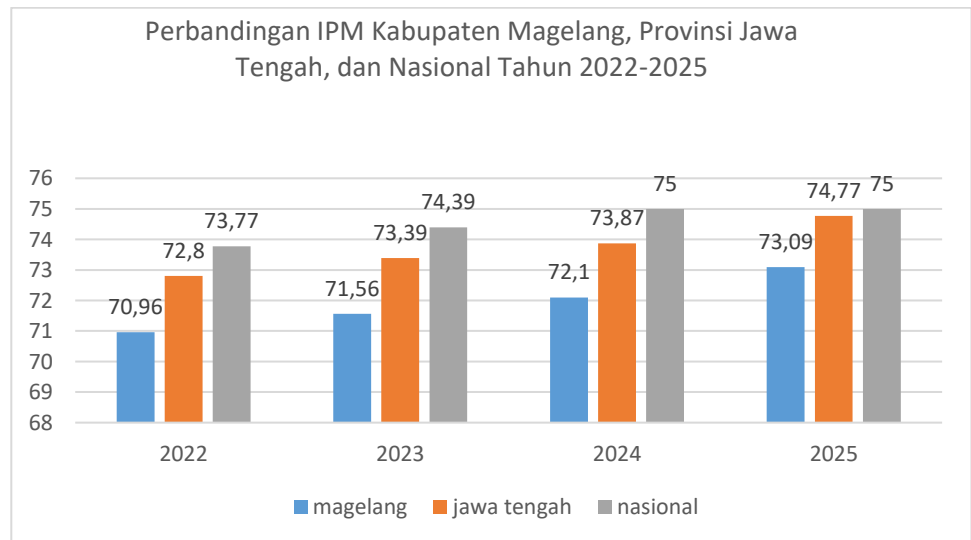
Tabel 2.11.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No.	Kabupaten/Provinsi/Nasional	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Magelang	70,96	71,56	72,10	73,09
2	Provinsi Jawa Tengah	72,80	73,39	73,87	74,77
3	Nasional	73,77	74,39	75,02	75,02*)

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026 dan Statistik Nasional, 2025
Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2024) karena data belum keluar/tidak ada

Berdasarkan tabel di atas capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang masih dibawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 2.1.
Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2022-2025



*) data sementara

Sumber : Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2026

Keterangan : Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2009 menggunakan perhitungan metode lama, sementara realisasi tahun 2010-2025 menggunakan perhitungan metode baru

Tabel 2.12.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang,
dengan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu 2022-2025

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Purworejo	73,67	74,35	75,16	75,93
2	Kabupaten Wonosobo	68,69	70,18	70,63	71,50
3	Kabupaten Magelang	70,96	71,56	72,10	73,09
4	Kabupaten Temanggung	70,77	71,33	71,86	72,52
5	Kota Magelang	80,39	81,17	82,15	82,92

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2025 berada di urutan ketiga dibawah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo.

Tujuan strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing juga diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Laki-laki dengan IPM Perempuan. Kegunaan dilakukannya penghitungan IPG yaitu untuk melengkapi penghitungan IPM yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna. Secara umum, pembangunan manusia menurut gender di Kabupaten Magelang menunjukkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif baik, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 2.13.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6
Kabupaten Magelang	91,89	92,21	92,91	92,56
Provinsi Jawa Tengah	92,48	92,83	93,31	93,00
Nasional	91,27	91,63	92,29	91,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan Statistik Nasional, 2025

Dari tabel diatas,diketahui bahwa IPG Kabupaten Magelang tahun 2024 berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional.

Tabel 2.14.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Magelang, dengan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu
2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
1	3	4	5	6
Kabupaten Purworejo	95,33	95,57	95,38	95,24
Kabupaten Wonosobo	92,75	92,64	92,85	92,94
Kabupaten Magelang	92,26	92,56	92,91	92,93
Kabupaten Temanggung	95,72	95,94	96,13	96,13
Kota Magelang	95,51	95,86	96,38	96,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas, diketahui bahwa IPG Kabupaten Magelang tahun 2024 berada di urutan paling bawah bawah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu.

Berdasarkan hasil tersebut, Kabupaten Magelang kedepan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender



mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp398,711,609,756.29 dengan realisasi sebesar Rp379,597,371,217.00 (95,21%)

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
11. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

12. Program Perlindungan Perempuan
 13. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 14. Program Perlindungan Khusus Anak
 15. Program Pembinaan Perpustakaan
 16. Program Pengelolaan Arsip
- ii) Tujuan Strategis: Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Pada tujuan strategis Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah diukur dalam 5 (lima) indikator kinerja tujuan, yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan, Angka Kemiskinan, dan Inflasi.

Berikut capaian tujuan strategis Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah:

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	-1,67	5,46	5,04	5,06	4,32-5,36	5,89	136,34	
PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,01	28,53	30,57	32,6	32,72	34,75	106,20	
Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.301	10.011	10.493	10.926	11.186,98	11.343	101,39	
Angka Kemiskinan ^{**)}	persen	11,27	11,09	10,96	10,83	10,55-10,05	9,90	106,16	
Inflasi ^{**)}	persen	1,90	6,49	2,61	1,51	< 5	2,61	100	
Rata rata capaian kinerja								110,02	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2026

Keterangan : **)Indikator negative

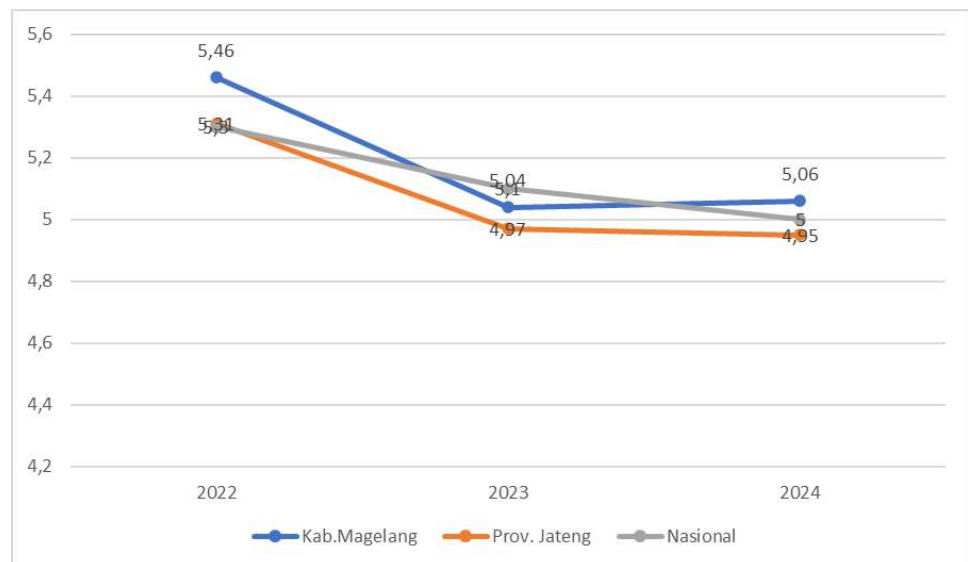
Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah pada tahun 2025 sebesar 110,02 (Sangat Tinggi) terhadap target RPD tahun 2025.

Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) merupakan hasil adopsi konsep pengukuran IDSD oleh Kemenristekdikti dan BRIN dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2020. Provinsi Jawa Tengah

sendiri sudah konsisten melakukan penghitungan IDSD/PDSD sejak tahun 2018. Pemanfaatan IDSD/PDSD sebagai masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

PDSD Tahun 2023 diukur melalui 97 Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah dan 1 Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah. Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah tersebut terbagi dalam 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 dimensi, sedangkan Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah meliputi 8 indikator yang terbagi menjadi 2 pilar dan 4 dimensi.

Gambar 2.2.
Perbandingan LPE Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2022-2024



Sumber : Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Keterangan : Realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2005-2010 menggunakan perhitungan metode lama (tahun dasar 2000), sementara realisasi tahun 2010-2024 menggunakan perhitungan metode baru (tahun dasar 2010)

Berdasarkan pengukuran pemetaan daya saing daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024, nilai Aspek PDSD tertinggi adalah pada Faktor Penguat/Enabling Environment dan aspek ini menjadi faktor yang kuat di dalam internal Kabupaten Magelang. Faktor penguat terdiri dari Kelembagaan, Infrastruktur, dan Perekonomian Daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Magelang menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Magelang.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Magelang tahun 2025 sebesar 5,89 atau 136,34% dari target RPD Tahun 2025 dan bertambah cukup signifikan dari capaian tahun 2024.

Tabel 2.16.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
1	3	4	5	6
Kabupaten Magelang	5,46	5,04	5,06	5,89
Provinsi Jawa Tengah	5,31	4,97	4,95	5,37
Nasional	5,3	5,1	5,0	5,0*)

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

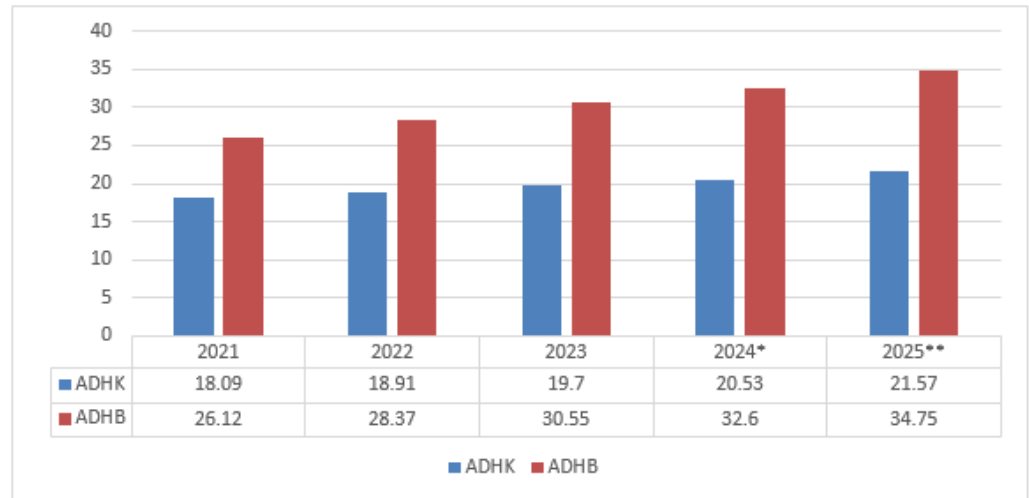
Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2024) karena data belum keluar

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu.

PDRB Per Kapita Kabupaten Magelang tahun 2025 sebesar 34,75 atau 106,20% dari target RPD tahun 2025. Besaran PDRB per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang terangkum dalam nilai PDRB (ADHB), serta banyak sedikitnya jumlah penduduk.

PDRB per kapita ADHB menunjukkan per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Gambar 2.3.
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2021-2025

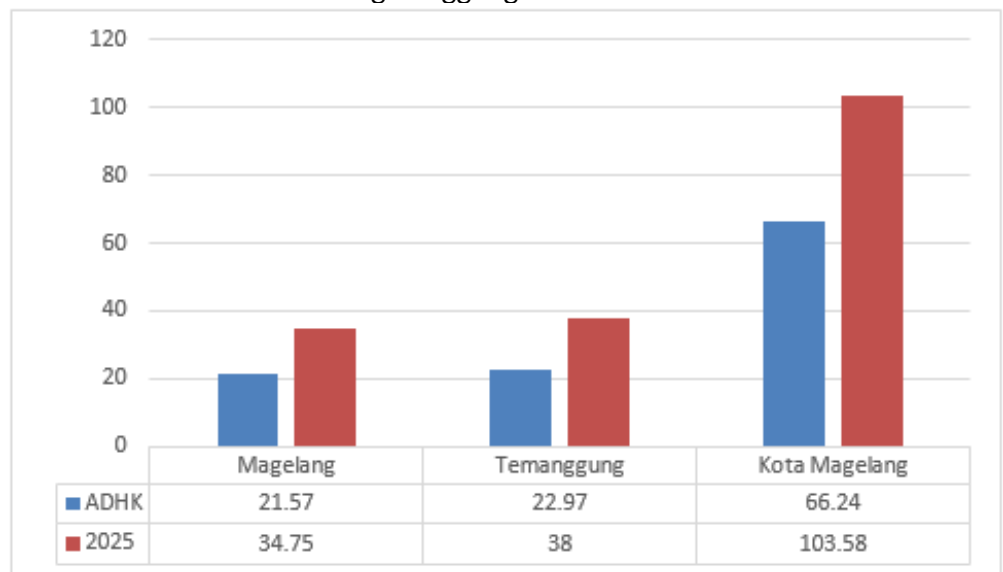


Sumber : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2026, BPS

Keterangan : *) data sementara

***) Data sangat sementara

Gambar 2.4.
PDRB Perkapita kabupaten/kota di Wilayah Pengembangan
Gelangmanggung Tahun 2026



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun. 2026

Tabel 2.17.
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2021 – 2025

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Magelang	9.440	10.011	10.493	10.926	11.186,98
Provinsi Jawa Tengah	11.034	11.377	11.835	12.276	12.746
Nasional	11.156	11.479	11.899	12.341	12.341*)

Sumber: BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Keterangan:*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2024) karena data belum keluar

Dilihat dari tabel diatas Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2021 hingga tahun 2025 .

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang
Tahun 2021-2025

Indikator Kemiskinan	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	353.608	377.497	411.129	431,289	454.591
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	154,910	145,33	144,490	143,80	132,21
Persentase Penduduk Miskin	(%)	11,91	11,09	10,96	10,83	9,90
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,35	0,41	0,41	0,23	0,17
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,63	1,66	1,73	1,23	1,04

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2026

Dari tabel di atas menunjukkan Persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2025 sebesar 9,90 persen, mengalami penurunan 0,93 persen poin dibanding tahun 2024. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 sebanyak 132.210 orang, turun 11.590 orang terhadap tahun 2024 yang tercatat sebanyak 143.800 orang. Garis kemiskinan pada tahun 2025 sebesar Rp 454.591,- per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp 23.302,- dibanding tahun 2024 sebesar Rp.431.289,

Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2025 ini sejalan dengan penurunan di level nasional dan provinsi. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Propinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kab Magelang Periode Maret 2025 9,90% masih berada di atas Provinsi (9,48%) dan Nasional (8,47%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Perbandingan tingkat kemiskinan daerah dengan capaian sebelumnya Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Magelang		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2021	12,44 – 11,52	11,91	11,25	9,71
2022	11,27 – 10,52	11,09	10,98	9,57
2023	10,67 – 9,92	10,96	10,77	9,36
2024	10,07 – 9,32	10,83	9,58	8,57
2025	9,67 – 9,93	9,90	9,48	8,47

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Realisasi tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang turun dari 11,91 persen pada tahun 2021 menjadi 9,90 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang berjalan positif dan searah dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pada beberapa tahun realisasi masih berada pada batas atas rentang target.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang masih relatif lebih tinggi, namun selisihnya semakin menyempit dari tahun ke tahun. Tren penurunan di Kabupaten Magelang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dan nasional, yang masing-masing juga mengalami perbaikan signifikan selama periode yang sama.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang, sekaligus menegaskan perlunya penguatan program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan agar laju penurunan kemiskinan dapat semakin dipercepat dan mendekati capaian provinsi maupun nasional.

Tabel 2.20.
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks
Karesidenan Kedu Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	P0	P1	P2	GK
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Magelang	6,930	5,68	0,53	0,09	662.129
2	Kab Magelang	132,21	9,90	1,04	0,17	454.591
3	Kab Temanggung	62,05	7,78	0,67	0,10	443.089
4	Kab Kebumen	162,54	13,58	1,95	0,40	502.841
5	Kab Purworejo	72,18	10,06	1,54	0,34	496.812
6	Kab Wonosobo	106,29	13,34	2,25	0,54	486.105

Sumber: BPS Kab Magelang, Berita Resmi Statistik Kemiskinan Tahun 2025

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat.

Tabel 2.21.
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2021-2025

Inflasi	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Magelang	2,18	6,49	2,61	1,51	2,61
Prov. Jateng	1,7	5,63	2,89	1,67	2,72
Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2026

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah sebesar Rp85,073,655,127.00 dengan realisasi Rp79,503,892,432.00 (93,45). Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
12. Program Pemasaran Pariwisata
13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
14. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
15. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
17. Program Pengembangan Ekspor
18. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
19. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
20. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
21. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
22. Program Pengembangan UMKM

23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
24. Program Promosi Penanaman Modal
25. Program Pelayanan Penanaman Modal
26. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
27. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
28. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
29. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
30. Program Penanganan Kerawanan Pangan
31. Program Pemberdayaan Sosial
32. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
33. Program Pengendalian Penduduk
34. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
35. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
36. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
37. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
38. Program Penempatan Tenaga Kerja
39. Program Hubungan Industrial
40. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
41. Program Penataan Desa
42. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
43. Program Administrasi Pemerintahan Desa
44. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
45. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47. Program Perekonomian Dan Pembangunan

- iii) Tujuan Strategis: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan, Berkeselamatan, dan Berkelanjutan

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan,
Berkeselamatan, dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,6	71,93	71,93	82,76	71,72	74,17	103,41	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

Formulasi cakupan pembangunan infrastruktur wilayah pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, salah satu komponen pembentuk cakupan pembangunan infrastruktur wilayah, yaitu cakupan hunian layak dan berkualitas dikeluarkan, sehingga perhitungan cakupan pembangunan infrastruktur wilayah diperoleh melalui komposit dari komponen cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dan cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Komponen cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, dan cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu :

1. Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 8 komponen pembentuk, yaitu cakupan penyelenggaraan jalan, cakupan pengelolaan sda, cakupan penataan bangunan gedung, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, cakupan layanan drainase lingkungan, cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan, dan cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

2. Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan

Sebelum tahun 2025, kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan penyelenggaraan perhubungan. Namun pada tahun 2025, kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan layanan perhubungan yang berkeselamatan, dibentuk oleh komponen/unsur persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan, persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, dan persentase pelayanan uji kendaraan berdasarkan jumlah KBWU.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan,



Berkeselamatan, dan Berkelanjutan sebesar Rp. 159,305,020,951.98 dengan realisasi Rp 147,656,211,778.00 (92,69%).

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Kawasan Permukiman
14. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
16. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
17. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
18. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
19. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
20. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
21. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

23. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 24. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 25. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 26. Program Pengelolaan Persampahan
 27. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 28. Program Penanganan Bencana
 29. Program Penanggulangan Bencana
- iv) Tujuan Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi

Pada tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	61,07	62,29	67,42	78,94	63,54	81,74	128,64	
capaian kinerja								128,64	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2026

Pada tabel di atas persentase kinerja pada Tujuan Strategis Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 sebesar 128,64% (Sangat Tinggi). Indeks reformasi birokrasi sejak tahun 2021 terus mengalami peningkatan, tetapi masih masuk kategori yang sama yaitu kategori B. Pada tahun 2025 Indeks Reformasi Birokrasi naik predikat A.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi sebesar Rp 2,156,145,984,884.68 dengan Realisasi Rp 2,043,933,811,608.00 (94,80%). Program yang mendukung pencapaian Tujuan strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
6. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
10. Program Pendaftaran Penduduk
11. Program Pencatatan Sipil
12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
13. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
18. Program Kepegawaian Daerah

19. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
20. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
21. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
22. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
23. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
24. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
25. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
26. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

2) Evaluasi Sasaran Strategis

i) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,79	7,81	7,82	7,83	7,86	8,04	102,29	
Harapan Lama Sekolah	tahun	12,55	12,58	12,61	12,62	12,65	12,83	101,42	
Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	92,67	92,35	92,03	91,63	93,02	91,45	98,31	
capaian kinerja								100,67	

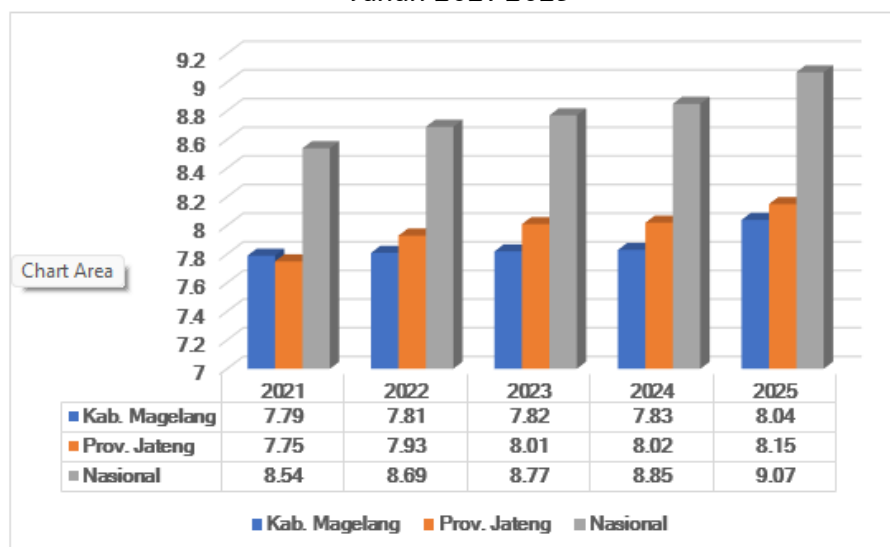
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat pada tahun 2025 sebesar 100,67% (Sangat Tinggi) dibandingkan target RPD tahun 2025.

Dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Akreditasi sekolah/madrasah merupakan kegiatan penilaian sekolah/madrasah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Terdapat indikator baru Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B.

Pada tahun 2025 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang mencapai 8,04 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,04 tahun atau menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada Jawa Tengah dan nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut:

Gambar 2.5.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2021-2025

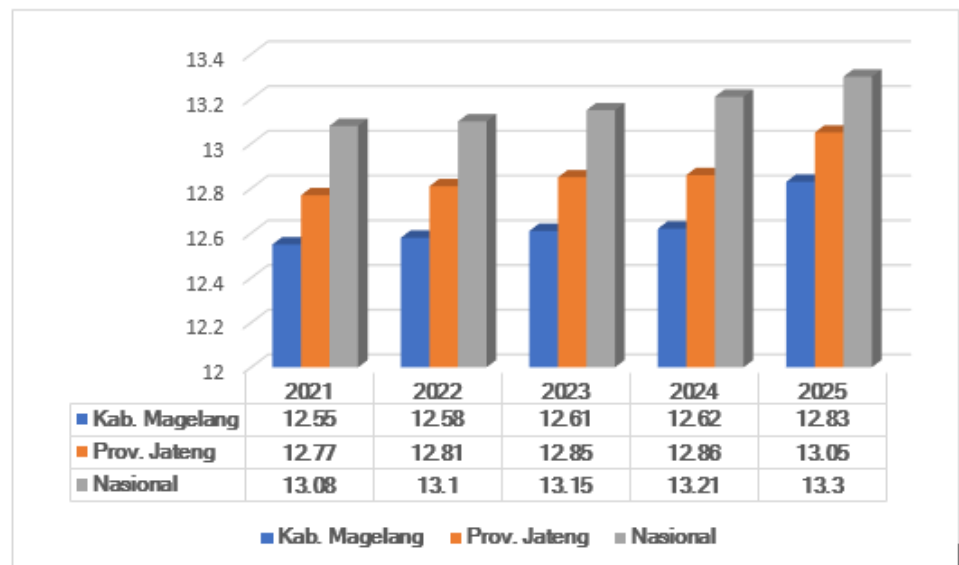


Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2026

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang pada tahun 2025 sebesar 12,83. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,83 tahun atau setara dengan

Diploma I. Sejak tahun 2021 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,55 (2021) menjadi 12,83 (2025). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2021-2025 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.

Gambar 2.6
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2026

3) Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.25.
Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	98,33	98,34	98,34	97,98	98,49
2.	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	87,02	86,36	85,71	85,29	84,40
3.	Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B	Persen	92,67	92,84	92,03	91,63	91,45

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2026

Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan mulai tahun 2021 ada perubahan dalam penilaian, dimana grade penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2021 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A dan adanya penambahan sekolah baru yang belum terakreditasi. Walaupun belum mencapai 100%, persentase sekolah yang berakrediasasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

Di luar sekolah formal terdapat PKBM. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal (Sekolah Kesetaraan), dan merupakan sebuah lembaga pendidikan bentukan masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat juga dilakukan akreditasi. Data PKBM Terakreditasi di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut

Tabel 2.26.
Persentase PKBM yang Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	5	6	7	8	8
1.	Jumlah PKBM terakreditasi minimal B		14	17	20	22	22
2.	Jumlah PKBM		22	22	22	22	23
3	Persentase PKBM berakreditasi minimal B	Persen	63,63	77,27	90,90	100	95,65

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2026

Persentase PKBM terakreditasi di Kabupaten Magelang pada tahun 2021-2024 mengalami Peningkatan, hal ini dikarenakan meningkatnya kualitas pendidikan di lembaga PKBM. Mulai tahun 2021 ada perubahan dalam penilaian, dimana grade penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2021 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A dan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan PKBM di Kabupaten Magelang sudah cukup baik. Sedangkan tahun 2025 ada penurunan dikarenakan ada penambahan Lembaga baru yang berdiri yaitu PKBM Yamas yang beralamat di Kecamatan Tegalrejo.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat sebesar Rp 200,901,923,890.39 dengan realisasi sebesar Rp 195,067,517,036.00 (97,1%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
3. Program Pembinaan Perpustakaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
6. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

ii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025

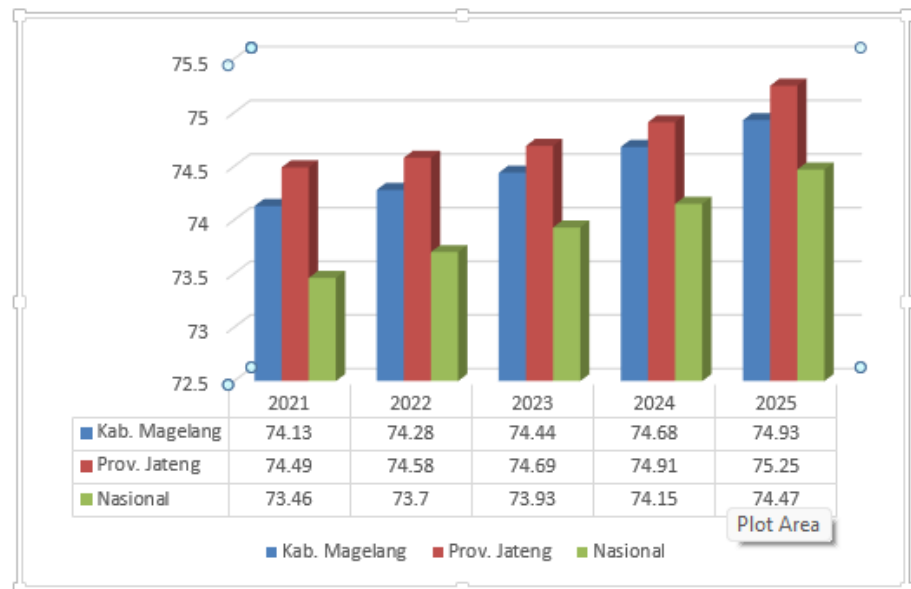
Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Angka Harapan Hidup	tahun	73,88	74,03	74,44	74,68	74,50	74,93	100,58	
capaian kinerja								100,58	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas persentase kinerja pada Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga pada Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 100,58 (sangat tinggi).

Pada tahun 2025 AHH Kabupaten Magelang mencapai 74,93 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2024 yang sebesar 74,44. Kenaikan AHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan AHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Nasional namun masih di bawah pertumbuhan AHH Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Gambar 2.7.
Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2026

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga Rp 195,547,765,130.00 dengan realisasi sebesar Rp 182,554,001,383.00 (93,36%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

iii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Keberdayaan Gender

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	69,64	69,66	70,52	66,97	70,55	66,97*)	88,70	
Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya*)	100	
capaian kinerja								94,35	

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender pada tahun 2025 sebesar 94,35% (Sangat Tinggi).

Upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan data tahun 2020-2024, angka IDG di Kabupaten Magelang mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perbandingan capaian IDG Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.

Tabel 2.29.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Magelang	69,64	69,66	70,52	66,97	NA
Provinsi Jawa Tengah	71,64	73,78	74,18	72,58	NA
Nasional	76,26	76,59	76,90	77,62	NA

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2026



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Magelang pada periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan melemah di akhir periode. IDG Kabupaten Magelang meningkat tipis dari 69,64 pada tahun 2021 menjadi 70,52 pada tahun 2023, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 66,97. Hal ini mengindikasikan bahwa peran serta perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih menghadapi tantangan, terutama pada tahun terakhir pengamatan. Data tahun 2025 belum tersedia.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan capaian nasional, IDG Kabupaten Magelang berada pada posisi lebih rendah. Provinsi Jawa Tengah dan nasional menunjukkan capaian IDG yang lebih tinggi serta relatif stabil meskipun terjadi fluktuasi. Kondisi ini menandakan perlunya penguatan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Magelang agar kesenjangan gender dalam aspek pemberdayaan dapat ditekan dan selaras dengan capaian provinsi maupun nasional.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender sebesar Rp 883,147,009.00 dengan realisasi sebesar Rp 674,902,268.00 (76,42). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender terdiri dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Program Perlindungan Perempuan
 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 4. Program Perlindungan Khusus Anak
- iv) Sasaran Strategis: Meningkatnya Literasi Masyarakat

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Literasi Masyarakat Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Tahun Sebelumnya		Tahun 2025			Akhir RPD (2026)
		2023	2024	Target	Capaian	%	% Target
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	indeks	88,031	88,19	89,30	12,31	-	90,28
Rata-rata Capaian Kinerja						-	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2026

IPLM menjadi indikator bidang perpustakaan pada perencanaan di RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, namun pada tahun 2022, Kabupaten Magelang menjadi sampling perhitungan IPLM dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan capaian 94,76. Pada tahun 2023 dilakukan kegiatan pengukuran IPLM melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan diperoleh capaian sebesar 88,031 dengan kategori tinggi. Pada tahun 2024, capaian IPLM Kabupaten Magelang adalah 88,19 dengan kategori tinggi. Pada tahun 2025 IPLM diukur menggunakan instrument dan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga untuk capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan target yang dibuat.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat sebesar Rp 1,378,773,726.90 dengan realisasi sebesar Rp 1,300,950,530.00 (94,36).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat Tahun 2025 terdiri dari:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pengelolaan Arsip

v) Sasaran strategis: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut tabel berikut:

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	7.086,93	7.486,55	7.913,20	8.341,93	8.704,64	8.859,47	101,78	
Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.794,55	8.628,27	9.633,01	10.697,97	10.032,12	11.572,25	115,35	
Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.366,00	1.675,34	1.675,34	1.675,34	1.947,92	2.156,45	110,71	
Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.667,15	4.967,87	5.381,88	5.637,40	5.776,16	5.942,53	102,88	
Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	7.086,93	7.486,55	7.913,20	8.341,93	8.704,64	8.859,47	101,78	
capaian kinerja								106,50	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah pada tahun 2025 pada RPD sebesar 106,50 (sangat tinggi). Jika dilihat capaian selalu meningkat, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan adaya beli masyarakat.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah sebesar Rp 37,451,214,344.00 dengan realisasi sebesar Rp 34,305,578,556 (91,60).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
6. Program Perizinan Usaha Pertanian
7. Program Penyuluhan Pertanian
8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
12. Program Pemasaran Pariwisata
13. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
14. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
15. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
17. Program Pengembangan Ekspor
18. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
19. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
20. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
21. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
22. Program Pengembangan Umkm
23. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
24. Program Promosi Penanaman Modal
25. Program Pelayanan Penanaman Modal
26. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
27. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

vi) Sasaran strategis: Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,92	79,44	79,91	80,2	80,68	73,41	90,99	
capaian kinerja								90,99	

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Magelang, 2026



Berdasarkan tabel di atas persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan pada tahun 2025 RPD sebesar 90,99% (Sangat Tinggi). Selama empat tahun pertama (2021 – 2024), Kabupaten Magelang menunjukkan performa ketahanan pangan yang sangat solid dan konsisten. Konsistensi: Angka indeks berhasil dipertahankan di kisaran 79 hingga 80. Ini menunjukkan bahwa pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan berjalan dengan baik. Pencapaian Tertinggi diperoleh pada tahun 2024 yang menjadi titik performa terbaik di mana indeks melampaui angka 80, yang mengindikasikan kondisi ketahanan pangan yang sangat tahan (*highly resilient*).

Terdapat anomali yang cukup mencolok pada data tahun 2025 dimana terjadinya Penurunan Drastis sekitar 6,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Angka 73,40 adalah titik terendah dalam lima tahun terakhir. Implikasi Penurunan ini cukup signifikan secara statistik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti anomali cuaca yang ekstrem, gangguan pada rantai pasok distribusi, atau perubahan indikator penilaian dalam indeks tersebut.

Secara keseluruhan, Kabupaten Magelang memiliki rekam jejak yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan hingga tahun 2024. Namun, data tahun 2025 memberikan sinyal "lampu kuning" yang memerlukan evaluasi mendalam pada sub-indikator penyusunnya (misalnya: aspek aksesibilitas pangan atau kerentanan terhadap kerawanan pangan).

Ketidakcukupan konsumsi pangan terjadi ketika seseorang secara rutin mengonsumsi jumlah makanan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan agar tetap hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merujuk pada persentase penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi makanan dengan kandungan energi yang lebih rendah dari standar kecukupan untuk hidup sehat dan produktif. Ini juga menggambarkan probabilitas seorang individu yang terpilih secara acak dari populasi untuk mengonsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan energi hariannya.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah sebesar Rp 1.715.492.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.678.413.655 (97,84).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

vii) Sasaran strategis: Meningkatnya Fungsi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Memadai dan Wajar, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Fungsi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Memadai dan Wajar Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase penurunan PMKS	persen	0,62	0,57	0,57	1,15	0,58	1,15*)	198,28	
capaian kinerja								198,28	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja RPD tahun 2025 sebesar 198,28 % (Sangat Tinggi). Pada tahun 2025 data belum dapat disajikan, sehingga menggunakan data tahun 2024. Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan angka yang menggambarkan penurunan jumlah orang yang tergolong PMKS dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah PMKS pada periode sebelumnya. PMKS merupakan individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial, dan memerlukan bantuan dari pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Penurunan persentase PMKS membutuhkan upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan penanganan pada PMKS agar dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator persentase penurunan PMKS dapat diketahui melalui pengurangan antara jumlah PMKS pada periode awal dengan jumlah PMKS pada periode akhir, kemudian dibagi dengan jumlah PMKS pada periode awal dan dinyatakan dalam persen.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Fungsi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Memadai dan Wajar Rp 28.789.247.520,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.309.846.044,00 (98,33%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Fungsi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Memadai dan Wajar terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

viii) Sasaran strategis: Meningkatkan Keterserapan Tenaga Kerja

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Keterserapan Tenaga Kerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **)	persen	5,03	4,97	4,42	3,55	4,75-4,25	3,52	117,18	
capaian kinerja								117,18	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan BPS Kabupaten Magelang 2026

**): Indikator Negatif

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Keterserapan Tenaga Kerja pada tahun 2025 RPD sebesar 117,18% (sangat tinggi). Dari 2021 sampai dengan 2025 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Magelang relatif cenderung turun. Tahun 2024 TPT sebesar 3,55 menjadi 3,52 pada tahun 2025. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Tabel 2.35.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengangguran	Orang	38,98	40,89	36,84	29,24	29,45



No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	terbuka						
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	774,59	822,09	833,17	823,41	835,59
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	5,03	4,97	4,42	3,55	3,52
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jateng	%	5,95	5,57	5,13	4,78	4,66
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	6,49	5,86	5,32	4,9	4,85

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2026, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2025, Statistik Indonesia 2026, BPS

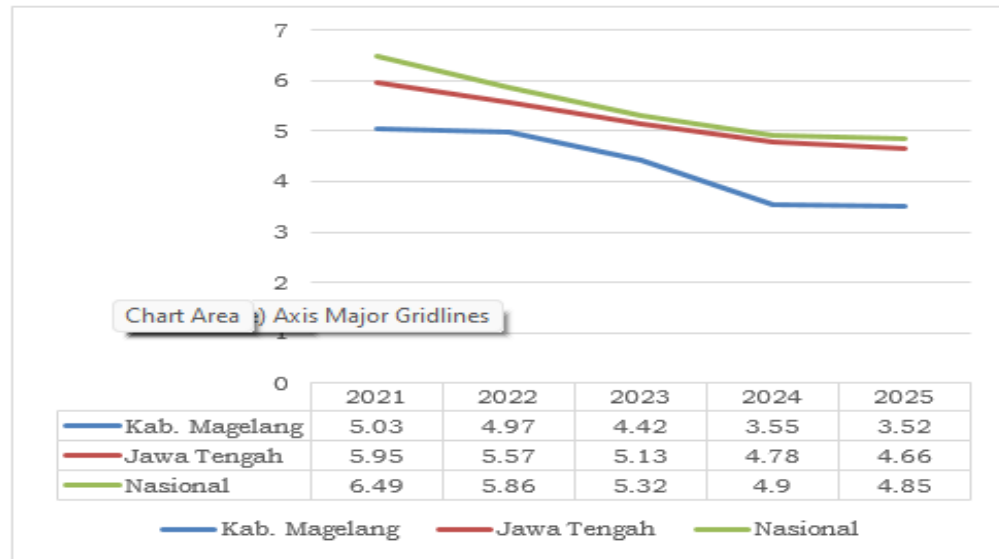
Tabel 2.36.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2021-2025

Tahun	Kabupaten Magelang		Rata-rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2021	5,03	0,76	5,46	-0,11
2022	4,97	-0,06	4,74	-0,72
2023	4,42	-0,55	4,00	-0,74
2024	3,55	-0,87	3,43	-0,57
2025	3,52	-0,03	3,37	-0,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Magelang masih di bawah rata-rata wilayah setara Gelangmanggung. Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Magelang menempati posisi kedua jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,03 pada tahun 2025. Selain dibandingkan dengan rata-rata capaian wilayah setara, perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah juga disandingkan dengan capaian nasional, sebagai berikut:

Tabel 2.37.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Magelang (2026)

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja sebesar Rp 2.693.490.848,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.485.843.572,00 (92,29%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

ix) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	0,635	0,71	0,70	0,735	0,725	0,724	99,86	
capaian kinerja								99,86	

Sumber :BPS Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa pada RPD tahun 2025 sebesar 99,86% (Sangat Tinggi). Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai pada tahun 2021 sebesar 0,0635 dan tahun 2022 meningkat sebesar 0,075, tahun 2023 mengalami penurunan 0,01 dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 0,035 dan tahun 2025 mengalami penurunan 0,001.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa sebesar Rp 14.424.210.415,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.724.210.415,00 (88,21%)

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa terdiri dari:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7. Program Perekonomian Dan Pembangunan



x) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	63,72	73,38	82,78	96,11	57,35	57,09	99,55	
capaian kinerja								99,55	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang pada tahun 2025 RPD sebesar 99,55% (sangat tinggi). Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cakupan pembangunan infrastruktur mengalami peningkatan cukup signifikan, namun tahun 2025 mengalami penurunan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang sebesar Rp 121.505.684.670,27 dengan realisasi Rp 112.774.477.669,00 (92,81%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- xi) Sasaran strategis: Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak

Capaian kinerja sasaran strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2022	2023	2024	2024	target	capaian	%	
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10
Cakupan hunian layak dan berkualitas		94,82	95,05	95,05	95,05	91,99	91,50	99,47	
capaian kinerja								99,47	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak RPD tahun 2025 sebesar 99,47.% (Sangat Tinggi).

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak Rp 1.110.351.356.70,00 dengan realisasi Rp 10.816.890.109,00 (97,36%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak terdiri dari:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- xii) Sasaran strategis: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (1-100)	71,41	70,48	65,80	69,40	65,81	73,91	112,31	
capaian kinerja								112,31	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 – 2026 dan DLH Kabupaten Magelang 2026

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 RPD sebesar 112,31% (Sangat Tinggi). Dari tahun 2021 mengalami penurunan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dan meningkat pada tahun 2025.

Perhitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Adapun perhitungan nilai IKLH pada tahun 2025 yaitu : $IKLHi = (0,376 \times IKAi) + (0,405 \times IKUi) + (0,219 \times IKLi)$. Adapun kategori nilai IKLH adalah sebagai berikut :

Tabel 2.42.
Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2025

Nilai	Kriteria
$85 < x \leq 100$	Baik
$60 < x \leq 85$	Sedang
$0 \leq x \leq 60$	Buruk

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025

Nilai IKLH tahun 2025 naik dari tahun 2024 dari semula 69,40 menjadi 73,91 dengan kategori Sedang. Nilai IKLH tersebut sudah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan terdata pada aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 2025, indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dan telah mencapai target yang

telah ditetapkan. Namun untuk indeks kualitas udara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun hal tersebut dikarenakan adanya penambahan parameter yang digunakan untuk perhitungan IKU yaitu parameter PM 2,5. Adapun nilai parameter PM 2,5 didapatkan melalui citra satelit dengan nilai di atas baku mutu yang dipersyaratkan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp23.680.537.445,01 dengan realisasi Rp 21.165.873.870,00 (89,38%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

xiii) Sasaran Strategis: Berkurangnya Risiko Bencana

Capaian kinerja sasaran strategis Berkurangnya Risiko Bencana, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Risiko Bencana Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2025			Ket
		2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Indeks resiko bencana		77,9 (sedang)	86,49 (sedang)	97,42	77,00 (sedang)	97,42*)	126,52	
Capaian kinerja							126,52	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan BPBD Provinsi Jawa Tengah 2026

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Berkurangnya Risiko Bencana pada tahun 2025 RPD sebesar 126,52% (Sangat Tinggi). Capaian dari tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan telah optimalnya pelaksanaan manajemen risiko bencana. Hal ini menunjukkan beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah berhasil.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Berkurangnya Risiko Bencana sebesar Rp3.008.447.480,00 dengan realisasi Rp2.898.970.130,00 (96,36%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Berkurangnya Risiko Bencana terdiri dari:

1. Program Penanganan Bencana
2. Program Penanggulangan Bencana

xiv) Sasaran Strategis: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Akuntabel, dan Transparan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Akuntabel, dan Transparan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif,
Akuntabel, dan Transparan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai AKIP	Angka (1-100)	61,13	62,25	63,04	63,57	64,31	64,05	99,60	



Indeks SPBE		2,67	3,13	3,13	3,92	3,61	4,02	111,36	
Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,22	84,36	84,78	86,99	84,92	87,71	103,29	
Indeks Sistem Merit		0,64	0,64	0,71	0,71	0,78	0,71*)	91,03	
Rata-rata capaian kinerja								101,06	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Akuntabel, dan Transparan pada tahun 2025 RPD sebesar 101.06% (Sangat Tinggi).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Capaian Nilai AKIP dari tahun 2021 selalu meningkat namun capaian 2025 masih dibawah target RPD tahun 2025.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan mendasarkan pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian terjadi perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Capain Indeks SPBE dari tahun 2021 meningkat cukup signifikan,

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi



pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kabupaten Magelang sejak tahun 2020 hingga 2025 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian, menghasilkan SDM ASN yang netral, sistematis, berintegritas, dan kompeten. Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan pada delapan aspek manajemen ASN yang meliputi 1) perencanaan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) pengembangan karir, 4) promosi dan sistem, 5) manajemen kinerja, 6) penggajian, penghargaan dan disiplin, 7) perlindungan dan pelayanan, serta 8) sistem informasi. Capaian nilai merit didasarkan pada capaian kinerja tahun 2023 dikarenakan Tahun 2024 sudah tidak dilakukan penilaian kinerja sistem merit.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp 2.134.668.079.125,22 dengan realisasi Rp 2.023.341.602.391,00 (94,78%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan public terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
6. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
10. Program Pendaftaran Penduduk
11. Program Pencatatan Sipil
12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
13. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
15. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
18. Program Kepegawaian Daerah

xv) Sasaran strategis: Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kondusivitas Wilayah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2025			Ket
		2021	2022	2023	2024	target	capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cakupan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	persen	NA	82,50	NA	NA	87,57	99	113,05	
capaian kinerja								113,05	

Sumber: RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan Satpol PP dan PK

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Kondusivitas Wilayah pada tahun 2025 RPD tahun 2025 sebesar 113,05% (Sangat Tinggi).

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kondusivitas Wilayah sebesar Rp. 21.477.905.759,46,00 dengan realisasi Rp 20.592.209.217,00 (95,88%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kondusivitas Wilayah terdiri dari:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
9. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

a. Analisis Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efisiensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efisiensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efisiensi.

Secara keseluruhan tingkat efisiensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 155.442.190.033,00 (0,51%). Tahun 2025



terdapat anggaran sebesar Rp. 2.823.040.645.499,00 dengan realisasi Rp. 2.667.598.455.466,00 (99,49%). Efisiensi ini belum menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran belum tentu adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran tetapi dimungkinkan kegiatan yang direncana tidak terlaksana dan rendahnya serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.46.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.57 - 72.07	73.09	101.42						
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.02	92.21*)	99.13						
	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Rata-rata Lama Sekolah	7.86	8.04	102.29	Program Pengelolaan Pendidikan	164,183,563,818.80	162,035,228,647.00	98.69	1.31
			2	Harapan Lama Sekolah	12.65	12.83	101.42	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3,776,393,760.00	3,306,592,324.00	87.56	12.44
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,385,042,637.61	10,125,693,704.00	97.50	2.50
								Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	312,000,000.00	311,996,356.00	100.00	0.00
								Program Pengembangan Kebudayaan	397,814,797.06	375,599,040.00	94.42	5.58
			3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	93.02	91.45	98.31	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	21,847,108,876.92	18,912,406,965.00	86.57	TE
	2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Pembangunan Keluarga	4	Angka Harapan Hidup	74.5	74.93	100.58	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	193,635,540,742.00	180,727,840,498.00	93.33	6.67



								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,007,313,683.00	1,001,008,056.00	99.37	0.63
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	504,447,669.00	441,149,829.00	87.45	12.55
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	400,463,036.00	384,003,000.00	95.89	4.11
3	Meningkatnya Keberdayaan Gender	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,55	70.55*)	100.00	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	150,272,550.00	138,238,745.00	91.99	8.01	
							Program Perlindungan Perempuan	247,851,376.00	151,583,742.00	61.16	38.84	
		6	Predikat Kabupaten Layak Anak	Nindya	Nindya	100.00	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	212,221,460.00	192,697,219.00	90.80	9.20	
							Program Perlindungan Khusus Anak	272,801,623.00	192,382,562.00	70.52	29.48	
4	Meningkatnya Literasi Masyarakat	7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	89.3	12.31	-	Program Pembinaan Perpustakaan	1,216,541,845.90	1,139,473,465.00	93.66	6.34	
							Program Pengelolaan Arsip	162,231,881.00	161,477,065.00	99.53	0.47	
2	Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah	3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.32 - 5.36	5.89	136.34						
		4	PDRB Per Kapita	32.72	34.75	106.20						
		5	Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan	11,186.98	11,343.00	101.39						
		6	Angka Kemiskinan	10,55 _ 10,05	9,90	106.16						
		7	Inflasi	<5	2,61	100.00						
5	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah	8	Nilai PDRB Sektor Pertanian,	8.704,64	8.859,47	101.78	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	992,859,000.00	856,159,642	86.23	13.77	



						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	132,208,000.00	131,922,220.00	99.78	0.22
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	495,753,200.00	475,508,904.00	95.92	4.08
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,508,768,709.00	5,169,116,202.00	79.42	20.58
						Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10,384,618,179.00	9,611,699,141.00	92.56	7.44
						Program Perizinan Usaha Pertanian	40,128,000.00	39,984,615.00	99.64	0.36
						Program Penyuluhan Pertanian	1,417,015,246.00	1,376,418,404.00	97.14	2.86
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	425,374,056.00	367,608,940.00	86.42	13.58
	9	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	10.032,12	11.572,25	115.35	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	714,972,800.00	676,034,721.00	94.55	5.45
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	26,304,805.00	23,978,400.00	91.16	8.84
	10	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	1.947,92	2.156,45	110.71	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4,555,115,314.00	4,119,632,071.00	90.44	9.56
						Program Pemasaran Pariwisata	685,849,128.00	685,331,491.00	99.92	0.08
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	177,370,274.00	176,986,345.00	99.78	0.22



			11	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	5.776,16	5.942,53	102.88	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	22,392,556.00	20,426,195.00	91.22	8.78
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5,635,092,182.00	5,422,031,055.00	96.22	3.78
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3,236,459,150.00	3,218,764,434	99.45	0.55
								Program Pengembangan Ekspor	98,042,938.00	97,888,998	99.84	0.16
								Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	142,276,749.00	142,101,832	99.88	0.12
								Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	17,349,099.00	17,262,982	99.50	0.50
								Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	104,158,444.00	101,048,316	97.01	2.99
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	835,143,759.00	779,294,802	93.31	6.69
								Program Pengembangan Umkm	7,972,500.00	7,356,232	92.27	7.73
			12	Pertumbuhan Investasi	10	18.48	184.8	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100,045,480.00	99,473,141	99.43	0.57
								Program Promosi Penanaman Modal	77,348,010.00	76,634,330	99.08	0.92
								Program Pelayanan Penanaman Modal	372,530,026.00	371,505,999	99.73	0.27



								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	207,808,630.00	203,626,244.00	97.99	2.01
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	38,258,110.00	37,782,900	98.76	1.24
6	Meningkatnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Pemanfaatan Pangan		13	Indeks Ketahanan Pangan	80.68	73.41	90.99	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	8,222,000.00	7,713,788	93.82	TE
								Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,684,715,000.00	1,648,903,007	97.87	TE
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	22,555,000.00	21,796,860	96.64	TE
7	Meningkatnya Fungsi Kesejahteraan Sosial Masyarakat secara Memadai dan Wajar		14	Persentase Penurunan PMKS	0,58	1.15*)	198,28	Program Pemberdayaan Sosial	430,112,623.00	397,665,688	92.46	7.54
								Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8,899,443,668.00	8,658,504,922	97.29	2.71
								Program Pengendalian Penduduk	655,523,158.00	651,346,110	99.36	0.64
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	11,365,611,687.00	11,187,418,750	98.43	1.57
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	6,870,404,900.00	6,848,571,632	99.68	0.32
								Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	568,151,484.00	566,338,942	99.68	0.32



8	Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.75-4.25	3.52	117.1765	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,589,126,192.00	1,503,429,830	94.61	5.39
							Program Penempatan Tenaga Kerja	862,381,333.00	778,270,416	90.25	9.75
							Program Hubungan Industrial	184,444,323.00	162,409,615	88.05	11.95
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	57,539,000.00	41,733,711	72.53	27.47
9	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	16	Indeks Desa Membangun	0.725	0.724	99.86	Program Penataan Desa	254,163,904.00	232,301,860	91.40	TE
							Program Peningkatan Kerja Sama Desa	223,900,935.00	219,313,858	97.95	TE
							Program Administrasi Pemerintahan Desa	6,036,260,330.00	5,844,075,555	96.82	TE
							Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	7,256,951,189.00	5,795,011,135	79.85	TE
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	161,857,184.00	161,852,184	100.00	TE
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,734,000.00	19,733,945	100.00	TE
							Program Perekonomian Dan Pembangunan	471,342,873.00	451,922,068	95.88	TE



3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Berkeadilan, Berkeselamatan, dan Berkelanjutan		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan		71.72	74.17	103.42					
	10	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang		17	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	57.35	57.09	99.55	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	13,623,709,845.44	9,000,338,203.00	66.06	TE
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,045,936,226.00	2,037,530,864.00	99.59	TE			
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5,738,870,157.00	5,609,548,120.00	97.75	TE			
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7,053,054,466.07	7,050,685,080.00	99.97	TE			
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	371,859,450.00	369,796,135.00	99.45	TE			
						Program Penataan Bangunan Gedung	19,175,783,037.88	18,697,618,965.00	97.51	TE			
						Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	191,577,949.00	191,561,168.00	99.99	TE			
						Program Penyelenggaraan Jalan	42,406,189,464.88	40,124,514,397.00	94.62	TE			
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	288,206,500.00	280,951,989.00	97.48	TE			
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	747,022,749.00	643,617,959.00	86.16	TE			



								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	29,863,474,825.00	28,768,314,789.00	96.33	TE
11	Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Layak		18	Cakupan Hunian Layak dan Berkualitas	91.99	91.5	99.47	Program Pengembangan Perumahan	578,982,041.70	531,643,216.00	91.82	TE
								Program Kawasan Permukiman	54,322,692.00	51,083,041.00	94.04	TE
								Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	10,293,834,203.00	10,205,780,512.00	99.14	TE
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	179,462,420.00	25,783,340	14.37	TE
								Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3,750,000	2,600,000	69.33	TE
12	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.81	73.91	112.31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	263,945,000.00	262,229,383	99.35	0.65
								Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,277,056,213.00	1,188,190,432	93.04	6.96
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3,209,220,000.00	3,055,834,031	95.22	4.78



								Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	38,201,487.00	34,459,130	90.20	9.80
	13	Berkurangnya Risiko Bencana	20	Indeks Risiko Bencana	77.00 (sedang)	97.42*)	126,52	Program Penanganan Bencana	471,457,189.00	469,019,611.00	99.48	0.52
								Program Penanggulangan Bencana	2,536,990,291.00	2,429,950,519.00	95.78	4.22
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi		9	Indeks Reformasi Birokrasi	63.54	81.74	128.64					
	14	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Akuntabel, dan Transparan	21	Nilai AKIP	64.31	64.05	99.60	Program Penyelenggaraan Pengawasan	415,137,396.00	375,825,684.00	90.53	TE
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1,660,885,716.83	1,619,169,410.00	97.49	TE
								Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	978,027,219.28	940,400,317.00	96.15	TE
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,617,608,837.17	1,506,225,086.00	93.11	TE
								Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2,171,079,351.77	1,974,215,681.00	90.93	TE



		22	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.61	4.02	111.36	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1,350,280,193.38	1,233,691,786.00	91.37	8.63
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,458,765,414.00	6,214,877,829.00	96.22	3.78
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	242,959,074.00	239,065,423.00	98.40	1.60
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	896,657,556.64	891,139,083.00	99.38	0.62
							Program Pendaftaran Penduduk	833,835,465.00	833,687,402.00	99.98	0.02
							Program Pencatatan Sipil	742,975,946.64	739,573,272.00	99.54	0.46
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	145,706,202.00	145,480,740.00	99.85	0.15
		23	Opini BPK	WTP	WTP	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	673,281,610,125.48	625,665,986,252.00	92.93	7.07
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,990,261,443.16	1,716,873,264.00	86.26	13.74
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10,771,219,555.46	9,794,952,406.00	90.94	9.06
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,424,607,864,543.00	1,363,718,893,228	95.73	4.27
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.92	87.71	103.29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	421,136,334.47	322,651,234	76.61	23.39



			25	Indeks Sistem Merit	0.78	0.71*)	91.03	Program Kepegawaian Daerah	6,082,068,750.94	5,408,894,294.00	88.93	TE
15	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah		26	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	87,57	89.00	103.29	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4,934,919,447.00	4,295,296,434.00	87.04	12.96
								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7,982,428,550.00	7,821,197,119	97.98	2.02
								Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	919,492,258.96	916,519,568	99.68	0.32
								Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3,484,252,131.79	3,458,863,060	99.27	0.73
								Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	149,244,668.00	148,786,000	99.69	0.31
								Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	200,859,129.90	200,420,284.00	99.78	0.22



						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1,608,647,516.00	1,580,316,500.00	98.24	1.76
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2,198,062,057.81	2,170,810,252	98.76	1.24
Jumlah							2,799,236,270,719.95	2,650,691,287,035.00	94.69	5.31

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia							
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,95					
	1 Meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah	95,26	Program Pengelolaan Pendidikan	188.520.647.035	184.073.442.004	97,64	TE
		2 Harapan Lama Sekolah	99,68	Program Pembinaan Perpustakaan	600.546.706	593.504.580	98,83	TE
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	559.050.000	507.761.654	90,83	TE
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.870.985.164	14.418.757.867	96,96	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	100,00	TE		
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	95,89	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	23.881.312.024	21.926.744.215	91,82	TE	
		2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	100,62	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	208.971.068.968	199.478.182.691	95,46
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.726.135.229	1.662.013.010	96,29	3,71	
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	375.494.000	346.728.036	92,34	7,66	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.197.474.854	2.133.463.651	97,09	2,91	
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat	2	Inflasi	37,75						
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	110,55						
		4	Angka Kemiskinan	97,38						
		3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	198,28	Program Pemberdayaan Sosial	419.849.537	411.544.919	98,02
					Program Rehabilitasi Sosial	1.922.518.411	1.775.013.663	92,33	7,67	
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.983.546.599	8.867.635.286	98,71	1,29	



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	97,07	Program Penanganan Bencana	574.458.000	561.015.770	97,66	2,34
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	1.036.394.065	1.017.985.683	98,22	TE
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.385.000	43.184.405	97,30	TE
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	119.550.000	117.276.190	98,10	TE
	6	Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka	7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	52,67	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.652.035.024	1.515.057.434	91,71	TE
						Program Penempatan Tenaga Kerja	1.978.473.821	1.450.646.516	73,32	TE
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.521.000	34.061.895	98,67	TE
						Program Hubungan Industrial	298.450.000	286.342.944	95,94	TE
	3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender		5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,16				
		7	Meningkatnya keberdayaan gender	8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	130,74	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	268.905.210	265.039.882	98,56
Program Perlindungan Perempuan							259.415.000	239.284.379	92,24	7,76



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				Program Pengendalian Penduduk	612.322.118	610.104.357	99,64	0,36		
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.574.108.200	11.134.443.088	96,20	3,80		
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.906.876.981	6.904.889.211	99,97	0,03		
		9	Kategori Kabupaten Layak Anak	100,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	295.481.802	295.238.351	99,92	0,08	
					Program Perlindungan Khusus Anak	261.815.000	260.269.982	99,41	0,59	
B	MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup									
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	144,57						
		7	PDRB Per Kapita	103,56						
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	100,66						
	8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	10	Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup (IKLH)	97,23	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	46.948.717	41.369.104	88,12	TE
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	49.560.000	49.162.668	99,20	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	551.389.920	549.132.313	99,59	TE
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.687.861.000	2.614.103.771	97,26	TE
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	274.545.000	254.923.588	92,85	TE
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	68.970.000	68.682.864	99,58	TE
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	167.307.121	166.258.536	99,37	TE
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	70.528.500	69.175.510	98,08	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	51.740.000	51.609.818	99,75	TE	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.125.000	24.961.245	99,35	TE	
				Program Pengelolaan Persampahan	14.198.530.500	13.116.725.461	92,38	TE	
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	103,29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.562.995.599	6.368.764.703	97,04	2,96
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.285.747.503	17.256.938.498	99,83	0,17
					Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.154.097.897	1.626.703.760	75,52	24,48
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18.585.428.148	10.300.699.677	55,42	44,58
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	30.000.000	30.000.000	100,00	0,00
					Program Penataan Bangunan Gedung	16.814.306.272	16.575.416.460	98,58	1,42
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	629.720.502	623.341.560	98,99	1,01



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Penyelenggaraan Jalan	98.888.430.970	94.858.518.677	95,92	4,08	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	385.356.500	378.818.693	98,30	1,70	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	227.735.909	187.629.229	82,39	17,61	
				Program Pengembangan Perumahan	340.301.745	189.779.900	55,77	44,23	
				Program Kawasan Permukiman	27.600.000	23.828.166	86,33	13,67	
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.809.880.000	4.311.665.302	89,64	10,36	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	213.395.134	89.886.195	42,12	57,88	
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.075.000	4.131.880	18,72	81,28	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28.429.750.913	28.334.267.778	99,66	0,34	
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	12	Nilai PDRB sektor perdagangan	90,53	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.263.559.498	4.856.321.270	92,26	TE
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.098.250.903	1.086.529.960	98,93	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Pengembangan Ekspor	437.845.000	432.835.968	98,86	TE	
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.154.132	135.034.643	99,91	TE	
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	56.255.000	55.391.777	98,47	TE	
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	317.155.500	308.558.225	97,29	TE	
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	846.477.500	834.475.371	98,58	TE	
		13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	93,99	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.855.276.440	4.706.237.917	96,93	TE
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.192.798.808	10.465.063.849	93,50	TE
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.278.428.801	1.183.433.397	92,57	TE
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	427.517.748	420.830.360	98,44	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Perizinan Usaha Pertanian	37.389.765	37.261.291	99,66	TE
				Program Penyuluhan Pertanian	1.421.960.688	1.238.818.419	87,12	TE
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	805.583.780	758.586.051	94,17	TE
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	34.737.740	34.589.787	99,57	TE
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	420.709.314	420.045.437	99,84	TE
		14	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	885.800.000	829.195.139	93,61	6,39
		15	Nilai PDRB sektor pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.799.504.695	8.630.099.523	98,07	TE
				Program Pemasaran Pariwisata	430.833.227	430.565.174	99,94	TE
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.285.570.129	1.199.141.228	93,28	TE
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	8.000.000	7.896.790	98,71	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Pengembangan Kebudayaan	344.775.000	344.774.884	100,00	TE	
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.759.075.528	2.366.700.864	85,78	TE	
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	479.050.000	438.452.815	91,53	TE	
		16	Pertumbuhan Investasi	108,80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.125.000	37.631.500	98,71	1,29
					Program Promosi Penanaman Modal	23.409.510	18.860.160	80,57	19,43
					Program Pelayanan Penanaman Modal	361.265.623	358.342.922	99,19	0,81
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	715.675.620	633.314.640	88,49	11,51
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.516.000	25.097.465	98,36	1,64
		17	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	113,40	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	592.516.189	584.688.168	98,68	1,32
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.207.282.500	1.117.900.630	92,60	7,40



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.837.743.108	50.827.330.960	99,98	0,02
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	204.651.000	193.880.740	94,74	5,26
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	175.363.000	170.767.400	97,38	2,62
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	929.722.210	907.411.237	97,60	2,40
				Program Penanggulangan Bencana	2.056.343.500	1.967.701.192	95,69	4,31
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.558.891.880	5.402.683.089	97,19	2,81
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.083.940.200	7.926.174.374	98,05	1,95



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		18	Indeks Desa Membangun	102,08	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.046.420.653	5.955.320.936	98,49	1,51
					Program Penataan Desa	322.438.800	307.423.429	95,34	4,66
					Program Peningkatan Kerja Sama Desa	40.320.714	37.689.534	93,47	6,53
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.927.550.902	4.810.706.335	97,63	2,37
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.435.143.095	18.523.615.350	95,31	4,69
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.252.498.692	21.221.366.146	65,80	34,20
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	676.183.498	655.729.291	96,98	3,02
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.496.891.178	6.341.279.734	97,60	2,40
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	588.505.260	553.069.842	93,98	6,02
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	113.000.000	94.176.215	83,34	16,66
C	MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah								
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	109,05					



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	19	Nilai AKIP	92,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.400.196.463.972	1.120.854.710.679	80,05	TE				
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	881.854.275	875.145.081	99,24	TE				
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	516.602.705	514.472.424	99,59	TE				
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	807.384.082,00	799.952.986	99,08	TE				
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.959.288.924	7.996.655.189	80,29	TE				
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000	705.468.265	76,42	TE				
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.287.694.459	2.106.263.890	92,07	TE				
				12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	20	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	122,12	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.881.168.482	1.836.603.894	97,63	2,37
									Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.264.737.414	7.237.388.674	99,62	0,38
									Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	77.153.460	76.698.685	99,41	0,59



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	911.921.466	898.089.763	98,48	1,52	
				Program Pendaftaran Penduduk	756.600.000	753.407.694	99,58	0,42	
				Program Pencatatan Sipil	587.153.713	584.387.604	99,53	0,47	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	617.879.912	617.628.591	99,96	0,04	
				Program Pengelolaan Arsip	172.840.068	172.051.565	99,54	0,46	
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	21	Opini BPK	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	679.310.099.466	660.233.087.522	97,19	2,81
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.427.988.633	4.000.368.810	90,34	9,66
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,04	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	647.792.793	623.867.014	96,31	3,69
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	23	Indeks Sistem Merit	93,42	Program Kepegawaian Daerah	3.579.512.141	3.370.989.250	94,17	TE
Jumlah :					2.823.040.645499	2.667.598.455.466	99,49		

Sumber : Sekretariat Daerah dan BPPKAD, Data diolah, 2026

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025**





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 Kabupaten Magelang tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, namun terdapat tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Magelang.



3.1.1. Target Kinerja

Pada Tahun 2025 terdapat Tugas Pembantuan Pusat oleh Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Magelang dengan anggaran sebesar Rp1.681.856.000,00. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Program Ketahanan Sumber Daya Air

Program ini dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Progo Bogowonto Luk Ulo. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana yang dilaksanakan di Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan dan Desa Margoyoso Kecamatan Salaman. Anggaran dari program ini sebesar Rp211.192.000,00.

b. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Adapun kegiatan dalam program tersebut meliputi:

- 1) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dalam bentuk Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND) di Kecamatan Grabag dengan anggaran Rp92.175.000,00;
- 2) Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam bentuk irigasi perpompaan yang berlokasi di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo, Desa Somoketro Kecamatan Salam, serta Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun dengan anggaran sebesar Rp475.314.000,00;
- 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00;
- 4) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dengan output terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Magelang dengan anggaran sebesar Rp229.830.000,00 dan penyaluran pupuk subsidi yang tepat jumlah dan tepat sasaran dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00;
- 5) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan anggaran sebesar Rp587.065.000,00;
- 6) Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp4.500.000,00.



c. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Layanan Manajemen Keuangan dengan anggaran sebesar Rp36.780.000,00.

3.1.2. Realisasi Kinerja

Tugas Pembantuan Pusat oleh Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp1.681.856.000,00. dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.613.233.400,00 atau sebesar 95,92% dan realisasi fisik sebesar 100%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan pusat oleh Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 3.1.



Tabel 3.1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat oleh Provinsi Jawa Tengah yang Berlokasi di Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kementerian Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA: 018.13.4.691347/2025 tanggal 07 Agustus 2025	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah					
			1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian							
			Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND)	Desa Citrosono, Seworan, Ngrancah, Tirto, losari, Kalipucang, Sambungrejo, Banjarsari Kecamatan Grabag		92.175.000	92.175.000	100	1 paket	100
			2) Kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	-						
		Irigasi perpompaan (QW)	Desa Banyuurip Tegalrejo, Desa Somoketro Kecamatan Salam, Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun		475.314.000	475.314.000	100	1 paket	100	



No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Kegiatan Pengelolaan air irigasi untuk pertanian							
			Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi	Citroso, Seworan, Ngrancah, Tirto, losari, Kalipucang, Sambungrejo, Banjarsari Kecamatan Grabag		587.065.000	523.942.400	89,25	1 Paket	100
			4) Kegiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup							
			Irigasi perpompaan	Desa Banyuurip Tegalrejo, Desa Somoketro Kecamatan Salam, Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun		4.500.000	4.500.000	100	1 Paket	100
2	Kementerian Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas		Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah					
			1) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian							



No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Anggaran 2025 Nomor SP DIPA: 018.08.4.039158/2025 tanggal 18 Juli 2025	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	Kab. Magelang		15.000.000	14.000.000	93,33	1 Paket	100	
			2) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida								
			Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi	Kab. Magelang		229.830.000	229.830.000	100	1 paket	100	
			Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kab. Magelang		30.000.000	30.000.000	100	1 paket	100	
			Program Dukungan Manajemen								
			1) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian								
			Layanan Manajemen Keuangan	Kab. Magelang		36.780.000	32.280.000	87,77	1 paket	100	
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA:	Program Ketahanan Sumber Daya Air		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Progo Bogowonto Luk Ulo						
			1) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana								



No	Kementerian/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		033.06.4.039428/2025 tanggal 08 April 2025	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi (Saluran Sekunder Sukorejo)	Desa : Sukorejo Kecamatan : Mertoyudan Kabupaten : Magelang		104.556.000	104.556.000	100	1 Paket	100
			Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi (Saluran Induk Progomanggis)	Desa : Margoyoso Kecamatan : Salaman Kabupaten : Magelang		106.636.000	106.636.000	100	1 Paket	100
Jumlah Total						1.681.856.000	1.613.233.400	95,92		100

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026



3.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

3.2.1. Target Kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Magelang sebesar Rp117.698.000.000,00 meliputi

- a. Peningkatan sarana prasarana pedesaan sebanyak 723 titik lokasi dengan anggaran sebesar Rp96.484.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp96.484.000.000,00 dan realisasi fisik sebanyak 723 titik.
- b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Jamban Keluarga ditujukan pada 8 desa sebesar Rp1.274.000.000,00. Program ini berlokasi di Desa Jumoyo Salam, Desa Sucen Salam, Desa Ambartawang Mungkid, Desa Blongkeng Ngluwar, Desa Bandongan Bandongan, Desa Banyubiru Dukun, Desa Ngargomulyo Dukun, Desa Sambak Kajoran.
- c. Peningkatan Kualitas RTLH di Perdesaan sejumlah 997 unit berlokasi di 213 desa dengan anggaran sebesar Rp19.940.000.000,00.

3.2.2. Realisasi Kinerja

Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya yang dilaksanakan Kabupaten Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp117.698.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp117.698.000.000,00 atau sebesar 100% dan realisasi fisik sebesar 100%. Matriks Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 3.2.



Tabel 3.2

Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Perubahan DPA-Bankeu Kab/Kota Nomor : 01847/DPPA/2025	Peningkatan Saprass Perdesaan	723 lokasi	Dispermasdes	96.484.000.000	96.484.000.000	100	723 lokasi	100
2	Kesehatan	Perubahan DPA-Bankeu Kab/Kota Nomor : 01847/DPPA/2025	Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa untuk Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Jamban Keluarga	8 Desa a. Desa Jumoyo Salam b. Desa Sucen Salam c. Desa Ambartawang Mungkid d. Desa Blongkeng Ngluwar e. Desa Bandongan Bandongan f. Desa Banyubiru Dukun g. Desa Ngargomulyo Dukun h. Desa Sambak Kajoran	Dinas Kesehatan	1.274.000.000	1.274.000.000	100	8 desa	100
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perubahan DPA-Bankeu Kab/Kota Nomor : 01847/DPPA/2025	Peningkatan Kualitas RTLH di Perdesaan	997 unit yang tersebar di 213 desa (21 kecamatan)	DPRKP	19.940.000.000	19.940.000.000	100	997 unit	100
Jumlah						117.698.000.000	117.698.000.000	100		100

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2026

Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2025 memberikan bantuan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp23.547.700,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jenis bantuan keuangan terdiri atas pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, jalan usaha tani, jalan produksi peternakan dan perikanan, jembatan desa, jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier, sarana dan prasarana air bersih pedesaan, senderan pengaman mata air, hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah desa, instalasi biogas desa, embung desa; pengadaan alat pengolah sampah desa, mobil angkut sampah desa, tanah mata air, bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air, pohon pelindung tangkapan mata air, bina keluarga balita kit stunting; bantuan penanganan anak tidak sekolah, pensertifikatan tanah kas desa, operasional PAUD milik desa, operasional posyandu, pemberian makanan tambahan untuk kegiatan posyandu; penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan; serta pemberian insentif guru keagamaan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari kepada Pemerintah Kabupaten Magelang kepada pemerintah desa sebesar Rp23.547.700.000,00 dengan realisasi keuangan Rp23.324.500.000,00 atau sebesar 99,05%.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Kegiatan dijumpai kendala dan permasalahan, antara lain:

1. Proses rekrutmen fasilitator/manajer desa mundur sehingga anggaran tidak dapat terserap secara optimal
2. Terdapat perubahan peraturan penggunaan anggaran perjalanan dinas sehingga anggaran tidak terserap secara optimal
3. Terdapat perubahan SOTK di tingkat kementerian yang berdampak pada waktu pelaksanaan.



3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Upaya penyelesaian permasalahan di atas, antara lain:

1. Penganggaran yang pasti dari pemerintah pusat;
2. Penerbitan DIPA dibarengi dengan penerbitan juknis dan juklak yang dapat langsung diakses;
3. Penambahan anggaran untuk sarana prasarana pertanian yang lebih memadai seperti irigasi, embung, dan parit
4. Bantuan alat mesin pertanian disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan kelompok.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025**



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- a. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)
- b. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$$

Keterangan:

IP_{SPM}	=	Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM})

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	2	3	4
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran target yang telah ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan PAUD
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan.



4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	32.522 Orang	Setiap tahun	Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	24.164.106.726
					Angka partisipasi murni	100%	Setiap tahun	
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83,13%	Setiap tahun	
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	81,55%	Setiap tahun	
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,5%	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	8,35%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,76%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	81,55%	Setiap tahun	
2					SD			122.273.780.178



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	168.281 Orang	Setiap tahun	Angka partisipasi kasar	100%	Setiap tahun	
Angka partisipasi sekolah					100%	Setiap tahun		
Kemampuan literasi					71,07%	Setiap tahun		
Kemampuan numerasi					61,86	Setiap tahun		
Perbedaan Skor Literasi					2,33	Setiap tahun		
Perbedaan Skor numerasi					3.00	Setiap tahun		
Indeks iklim keamanan					77,96%	Setiap tahun		
Indeks iklim kebinekaan					76,15%	Setiap tahun		
Indeks iklim inklusivitas					63,14	Setiap tahun		
Kecukupan formasi guru ASN					8,99%	Setiap tahun		
Indeks distribusi guru					0,38%	Setiap tahun		
Proporsi PTK bersertifikat					37,97%	Setiap tahun		
SMP								
Angka partisipasi kasar					100%	Setiap tahun		
Angka partisipasi sekolah					100%	Setiap tahun		
Kemampuan literasi					80,86	Setiap tahun		
Kemampuan numerasi					70,45	Setiap tahun		
Perbedaan skor literasi					3,66	Setiap tahun		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							tahun	
					Perbedaan skor numerasi	3,00	Setiap tahun	
					Indeks iklim keamanan	73,06	Setiap tahun	
					Indeks iklim kebinekaan	72,14	Setiap tahun	
					Indeks iklim inklusivitas	62,14	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	2,81%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,37%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	50,14%	Setiap tahun	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	6.450 orang	Setiap tahun	Angka Partisipasi Sekolah	100%	Setiap tahun	21.847.108.877
Jumlah								168.284.995.781

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia menjadi salah satu upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan menjadi empat negara besar ekonomi dunia pada 2045. Namun, secara holistik, pemerintah daerah masih memiliki tantangan dalam mengidentifikasi dan merefleksikan capaian kualitas pendidikan di daerah dan belum ada solusi pembenahan yang nyata. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merilis Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 untuk membantu pemerintah daerah mengevaluasi kualitas pendidikan di daerahnya secara detail, sehingga dapat membantu melakukan perencanaan berbasis data dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 ini menunjukkan indikator utama yang digunakan untuk mengukur indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau skor capaian pendidikan.



SPM Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Rapor Pendidikan adalah platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan, terutama data Asesmen Nasional (AN), sehingga menjadi alat ukur komprehensif yang menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mendorong refleksi dan perbaikan mutu pendidikan. AN dapat memotret kualitas hasil belajar, proses, serta lingkungan belajar sebagai refleksi kondisi mutu layanan pendidikan. AN mengukur instrumen kunci seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), dan Survei Karakter untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga instrumen tersebut menjadi kompetensi dasar untuk mendorong pembelajar sepanjang hayat, berkontribusi pada masyarakat, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Di samping itu, Sulingjar dapat menjadi dasar dalam mendiagnosis tantangan di satuan pendidikan dan merencanakan pembenahan.

4.1.3 Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM bidang urusan Pendidikan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2025, terdiri dari:

Tabel 4.3.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	6.846.162.726		649.944.000	16.668.000.000
2.	Pendidikan Dasar	7.387.436.178		857.794.000	114.028.550.000
3.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.847.108.877		0	0



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
4.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.543.233.259		0	0
5.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.303.875.618		0	0
Jumlah		36.080.707.781		1.507.738.000	130.696.550.000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp168.284.995.781 Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan pada tahun 2025 berasal dari APBD dan DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik.

4.1.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan meliputi:

Tabel 4.4.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Strata 3 (S3)	1
2.	Strata 2 (S2)	233
3.	Strata 1/D4 (S1)	8.374
4.	Diploma 3 (D3)	73
5.	Diploma 2 (D2)	73
6.	Lainnya	1.087
Jumlah		9.841

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan sebanyak 9.841 orang terdiri dari personil pada kantor Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan satuan pendidikan serta dukungan Pemerintah dan juga tak bisa lepas dari dukungan masyarakat.

4.1.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	32.522	32.522	100	6.846.162.726	6.431.019.420	93,93
2.	Pendidikan Dasar	168.281	168.281	100	7.387.436.178	6.154.994.344	83,31
3.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.450	6.450	100	21.847.108.877	18.912.406.965	86,57
					20.543.233.259	17.808.054.505	86,69
					1.303.875.618	1.104.352.460	84,70
Jumlah		207.253	207.253	100	36.080.707.781	31.498.420.729	87,29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pendidikan mencapai 87,29%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025 berdasarkan penghitungan per jenis pelayanan dasar berikut ini.



a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.6.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	32.522	32.522	100	80.00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83,13%	82.71%	99,49	19.20%
2.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	81,55%	75,4%	92,46	19.20%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,20

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Penerima Layanan Dasar Anak Usia Dini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk usia 5-6 yang terlayani 32.522 jiwa (100%), dapat diartikan penduduk Kabupaten Magelang usia 5-6 semua terlayani dikarenakan minat masyarakat/kesadaran masyarakat untuk memasukan putra putrinya ke Lembaga PAUD sudah tinggi. Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Anak Usia Dini proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B terealisasi 82.71% dari target 83,13% atau mencapai 99,49 dari target di Tahun 2025. Sedangkan untuk kualitas tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV terealisasi 75.4% dari target 81.55% atau mencapai 92.46% dari target di tahun 2025, hal itu dikarenakan masih banyak yang sedang menyelesaikan pendidikan S1 nya dan belum mengikuti PPG Prajabatan Tahun 2025.



b. Pendidikan Dasar

Tabel 4.7.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar	168.281	168.281	100	80.00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	SD				
1.	Angka Partisipasi Kasar	100%	95,87%	95,87%	
2.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	99,31%	99,31%	
3.	Kemampuan literasi	71,07%	68,57%	96,48	19,29%
4.	Kemampuan numerasi	61,86	58,96%	95,31	19,06%
5.	Perbedaan Skor Literasi	2,33%	2,33%	100	20,00%
6.	Perbedaan Skor numerasi	3,00%	3,00%	100	20,00%
7.	Indeks iklim keamanan	77,96%	77,06%	98,82	19,76%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	76,15%	75,15%	98,69	19,74%
9.	Indeks iklim inklusivitas	63,14%	60,64%	96,04	19,21%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	8,99%	8,99%	100	20,00%
11.	Indeks distribusi guru	0,38%	0,38%	100	20,00%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	37,97%	37,97%	100	20,00%
	SMP				
1.	Angka Partisipasi Kasar	100%	88,35%	88,35%	
2.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	98,19%	98,19%	
3.	Kemampuan literasi	80,86%	79,76 %	98,64	19,73%
4.	Kemampuan numerasi	70,45%	68,95%	97,87	19,57%
5.	Perbedaan skor literasi	2,66%	2,66%	100	20,00%
6.	Perbedaan skor numerasi	3,00%	3,00%	100	20,00%
7.	Indeks iklim keamanan	73,06%	71,56%	97,95	19,59%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	72,,14%	71,14%	98,61	19,72%
9.	Indeks iklim inklusivitas	62,14%	59,74%	96,14	19,23%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	2,81%	2,81%	100	20,00%
11.	Indeks distribusi guru	0,37%	0,37%	100	20,00%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	50,14%	50,14%	100	20,00%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas, IPSPM Pendidikan Dasar Tahun 2025 dapat dilihat bahwa pelayanan dasar pendidikan telah menjangkau seluruh sasaran layanan. Dari jumlah penduduk usia sekolah sebesar 100%, sehingga Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar mencapai 80%.

Pada jenjang SD, Angka Partisipasi Sekolah mencapai 99,31% yang dapat diartikan bahwa anak usia 7–12 tahun yang belum terlayani sebesar 0,69%. Sedangkan pada jenjang SMP, Angka Partisipasi Sekolah mencapai 98,19% yang berarti anak usia 13–15 tahun yang belum mengenyam pendidikan sebesar 1,81%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sosial budaya, pekerja anak, faktor ekonomi keluarga, serta adanya anak yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal.

Dari sisi mutu pembelajaran, kemampuan literasi SD mencapai nilai 68,57 dari target 71,07 atau sebesar 96,48% dari target, sedangkan kemampuan numerasi SD mencapai nilai 58,96 dari target 61,86 atau sebesar 95,31%. Pada jenjang SMP, kemampuan literasi mencapai nilai 79,76 dari target 80,86 atau sebesar 98,64%, sedangkan kemampuan numerasi mencapai nilai 68,95 dari target 70,45 atau sebesar 97,87%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan literasi pada kedua jenjang telah berada pada kategori baik, namun kemampuan numerasi masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan.

Dari aspek iklim satuan pendidikan, baik pada jenjang SD maupun SMP, indikator keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas menunjukkan capaian yang relatif baik dan mendukung proses pembelajaran. Secara keseluruhan, Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Tahun 2025 mencapai 19,49, yang menunjukkan bahwa mutu pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Magelang berada pada kategori baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan terutama pada aspek numerasi dan pemerataan akses bagi anak usia sekolah yang belum terlayani.



c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.8.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesetaraan	6.450	6.450	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	30.31%	25.34%	83.60	16.72%
2.	Kemampuan literasi	76.12%	76.12%	100	20.00%
3.	Kemampuan numerasi	70.85%	70.85%	100	20.00%
4.	Perbedaan skor literasi	2.55%	2.55%	100	20.00%
5.	Perbedaan skor numerasi	2.44%	2.44%	100	20.00%
6.	Indeks iklim keamanan	70.48%	70.48%	100	20.00%
7.	Indeks iklim kebinekaan	65.16%	65.16%	100	20.00%
8.	Indeks iklim inklusivitas	54.81%	54.81%	100	20.00%
Total Indeks Mutu Pelayanan Kesetaraan					96.72%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IP_{SPM} Pendidikan Kesetaraan tercapai 96.72%, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk usia 7 sampai 18 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan sudah terlayani semua yaitu sebesar 6.450 sehingga bisa dikatakan tercapai 100%. Terkait dengan Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan kesetaraan Angka Prastisipasi Sekolah (7-18 tahun) kesetaraan 83.60.

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80,00	19,20	99,20	Tuntas Utama
2.	Pendidikan Dasar	80,00	19,49	99,49	Tuntas Utama
3.	Pendidikan Kesetaraan	80,00	16,72	96,72	Tuntas Utama
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				98,47	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 98,47 dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 95.

Capaian kinerja bidang urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025 belum mencapai target SPM 100%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masih terdapat anak tidak sekolah umur 5 sampai dengan 18 tahun baik yang masuk kategori belum pernah sekolah, *drop out* maupun lulus tidak melanjutkan.
- b. Masih terdapat Pendidik di jenjang PAUD yang belum berkualifikasi D4/S1.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data.

4.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan numerasi belum tersedia di <i>platform</i> Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, misalnya Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi, Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional dsb	Pengisian Form. A.1.9 menunggu tersedia data di rapor pendidikan, sehingga capaian rapor mutu pendidikan diisikan pada tahun sebelumnya
		Nomenklatur sub kegiatan pada lampiran 1.B.2 belum sesuai dengan Nomenklatur SIPD	Mohon Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Penyesuaian Nomenklatur sub kegiatan lampiran 1.B.2 agar sesuai dengan nomenklatur sub kegiatan pada SIPD RI
		SPM Bidang Pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kemenag, sementara data untuk rincian kegiatan dan anggaran SPM di input dan dilaporkan baru data dari Disdikbud. Rincian kegiatan dan anggaran di aplikasi SPM sdh sesuai SIPD, namun Nomenklatur sub kegiatan pada lampiran 1.C.2 belum sesuai dengan Nomenklatur SIPD	Apabila memungkinkan Tim SPM juga melibatkan dari Kantor Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi dalam Aplikasi untuk anggaran SPM dari Kantor Kemenag dan juga memfasilitasi Penyesuaian Nomenklatur sub kegiatan lampiran 1.C.2 agar sesuai dengan nomenklatur sub kegiatan pada SIPD RI
		Data Pendataan Sheet 1.A.9 belum tersedia di rapor pendidikan	Mohon Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi menyediakan data tersebut melalui rapor pendidikan
2.	Eksternal	Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP yang sederajat di Kabupaten Magelang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kantor Kemenag (di bawah Kementerian Agama)	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama
		SPM Bidang Urusan Pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kemenag, sementara data untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan baru data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		Pemahaman/Persepsi tentang pengisian aplikasi SPM masih bervariasi antar Kab/Kota	Dinas Pendidikan Provinsi/BBPMP untuk memfasilitasi pelatihan pengisian aplikasi SPM agar tiap Kab/Kota mempunyai pemahaman/persepsi yang sama dalam pengisian Aplikasi SPM
		Masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang, sehingga capaian partisipasi sekolah belum maksimal	Penanganan Anak Tidak Sekolah yang didukung oleh semua pihak

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).



4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Pelayan Minimal ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	13.409 orang	Setiap tahun	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	21.747	Setiap tahun	3.518.480.206
					Tablet tambah darah	2.413.620	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13.409	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13.409	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13.409	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	13.409	Setiap tahun	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	13.409	Setiap tahun	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	13.409	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.409	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Gel USG	894	Setiap Tahun	
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekolog	277	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1104	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
					Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	12.643	Setiap tahun	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	12.643 orang	Setiap tahun	Formulir Partograf	12.643	Setiap tahun	132.896.232
					Kartu ibu/rekam medis ibu	12.643	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.643	Setiap tahun	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	277	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1104	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	12.533 orang	Setiap tahun	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.533	Setiap tahun	531.778.600
					Vitamin K1 injeksi	12.533	Setiap tahun	
					Salep/tetes mata antibiotik	12.533	Setiap tahun	
					Formulir bayi baru lahir	12.533	Setiap tahun	
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	12.533	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.533	Setiap tahun	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	277	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1104	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	41	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	14.568	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	74.148 orang	Setiap tahun	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	74.148	Setiap tahun	82.187.463
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	74.148	Setiap tahun	
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	74.148	Setiap tahun	
					Vitamin A Biru	5.711	Setiap tahun	
					Vitamin A Merah	56.029	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	13.201	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	52.804	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	26.402	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	39.603	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	13.201	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	16.367	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	16.367	Setiap tahun	
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	177.945	Setiap tahun	
					Peralatan Anafilaktik	29	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Formula Terapi Gizi Buruk	55	Setiap tahun	
					Tenaga medis: Dokter	265	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1104	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
					Guru PAUD	2.309	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	14.568	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	169.354 orang	Setiap tahun	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	169.354	Setiap tahun	365.539.943
					Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	169.354	Setiap tahun	
					Kuesioner skrining kesehatan	169.354	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	169.354	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	60	Setiap tahun	
					Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	154.685	Setiap tahun	
					Alat Pemeriksaan Hb	145	Setiap tahun	
					Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	9.610	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Media promosi kesehatan	29	Setiap tahun	
					Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	55.657	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	324	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan : Masyarakat	77	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	7.510	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	14.568	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	586.948	Setiap tahun	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	647.009.654
					Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	290	Setiap tahun	
					Alat : Tensimeter	290	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Alat : Glukometer	290	Setiap tahun	
					Alat: Alat Pemeriksa Hb	29	Setiap tahun	
					Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	586.948	Setiap tahun	
					Alat : KIT IVA Tes	29	Setiap tahun	
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	29	Setiap tahun	
					Kit Ophthalmologi Komunitas	29	Setiap tahun	
					Kuesioner PUMA	580	Setiap tahun	
					Alat Pelayanan KB	59	Setiap tahun	
					Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	29	Setiap tahun	
					Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	29	Setiap tahun	
					Vasectomi Set	1	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	29	Setiap tahun	
					Vaksin Tetanus Difteri (td)	225.134	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	265	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1104	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu	14568	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	166.395 orang	Setiap tahun	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	29	Setiap tahun	46.640.005
					Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	29	Setiap tahun	
					Alat pemeriksaan kolesterol	29	Setiap tahun	
					Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	166.395	Setiap tahun	
					Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	166.395	Setiap tahun	
					Buku kesehatan lansia atau aplikasi	166.395	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian																
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)										
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian											
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
					pencatatan terkait lainnya Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Tenaga medis : Dokter Tenaga kesehatan : Bidan Tenaga kesehatan : Perawat Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu													
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	133.236	Setiap tahun	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat Hipertensi Tensimeter Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Tenaga kesehatan : Dokter	58	133.236	290	29	29	265	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	54.914.655



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	41	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	19.610 orang	Setiap tahun	Obat Diabetes Melitus	19.610	Setiap tahun	95.559.040
					Fotometer atau Glukometer	29	Setiap tahun	
					BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	19.610	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi	29	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Manajemen Puskesmas)				
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Dokter	265	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	133	Setiap tahun		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.508 orang	Setiap tahun	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	29	Setiap tahun	333.979.992	
					Penyediaan Psikofarmaka	29	Setiap tahun		
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau	29	Setiap tahun		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					penyediaan melalui aplikasi				
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	29	Setiap tahun		
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Dokter	265	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	3	Setiap tahun		
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	29	Setiap tahun		
					Tenaga profesional lainnya	5	Setiap tahun		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	10.675 orang	Setiap tahun	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	58	Setiap tahun	445.177.540	
					Reagen Zn TB	63	Setiap tahun		
					Masker bedah dan Masker N95	1.296	Setiap tahun		
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	125	Setiap tahun		
					Katrid tes cepat molekuler	6.650	Setiap tahun		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Formulir pencatatan dan pelaporan	36	Setiap tahun	
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	36	Setiap tahun	
					Tuberkulin	120	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Radiografer	4	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	29	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	16.408 orang	Setiap tahun	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	16.209.990
					Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	16.408	Setiap tahun	
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum	164	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Sprit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
					Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	36	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	284	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Bidan	734	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	133	Setiap tahun		
					Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	77	Setiap tahun		
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	3	Setiap tahun		
Jumlah									6.270.372.320

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



4.2.3 Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Kesehatan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun 2025 dan anggaran lainnya, terdiri dari:

Tabel 4.12.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	
		APBD	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3.518.480.206	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	132.896.232	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	531.778.600	0
4	Pelayanan kesehatan balita	82.187.463	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	365.539.943	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	647.009.654	0
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	46.640.005	0
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	54.914.655	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	95.559.040	0
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	333.979.992	0
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	445.177.540	219.521.368
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	16.209.990	0
13	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	721.699.241	0
14	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.652.372.300	0
Jumlah		10.644.445.861	219.521.368

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp10.863.967.229,00. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Kesehatan pada tahun 2025 berasal dari APBD dan Sumber dana Lain yang Sah.

4.2.4 Dukungan personil

Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Adapun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

Tabel 4.13.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Dokter	277
2.	Dokter Gigi	108
3	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	11
3.	Dokter Spesialis Anak	11
4.	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	5
5.	Dokter Spesialis Paru	3
6.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	22
7.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2
8.	Bidan	734
9.	Perawat	1.104
10.	Tenaga Kefarmasian	466
11.	Tenaga Gizi	69
12.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	41
13.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	77
14.	Tenaga Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	133
15.	Radiografer	4
Jumlah		3.067

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sebanyak 3.067.

4.2.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Indeks Pencapaian SPM	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.409	13.032	97.43%	3.518.480.206	3.478.890.310	98,87%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.643	12.194	96.77%	132.896.218	132.896.218	100,00%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.533	12.150	97.30%	256.290.887	256.290.887	48,20%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	74.148	74.063	99.18%	81.347.459	81.347.459	98,98%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	169.354	169.386	98.84%	346.389.655	346.389.655	94,76%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	586.948	585.720	99.22%	643.271.491	643.271.491	99,42%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	166.395	172.778	98.47%	46.500.832	46.500.832	99,70%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	133.236	127.815	96.68 %	52.467.382	52.467.382	95,54%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.610	23.021	100%	95.447.040	95.447.040	99,88%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Indeks Pencapaian SPM	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.508	2.616	100.00 %	303.286.332	303.286.332	90,81%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.675	13.874	100.00 %	441.344.775	441.344.775	99,14%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	16.408	16.082	98.41 %	14.084.990	14.084.990	86,89%
	Jumlah			98,52 %	6.270.373.320	5.892.217.371	93,97 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan pada SPM Bidang Urusan Kesehatan mencapai 98,52%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025 berdasarkan jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 4.15.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.409	13.443	97,19	77,75



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	21.747	25.257	100	20
2.	Tablet tambah darah	2.413.620	2.345.760	98,19	19,44
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13.409	13.032	98,19	19,44
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13.409	13.032	98,19	19,44
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13.409	13.032	98,19	19,44
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	13.409	13.032	98,19	19,44
7.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	13.409	13.571	98,19	19,44
8.	Kartu ibu/rekam medis ibu	13.409	13.032	98,19	19,44
9.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.409	13.032	98,19	19,44
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20
11.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	894	872	97,54	19,51
12.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	277	288	100	20
13.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	734	734	100	20
14.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	1.104	1.104	100	20
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	466	100	20



16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
17.	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	12.643	12.040	95,23	19,04
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,68

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 13.032 orang (97,19%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 13.409 orang. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil belum mencapai 100% karena beberapa ibu hamil yang pada bulan desember masih belum saatnya K6.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 4.16.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.643	12.194	96,45	77,16
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Formulir Partograf	12.643	11.320	89,54	17,09
2.	Kartu ibu (rekam medis)	12.643	12.194	96,45	19,29
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	12.643	12.194	96,45	19,29
4.	Media promosi komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20



5.	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	277	288	100	20
6.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	734	734	100	20
7.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	1.104	1.104	100	20
8.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	466	100	20
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,61

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 12.194 orang (96.45%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 12.643 orang. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin belum mencapai 100% disebabkan persalinan yang ke empat dan seterusnya bisa menyebabkan proses persalinan cepat sehingga bayi sudah lahir sebelum ibu hamil datang ke fasyankes. Persalinan yang maju dan mundur dari perkiraan persalinan juga dapat menyebabkan bayi lahir tidak di fasyankes.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 4.17.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12.533	12.150	96.94	77.56
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	12.533	12.191	97.27	19,45



2.	Vitamin K1 injeksi	12.533	12.150	96,94	19,39
3.	Salep/tetes mata antibiotik	12.533	12.150	96,94	19,39
4.	Formulir bayi baru lahir	12.533	12.150	96,94	19,39
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	12.533	12.150	96,94	19,39
6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	12.533	12.150	96,94	19,39
7.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20
8.	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	277	288	100	20
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	734	734	100	20
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	1.104	100	20
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	466	100	20
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	41	41	100	20
13.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
14.	Kader Kesehatan	14.568	14.568	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 12.150 orang (96,94%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 12.533 orang. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir belum mencapai 100% disebabkan adanya bayi baru lahir yang dilayani di faskes luar Kabupaten Magelang.



d. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 4.18.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	74.148	74.063	99.89	79.91
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	74.148	74.063	99,89	19,98
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	74.148	74.063	99,89	19,98
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	74.148	74.063	99,89	19,98
4.	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	5.711	9.853	100	20
5.	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	56.029	60.177	100	20
6.	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	13.201	13.258	100	20
7.	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	52.804	52.843	100	20
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	26.402	26.439	100	20
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	39.603	39.633	100	20
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	13.201	13.282	100	20
11.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	16.367	16.374	100	20
12.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	16.367	16.374	100	20
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	177.945	179.945	100	20
14.	Peralatan Anafilaktik	29	29	100	20
15.	Formula Terapi Gizi Buruk	55	13	23,64	4,72
16.	Tenaga kesehatan : Dokter	265	277	100	20
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	734	734	100	20
18.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	1.104	100	20
19.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
20.	Guru PAUD	2.309	2.309	100	20



21.	Kader Kesehatan	14.568	14.568	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 74.148 orang (99,89%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 74.063 orang. Pelayanan Kesehatan Balita belum mencapai 100% disebabkan adanya balita yang tidak tinggal di domisili ketika adanya pelayanan kesehatan balita.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 4.19.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 × 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 × 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	169.354	169.386	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 × 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 × 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	169.354	1.330	0,79	20
2.	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	169.354	169.386	100	20
3.	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	169.354	169.386	100	20
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	169.354	169.386	100	20



5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	60	60	100	20
6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	154.685	1.479.764	100	20
7.	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	145	145	100	20
8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	9.610	9.075	94,43	18,89
9.	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	29	29	100	20
10.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	55.657	56.052	100	20
11.	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter gigi	324	385	100	20
12.	Tenaga Kesehatan : Bidan	734	734	100	20
13.	Tenaga Kesehatan : Perawat	1104	1104	100	20
14.	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	466	100	20
16.	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	100	20
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	7.510	7.510	100	20
18.	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	14.568	14.568	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar melampaui 100% sebanyak 169.386 orang dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 169.354 orang.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel 4.20.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	586.948	585.720	99,79	79,83
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	29	29	100	20
2.	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	290	290	100	20
3.	Alat : Tensimeter	290	290	100	20
4.	Alat : Glukometer	290	290	100	20
5.	Alat: Alat Pemeriksa Hb	29	29	100	20
6.	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	586.948	586.948	100	20
7.	Alat : KIT IVA Tes	29	29	100	20
8.	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	29	29	100	20
9.	Kit Ophthalmologi Komunitas	29	16	55,17	11,03
10.	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	580	580	100	20
11.	Alat Pelayanan KB	59	48	86,21	17,24
	a.Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	29	23	79,31	15,86



	b.Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	29	23	79,31	15,86
	c.Vasectomi Set	1	2	100	20
12.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	29	29	100	20
13.	Vaksin Tetanus Difteri (td)	225.134	225.434	100	20
14.	Tenaga kesehatan : Dokter	265	277	100	20
15.	Tenaga kesehatan : Bidan	734	734	100	20
16.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	1.104	100	20
17.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	65	100	20
18.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	100	20
19.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14.568	14.568	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebanyak 585.720 orang (99,79%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 586.948 orang. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif belum mencapai 100% disebabkan adanya masyarakat usia produktif yang tidak tinggal di domisili ketika adanya pelayanan kesehatan usia produktif.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 4.21.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	166.395	172.778	100	90



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	29	29	100	20
2.	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	29	29	100	20
3.	Alat pemeriksaan kolesterol	29	29	100	20
4.	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	166.395	172.778	100	20
5.	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	166.395	172.778	100	20
6.	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	166.395	500	0,30	0,06
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20
8.	Tenaga Kesehatan : Dokter	265	277	100	20
9.	Tenaga Kesehatan : Bidan	734	734	100	20
10.	Tenaga Kesehatan : Perawat	1.104	1.104	100	20
11.	Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	100	20
13.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14.568	14.568	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut melampaui 100% sebanyak 166.395 orang dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 172.7783 orang.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 4.22.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	133.236	127.815	95,93	76,75
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	58	58	100	20
2.	Obat Hipertensi	133.236	127.815	95,93	19,19
3.	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	290	290	100	20
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	29	29	100	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	29	29	100	20
6.	Tenaga Kesehatan ; Dokter	265	277	100	20



7.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	734	734	100	20
8.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	1.104	1.104	100	20
9.	Tenaga kesehatan ; Tenaga Gizi	69	69	100	20
10.	Tenaga kesehatan ; Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	41	41	100	20
11.	Tenaga kesehatan ; Tanaga Kefarmasian	466	466	100	20
12.	Tenaga kesehatan ; Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,93

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 127.815 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 133.236 orang. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi belum mencapai 100% disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat penderita Hipertensi untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 4.23.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.610	23.021	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Obat Diabetes Melitus	19.610	23.021	100	20



2.	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	29	29	100	20
3.	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	19.610	23.021	100	20
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	29	29	100	20
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	29	29	100	20
6.	Tenaga kesehatan : Dokter	265	277	100	20
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	734	734	100	20
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	1.104	100	20
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	466	466	100	20
10.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	77	77	100	20
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	69	69	100	20
12.	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	133	133	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus melampaui 100% sebanyak 23.021 orang dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 19.610 orang.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 4.24.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.508	2.616	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	29	29	100	20
2.	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	29	29	100	20
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	29	29	100	20
4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	29	29	100	20
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20



6.	Tenaga kesehatan : Dokter	265	277	100	20
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	3	3	100	20
8.	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	29	29	100	20
9.	Tenaga profesional lainnya	5	5	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 2.616 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 2.508 orang.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 4.25.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.675	13.874	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	58	58	100	20
2.	Reagen Zn TB	63	63	100	20
3.	Masker bedah dan Masker N95	1.296	1.296	100	20
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	125	125	100	20
5.	Katrid tes cepat molekuler	6.650	6.650	100	20
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	36	36	100	20



7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	36	36	100	20
8.	Tuberkulin	120	120	100	20
9.	Tenaga medis : Dokter/dokterspesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	36	36	100	20
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	36	36	100	20
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	36	36	100	20
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	29	29	100	20
13.	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	36	36	100	20
14.	Tenaga kesehatan : Radiografer	4	4	100	20
15.	Kader Kesehatan	29	29	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis melampaui 100% sebanyak 13.874 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 10.675 orang.

I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Tabel 4.26.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	16.408	16.082	98,01	78,41



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20
2.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	16.408	16.408	100	20
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	164	164	100	20
4.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	36	36	100	20
5.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	284	301	100	20
6.	Tenaga kesehatan : Bidan	734	734	100	20
7.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.104	1.104	100	20
8.	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	133	133	100	20
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	77	77	100	20
10.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	3	3	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebanyak 16.082 orang (98,01%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 16.408 orang. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV belum mencapai 100% disebabkan sulitnya menjangkau populasi kunci (LSL, WPS, Waria).

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:



Tabel 4.27.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	77.75	19.68	97.43	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	77.16	19.61	96.77	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	77.56	19.74	97.30	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	79.91	19.27	99.18	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80.00	18.84	98.84	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	79.83	19.38	99.22	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80.00	18.47	98.47	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76.75	19.93	96.68	Tuntas Utama
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80	20	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	80	20	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80	20	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	78,41	20	98,41	Tuntas Utama
BIDANG URUSAN KESEHATAN				98,52	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 98,52% dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 90%.

4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Internal	Jumlah sasaran ODGJ yang ada di lapangan seringkali lebih tinggi, tetapi tidak ada pelaporan kasus, sehingga penanganan belum sepenuhnya terpenuhi.	1. Penggerakan masyarakat melalui upaya penguatan lintas sektor dengan pengoptimisasian peran TPKJM.
		Belum adanya anggaran khusus dalam penanganan pasien ODGJ	2. Belum adanya anggaran khusus dalam penanganan pasien ODGJ
2.	Eksternal	1. Saat input di SIMKESWA terkendala identitas pasien seperti NIK dan tanggal lahir, nama pasien yang menimbulkan resiko dobel data. Belum terinputnya tanggal kunjungan terakhir.	1. Update Simkeswa sesuai SOP, sinkronisasi data dengan Disdukcapil
		2. Terdapat pasien ODGJ yang belum mempunyai BPJS atau sudah mempunyai BPJS tetapi non aktif sehingga untuk penanganan dalam pengobatan menjadi tidak optimal	2. Pengusulan pengaktifan kembali BPJS bagi pasien yang sudah memiliki BPJS, dan pengusulan BPJS baru bagi pasien yang belum mempunyai BPJS
		3. Terdapat ODGJ yang belum mempunyai KTP sehingga untuk identifikasi masih kesulitan.	3. Perlunya peran dinas terkait untuk membantu pembuatan identitas bagi ODGJ
		4. Masih kurangnya kesadaran baik dari keluarga maupun pasien untuk rutin kontrol berobat	4. Diadakan penyuluhan tentang pentingnya pengobatan bagi ODGJ, peran serta masyarakat dan lingkungan
		5. Belum ada juknis yang jelas untuk pembagian target SPM TBC hingga tingkat desa, karena perhitungannya tidak hanya mempertimbangkan jumlah penduduk tetapi angka penemuan kasus	5. Bimtek terkait penetapan dan pembagian target sasaran



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		di wilayah tersebut yang mana angka penemuan kasus juga dipengaruhi oleh kinerja masing-masing PKM.	
		6. Hanya dapat memantau stok riil logistik program tingkat kabupaten, sementara stok tingkat faskes belum dapat dipantau dan ditarik secara riil time	6. Mempercepat proses integrasi aplikasi logistik kemenkes

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 4.29.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air	2.000	Setiap tahun	Jumlah yang harus dilayani			2.045.936.2263
					Jaringan Perpipaan			



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		minum sehari-hari			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	500	Setiap tahun	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (Sesuai permenkes nomor 2 tahun 2023)	500	Setiap tahun	
					Bukan Jaringan Perpipaan			
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	0	Setiap tahun	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (Sesuai permenkes nomor 2 tahun 2023)	0	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.600	Setiap tahun	Jumlah yang harus dilayani			7.053.054.4662
					KUANTITAS SPALD			
					Ukuran Kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (Satu) akses pengolahan air limbah domestik	650	Setiap tahun	
					KUALITAS SPALD			
					SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT (SPALD-T)			
					Ukuran kualitas pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	150	Setiap tahun	
					SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)			
					Ukuran kualitas pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3	200	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/kota			
					Ukuran kualitas pelayanan akses layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan <25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah dan atau cubluk kempa	300	Setiap tahun	
Jumlah								Rp 9.098.990.685

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

4.3.3 Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.30.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Rp 2.045.936.226	Rp 500.000.000	0	Rp 1.481.385.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Rp 234.628.466	Rp 1.600.000.000	Rp 6.818.426.000	Rp 17.740.000
Jumlah		Rp 2.280.564.692	Rp 2.100.000.000	Rp 6.818.426.000	Rp 1.499.125.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 12.698.115.692. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2025 berasal dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK serta CSR .

4.3.4 Dukungan Personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka didukung oleh personil-personil yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun personil yang terlibat yakni:

Tabel 4.31.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	PNS	7
	P3K	2
	Tenaga Kontrak	6
	Jumlah	15
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	
	PNS	7
	P3K	2
	Tenaga Kontrak	12
	Jumlah	21

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum layanan air minum sebanyak 15 orang dan layanan air limbah domestik sebanyak 21 orang.

4.3.5 Hasil Capaian

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.32.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	500	500	100	Rp 2.045.936.226	Rp 2.037.530.864	99,10
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	650	650	100	Rp 7.053.054.466	Rp 7.048.761.080	99,94
	JUMLAH			100	Rp 9.098.990.692	Rp 9.086.291.944	99,86

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum mencapai 99,30%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025 berdasarkan penghitungan per jenis pelayanan dasar berikut ini.

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 4.33.
Indeks Pencapaian Target SPM
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.000	2.000	100	80
	Penerima Pelayanan Dasar				



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	500	500	100	20
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	500	500	100	20
3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	0	0	0	0
4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	0	0	0	0
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari tercapai 100% dan selanjutnya dapat dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP^{SPM}).



b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 4.34.
Indeks Pencapaian Target SPM
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2.600	2.600	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	150	150	100	20
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	200	200	100	20
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar	300	300	100	20



	maupun lubang tanah atau cubluk kembar				
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Indeks Pencapaian Target SPM Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari tercapai 100% dan selanjutnya dapat dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}).

Berdasarkan tabel-tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.35.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2025

N o	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 100 dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM 100. Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025 sama dengan tahun 2024.

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Pengadaan Tanah IPLT dihentikan pada Tahun 2024 sehingga menyebabkan Pekerjaan Pembangunan IPLT belum bisa dilaksanakan di Tahun 2025. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah anggaran DAK SANITASI yang didapatkan Tahun 2026. Pembangunan IPLT sangat berpengaruh pada capaian sanitasi aman dan anggaran DAK SANITASI berpengaruh pada kinerja layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Mengusulkan kembali pengadaan tanah dan pembangunan IPLT.
2.	Eksternal	Adanya pertentangan dalam pengadaan tanah dan pembangunan IPLT dari pihak luar pada tahun 2024 sehingga pengadaan tanah terhambat dan menyebabkan tidak turunnya DAK Sanitasi TA.2026 pada Kab.Magelang dan berpengaruh pada kinerja layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Mencari alternatif lokasi Pembangunan IPLT

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, salah satu indikator pencapaiannya adalah Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Pada saat ini Kabupaten Magelang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dalam pelayanan sanitasi, keberadaan IPLT sebenarnya adalah wajib untuk mewujudkan sanitasi yang layak dan aman. Sesuai dengan standar teknis sanitasi layak dan aman adalah bahwa sarana sanitasi harus dilengkapi dengan *septic tank* yang kedap, dan harus dilakukan penyedotan secara terjadwal yang kemudian dibuang ke IPLT untuk diolah. Sehingga IPLT menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Magelang.

Upaya untuk mewujudkan IPLT di Kabupaten Magelang sudah cukup lama namun banyak kendala yang menyebabkan belum terealisasi sampai saat ini. *Readiness Criteria* sudah disusun baik berupa *masterplan* air limbah maupun FS untuk lokasi IPLT.



Bahkan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah IPLT. Namun dinamika proses perencanaan yang panjang kemudian menyebabkan pengadaan tanah IPLT tersebut belum berhasil dilaksanakan. Diharapkan para pemangku kepentingan dari semua Perangkat Daerah terkait mengerti kendala-kendala yang dihadapi dan selanjutnya dapat ikut mengawal agar pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Magelang akan terwujud sesuai kondisi ideal yang diharapkan.

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.37.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		Setiap tahun	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	Setiap tahun	-
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	-		-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Setiap tahun	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	8	Setiap tahun	464.854.801
Jumlah								464.854.801

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp 464.854.801,00.

4.4.3 Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2025, terdiri dari:

Tabel 4.38.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	464.854.801,00	0	0	0
Jumlah		464.854.801,00	0	0	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025 sejumlah total Rp 464.854.801,00 dengan rincian:

1. Anggaran Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sejumlah Rp 0;
2. Anggaran Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp 464.854.801,00.

Selain berkoordinasi dengan BPBD terkait penanganan pasca bencana tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga melakukan koordinasi dan ikut membantu penanganan bencana lainnya. Adapun pendanaan jenis layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Magelang Tahun 2025 melalui dana BTT BPPKAD.

4.4.4 Dukungan Personil

Proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Seksi Pengembangan Perumahan pada Bidang Perumahan dan didukung oleh personil-personil Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 4.39.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)	1
2.	Strata 1 (S1)	1
3.	SM Non. AK	0
4.	SM AK	0
5.	Diploma 4 (D4)	0
6.	Diploma 3 (D3)	0
7.	Diploma 2 (D2)	0
8.	Diploma 1 (D1)	0
9.	SMA	1
10.	SMP	0
11.	SD	0
Jumlah		3

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 3 orang.

4.4.5 Hasil Capaian

Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.40.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi	-	-	-	0	0	0



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Korban Bencana Kabupaten/Kota						
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8	8	100	464.854.801,00	437.278.552	94,07
				100	464.854.801,00	437.278.552	94,07

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Perumahan rakyat mencapai 94,07%. Untuk mengukur tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025 berdasarkan penghitungan berikut ini.

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.41.
Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-		-
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	-	-	-



2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	8	8	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan menggunakan dana Bantuan Tidak Terencana yang dianggarkan pada BPPKAD, disesuaikan tingkat kerusakan bangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.42.

Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8	8	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitas penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada 8 Kepala Keluarga yang rumahnya terdampak bencana maka kemudian direlokasi di daerah yang aman.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung capaian Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.43.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				100	TUNTAS PARIPURNA A

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, sama dengan 100.

4.4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1	Internal	Tidak adanya bencana yang terjadi dalam skala besar sehingga belum terbitnya SK Bencana oleh Kepala Daerah.	Jika terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah telah ditangani dengan program BTT.
2.	Internal	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan luasnya wilayah. Data awal dari BPBD yang merupakan data daerah rawan bencana secara umum harus disesuaikan dengan wilayah permukiman saat ini	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana dilakukan secara bertahap, dan dilakukan <i>update</i> data secara berkala terhadap data yang sudah didapatkan
		Penanganan rehab rumah (ringan sedang) tidak bisa menunggu tahun anggaran berikutnya, sehingga harus dianggarkan saat itu juga.	Ada mekanisme BTT yang diatur dalam Perbup No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		Pada beberapa daerah rawan bencana terdapat warga yang menginginkan untuk direlokasi ke tempat lain namun ada beberapa hal yang perlu pemenuhan, yaitu: a. Belum tersedia studi atau Analisis tentang kondisi di lokasi apakah membutuhkan relokasi atau bisa dilakukan mitigasi struktural untuk mengurangi dampak bencana b. Warga belum memiliki tanah yang akan digunakan untuk lokasi relokasi	Berkoordinasi dengan : a. BPBD berkaitan dengan langkah penanganan yang akan dilakukan apakah relokasi atau mitigasi struktural b. Desa untuk penyediaan tanah
		Tidak ada pernyataan bencana dari Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi	Berkoordinasi dengan BPBD
3.	Eksternal	Tidak mudahnya mencari lahan calon relokasi yang memenuhi unsur keselamatan baik administrasi maupun teknis	Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan status dan keamanan lahan
4.	Eksternal	Perbedaan dalam memahami istilah dalam sistem SPM	Koordinasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman OPD terkait dari daerah sampai pusat

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 dilakukan dengan mekanisme Bantuan Sosial Tidak Terencana menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga, mekanisme ini hanya terbatas pada rehab rumah korban bencana.

Bantuan Sosial Tidak Terencana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk pemberian bantuan pembangunan kembali dan relokasi rumah terdampak bencana dimasukkan dalam program Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.45.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1.160	Setiap tahun	Standar sarana prasarana Satpol PP dan PK (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a.gedung kantor, b.kendaraan operasional, c.perengkapan operasional)	111 unit	Setiap tahun	4.934.919.447
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan PK (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	9 dokumen	Setiap tahun	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan PK dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	5 orang	Setiap tahun	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan	1 dokumen	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					kerugian material dan pelayanan pengobatan)				
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran perda/perkada)	5 Orang	Setiap tahun		
					Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penanganan perda/perkada dan ditindak lanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	5 orang	Setiap tahun		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	1250	Setiap tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana				385.993.332
					Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1 dokumen	5 tahun		
					Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1 dokumen	5 tahun		
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
					Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	1250 orang	Setiap tahun		
					Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	8 media	Setiap tahun		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	358 buah	setiap tahun	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	360	Setiap tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			638.323.200
					Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	1 dokumen	5 tahun	
					Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
					Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3 tahun	
					Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi			
					Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	-	setiap tahun	
					Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara	-	setiap tahun	
					Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)	0		
					Gladi Lapang	0		
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	365 hari	setiap tahun	
					Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Unit	setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast	0	setiap tahun	
					Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat	2 paket	setiap tahun	
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	12 Set	setiap tahun	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3980 Orang	Setiap tahun	Respon Cepat Darurat Bencana			1.328.483.264
					Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	12 laporan	Setiap tahun	
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana)	-	Setiap tahun	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
					Pelaksanaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	Setiap tahun	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	4.117	Setiap tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas	170	Setiap tahun	7.982.428.550



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)			
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4 dokumen	Setiap tahun	
					Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	958 unit	Setiap tahun	
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sum ber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	253 orang	Setiap tahun	
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	4.117 orang	Setiap tahun	
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka	4.117 orang	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)				
Jumlah									15.270.147.793

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp15.270.147.793.

4.5.3 Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Trantibumlinmas berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2025, terdiri dari:

Tabel 4.46.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.934.919.447	0	0	0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	385.993.332	0	0	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	638.323.200	0	0	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.328.483.264	0	0	0
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	7.982.428.550	0	0	0
	Dana Desa				
Jumlah		15.270.147.793	0	0	0

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025



4.5.4 Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Trantibumlinmas terdiri dari:

Tabel 4.47
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil (Satpol PP dan PK dan PK)	Jumlah Personil (BPBD)
1	2	3	4
1.	Strata 2 (S2)	5	7
2.	Strata 1 (S1)	12	25
3.	SM Non. AK	0	0
4.	SM AK	0	0
5.	Diploma 4 (D4)	0	0
6.	Diploma 3 (D3)	3	6
7.	Diploma 2 (D2)	0	0
8.	Diploma 1 (D1)	0	0
9.	SMA	370	25
10.	SMP	0	0
11.	SD	2	0
Jumlah		392	63

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas sebanyak 455 orang terdiri dari BPBD 63 ASN orang dan Satpol PP dan PK sebanyak 392 ASN .

4.5.5 Hasil Capaian

Hasil capaian merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.48.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.160	1.160	100	4.934.919.447	4.295.296.434	87,04
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.250	1.250	100	385.993.332	359.670.722	93,18
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	360	360	100	638.323.200	606.170.088	94,96
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.980	3.980	100	1.328.483.264	1.281.768.594	96,48
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	4.117	4.117	100	7.982.428.550	7.821.197.119	97,98
				100	15.270.147.793	14.364.102.957	93,18

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas telah mencapai 93.18.%. Untuk mengukur tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025 berdasarkan penghitungan berikut ini.



a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

Tabel 4.49.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1.160	1.160	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dan PK (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	111	111	100	20
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan PK (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	9	9	100	20
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan PK dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	5	5	100	20
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100	20
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	5	5	100	20
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah	5	5	100	20



	sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)				
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IP_{SPM} Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) tercapai 100%, dikarenakan tidak adanya korban terdampak akibat Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) merupakan indikator negatif dimana semakin kecil korban terdampak semakin baik), sehingga ke depan akan dipertahankan untuk seminimal mungkin tidak timbul kerugian baik materiil maupun korban luka.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.50.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	1.250	1.250	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	1	1	100	20
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100	20
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	1	1	100	20
2.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana				
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	1.250	1.250	100	20
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	1.250	1.250	100	20
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	30 desa	30 desa	100	20
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100	20



	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	5	5	100	20
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia				
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100	20
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	8	8	100	20
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	3) Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	312	312	100	20
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	46	46	100	20
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana tercapai 100 % berdasarkan jumlah warga Negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan berupa sosialisasi, komunikasi edukasi daerah rawan bencana secara tatap muka maupun melalui media sosial. Sosialisasi, komunikasi edukasi daerah rawan bencana dilakukan tidak hanya oleh BPBD namun juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan adalah 1.250 orang dan semua terlayani sehingga tercapai 100%.



c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.51.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	360	360	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	1	1	100	20
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	3	3	100	20
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	3	3	100	20
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	120	120	100	20
2.	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	6	6	100	20
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
3.	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi				
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	20
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	0	0
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	1	1	100	20
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	100	20



	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	20
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	20
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	9	9	100	20
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	15	15	100	20
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	20
4.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)				
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	2) Gladi Lapangan				
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
5.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	365	365	100	20
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	1	1	100	20
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				



	a.Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	b.Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	c.Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
	d.Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
	a.Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	b.Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	0	0	100	20
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				
	a.Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
	b.Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100	20
	6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
	a.Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
	b.Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	52	52	100	20
	c.Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	4.316	4.316	100	20
	d.Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	4	4	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,5

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana belum tercapai 100 % dikarenakan indikator mutu untuk sertifikat pelatihan bagi ASN belum terpenuhi. Berdasarkan jumlah warga Negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan berupa Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan adalah 360 orang dan terlayani sehingga tercapai 100 %.



d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.52.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	3.980	3.980	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Respon Cepat Darurat Bencana				
	a.Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	12	12	100	20
	b.Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	45	45	100	20
2.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
	a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	6	6	100	20
	c.Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100	20
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
	e.Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100	20
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	64	64	100	20
	g.Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan	4	4	100	20



	pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	64	64	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana telah mencapai 100% berdasarkan jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan berupa Pelayanan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini berdasarkan jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban serta pemberian bantuan logistik bagi korban bencana sejumlah 3.980 orang terdiri dari warga yang mendapatkan layanan pertolongan dan evakuasi korban sejumlah 700 orang dan warga yang mendapatkan bantuan logistik bagi korban sejumlah 3.280 orang.

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Tabel 4.53.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	4.117	4.117	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	170	170	100	20
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4	4	100	20
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran	958	958	100	20



	(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)				
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	253	253	100	20
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	4.117	4.117	100	20
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4.117	4.117	100	20
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IP_{SPM} Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) tercapai 100%, hal ini karena Damkar berusaha untuk selalu meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tingkat waktu Tanggap (*respon time*) di bawah 15 menit, dengan adanya 8 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) maka kejadian penyelamatan akan segera direpon oleh Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdekat. Untuk Tahun 2025 terdapat 170 kejadian kebakaran dengan waktu tanggap 10,12 menit.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.54.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
KATEGORI PENCAPAIAN TRANTIBUM				100	Tuntas Paripurna
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN				99,8	Tuntas Utama



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan informasi rawan bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80,00	19,50	99,5	Tuntas Utama
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR				100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS				99,9	TUNTAS UTAMA

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 99,9% dengan kategori TUNTAS UTAMA. Meskipun capaian kinerja bidang Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025 belum mencapai target SPM 100%, karena terdapat beberapa hal yang belum tercukupi pemenuhan kebutuhan SPM nya yaitu:

- a. Belum semua warga Negara di daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana.
- b. Belum semua warga Negara di daerah rawan bencana mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terutama di dalam peningkatan kapasitas masyarakat.
- c. Keterbatasan anggaran sehingga beberapa sub kegiatan pendukung SPM sub urusan bencana tidak dapat terdanai.

4.5.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.55.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Tidak ada korban terdampak	Usahakan sesuai SOP agar tidak ada korban terdampak
		Tidak ada standar pasti kebutuhan ganti rugi per korban	Usulkan SHS
		Tidak ada rekening di SIPD untuk input ganti rugi materil/ pengobatan	Usul penambahan rekening ganti rugi
		Minimnya pemberdayaan masyarakat	Memperkuat Satgas Linmas di desa/kelurahan dan membentuk relawan pemadam kebakaran

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 4.56.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Kesulitan dalam mengakses data penduduk <i>by name by address</i> , <i>by NIK by KK</i> pada tahapan SPM dikarenakan data tersebut tidak tersedia di Disdukcapil.	Koordinasi dengan Disdukcapil dan menunggu integrasi data kependudukan di dalam e SPM Bangda
		Pada capaian SPM sub urusan bencana, target setiap triwulan dapat berubah dikarenakan disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana yang ada dan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KIE dan pelatihan yang tidak hanya dibiayai dari APBD murni saja namun juga dibiayai dari dana desa	Penulisan Target disesuaikan dengan realisasi setiap triwulan dikarenakan sulit untuk menentukan target tahunan karena bencana sewaktu-waktu dapat terjadi.
		Perencanaan kegiatan pendukung SPM tidak semua mendapatkan anggaran atau anggarannya sangat terbatas sehingga capain hanya sebatas yang mendapatkan penganggaran	Koordinasi dengan Bappeda dan Litbangda serta BPPKAD
		Pelaksanaan penerapan SPM sub urusan bencana tidak semua dapat terpenuhi seperti yang tertuang dalam Permendagri 101 tahun 2018 dikarenakan keterbatasan anggaran	Diperlukan koordinasi untuk penambahan anggaran terkait dengan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM
		Pada Tahapan Penerapan SPM Sub urusan bencana dari form 5	Mengintegrasikan data penduduk kedalam aplikasi e-SPM Bangda



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		a sampai 5 e kesulitan pengisian data penduduk nya	

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 telah memberikan arahan dan dukungan konkrit kepada pemerintah daerah untuk melindungi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana maupun warga negara yang menjadi korban bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana berorientasi pelayanan dasar dengan tiga layanan, yaitu:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIE sebagai salah satu sub-layanan);
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan(Penyusunan Renkon perjenis bencana sebagai salah satu sub-layanan; serta
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (pencarian, pertolongan dan evakuasi sebagai salah satu sub-layanan).

Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana juga telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang secara khusus menyebutkan bahwa penerapan SPM wajib memenuhi 4 (empat) tahapan inti, yaitu

- a. Pendataan kebutuhan;
- b. Perhitungan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- d. Pelaksanaan pelayanan dasar.

Tahapan tersebut dilaksanakan agar penerapan SPM dapat dilakukan lebih terarah dan fokus pada target layanan yaitu pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dengan berbagai tantangan seperti jangkauan wilayah yang luas, banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani, belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi maupun substansi SPM, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta tingkat kerentanan maupun intensitas bencana yang semakin meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai dengan karakteristik dan kapasitas wilayah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana di tengah tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana di daerah dapat membuat setiap pemerintah daerah lebih siap dan sigap dalam menghadapi bencana sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah korban jiwa ketika terjadi bencana.



4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA. Pelayanan Dasar di bidang sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.57.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	214	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	91	Setiap tahun	447.619.763
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	36	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanaan	214	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	30	Setiap tahun	
					Penyediaan alat bantu	35	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	20	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	114	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	60	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	8	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	32	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	28	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	37	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	74	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	30	Setiap tahun	7.958.408
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	30	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanaan	30	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	30	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	4	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	74	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	57	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	16	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	20	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	186	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	25	Setiap tahun	1.990.466.790
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	23	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanaan	186	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan sandang	15	Setiap tahun	
					Penyediaan alat bantu	3	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	8	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	186	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	57	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti kepemilikan NIK	4	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	17	Setiap tahun	
					Layanan Dasar	23	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis Tuna Sosial Khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	60	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	37	Setiap tahun	43.510.241
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	42	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	36	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	31	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan perbekalan kesehatan	20	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social meningkatkan keberfungsian sosial	60	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	15	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	4	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	41	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	45	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	8	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	480	Setiap tahun	Penyediaan permakanan	480	Setiap tahun	400.871.729
					Penyediaan sandang	100	Setiap tahun	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	90	Setiap tahun	
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	75	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pelayanan dukungan Psikososial	270	Setiap tahun	
Jumlah								2.890.426.931

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.890.426.931,00.

4.6.3 Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Sosial berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2025, terdiri dari:

Tabel 4.58.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	447.619.763	0	0	0
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	7.958.408	0	0	0
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1.990.466.790	0	0	0
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	43.510.241	0	0	0
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat	400.871.729	0	0	0



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
	Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
Jumlah		2.890.426.931	0	0	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Sosial pada tahun 2025 berasal dari APBD, sedangkan sumber anggaran dari APBN, DAK dan sumber dana lain yang sah tidak tersedia anggaran.

4.6.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial terdiri dari:

Tabel 4.59.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	
	b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	
	c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
	d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	
	PNS	6
	Tenaga Kontrak	4
	Pendamping Rehabilitasi Sosial	1
	Relawan/ TKSK	5
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	PNS	4



No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
	Tenaga Kontrak	2
	Relawan/ tagana	175
Jumlah		197

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sebanyak 197 orang.

4.6.5 Hasil Capaian

Hasil capaian merupakan realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.60.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	214	214	100	447.619.763	426.011.631	95,2
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	74	74	100	7.958.408	7.081.382	88,9
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	186	186	100	1.990.466.790	873.478.175	43,9
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	60	60	100	43.510.241	39.289.372	90,3
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	480	480	100	400.871.729	398.653.263	99,4
Jumlah					2.890.426.931	1.744.513.823	60,4

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2026

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Sosial telah mencapai 60,4%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian



SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025 berdasarkan penghitungan berikut ini.

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.61.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	214	214	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	91	91	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	36	36	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	214	214	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	30	30	100	20,00
5.	Penyediaan alat bantu	35	35	100	20,00
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	20	20	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	114	114	100	20,00
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	60	60	100	20,00
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	8	8	100	20,00
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	8	8	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	32	32	100	20,00



12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	28	28	100	20,00
13.	Layanan rujukan	37	37	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2025 mencapai target SPM 100%. Hal ini dapat tercapai karena peran aktif para petugas dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.62.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	74	74	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1.	Layanan data dan pengaduan	30	30	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	30	30	100	20,00
3.	Penyediaan permakanaan	30	30	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	30	30	100	20,00
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	4	4	100	20,00
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk meningkatkan keberfungsian sosial	74	74	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	57	57	100	20,00
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	16	16	100	20,00



9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3	3	100	20,00
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	20	20	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	8	8	100	20,00
12.	Layanan rujukan	30	30	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2025 mencapai target SPM 100%.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.63.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	237Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	186	186	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	25	25	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	23	23	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	186	186	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	15	15	100	20,00
5.	Penyediaan alat bantu	3	3	100	20,00
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan	8	8	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social untuk	186	186	100	20,00



	meningkatkan keberfungsian sosial				
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	57	57	100	20,00
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti kepemilikan NIK	4	4	100	20,00
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4	4	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20	20	100	20,00
12.	Layanan data dan pengaduan	25	25	100	20,00
13.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	23	23	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2025 mencapai SPM 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari peran serta TKSK dan Pemerintah Desa dalam membantu memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Magelang.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 4.64.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	60	60	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	37	37	100	20,00



2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	42	42	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	36	36	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	31	31	100	20,00
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan	20	20	100	20,00
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social meningkatkan keberfungsian sosial	60	60	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	15	15	100	20,00
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	4	4	100	20,00
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6	6	100	20,00
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	41	41	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	45	45	100	20,00
12.	Layanan rujukan	8	8	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2025 mencapai target SPM 100%.

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 4.65.

Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan	480	480	100	80,00



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan permakanan	480	480	100	20,00
2.	Penyediaan sandang	100	100	100	20,00
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	90	90	100	20,00
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	75	75	100	20,00
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	270	270	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota tercapai karena dukungan dari berbagai pihak, pilar-pilar sosial selalu siaga dan sigap 24 jam melakukan pelayanan kepada korban bencana, sehingga capaian kerjanya mencapai 100%.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung capaian Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.66.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
	Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
BIDANG URUSAN SOSIAL				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebesar 100 % dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, sama dengan 100%. Capaian tersebut merupakan hasil dari peran serta dan peran aktif setiap petugas serta koordinasi dengan Pemerintah Desa. Meskipun Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) telah mencapai 100%, namun ada terdapat hal yang masih menjadi perhatian, salah satunya beberapa Sub Kegiatan tidak memiliki pagu anggaran tersendiri.

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.67.
Kendala, Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Data PPKS dari SIKS-DG kurang valid dan kurang akurat	Perlu dilakukan pemutakhiran data secara berkala sehingga diperoleh data lebih akurat, serta mengoptimalkan peran operator desa untuk verifikasi.
		Rotasi petugas di lingkungan pemerintah daerah yang cepat, sehingga petugas pengganti belum memahami dengan baik standar teknik SPM	Perlu adanya bimbingan teknis bagi pengampu SPM.



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
2.	Eksternal	Masyarakat atau PPKS sering tidak mengetahui atau kesulitan dalam melapor atau mengakses layanan.	Melakukan sosialisai aktif kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Kabupaten Magelang Tahun 2025 pada 6 (enam) bidang urusan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4.7.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Perencanaan Pembangunan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Pendidikan, selain itu pelaksanaan SPM Berdasarkan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan serta Mekanisme Penganggaran Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Tabel 4.68.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	PENDANAAN	PAGU PENETAPAN	PAGU PERUBAHAN
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.761.071.569.373	2.761.071.569.373
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	814.272.282.409	819.318.394.477,7 4
3.	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	170,896,381,540	168,284,995,781
	APBD	170,896,381,540	168,284,995,781
	a. APBD Murni	0	0
	b. APBD DAU	32,173,643,540	36.080.707.781
	c. APBD DAK Fisik	1,778,488,000	1.507.738.000
	d. APBD DAK Non Fisik	136,944,250,000	130.696.550.000
	e. Dana Bagi Hasil	0	0
	f. Kerjasama	0	0
	g. Otonomi Khusus	0	0
	Non APBD	0	0
	a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0	0
	APBN	0	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0	0
	Dana Lainnya	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.69.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
				36.080.707.78 1	31.498.420.72 9	87,30%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
	1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		6.846.162.726	6.431.019.420	93,94%
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	25.000.000	22.000.000	88,00%
		2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	104.926.700	69.891.316	66,61%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	690.048.500	602.648.160	87,33%
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5.977.228.453	5.692.250.06 8	95,23%
		5	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	29.267.688	26.334.986	89,98%
		6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	19.691.385	17.894.890	90,88%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		5.397.065.039	5.086.998.701	94,25%
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	137.594.736	114.389.430	83,14
		2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	129.356.495	128.369.996	99,24
		3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	200.000.000	100
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.807.685.283	2.781.361.172	99,06
		5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	887.794.000	759.937.337	85,60
		6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	28.343.605	28.144.660	99,30
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	46.562.500	46.308.130	99,45
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	887.794.000	759.937.337	85,60
		9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	37.332.500	36.554.623	97,92
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.990.371.139	1.067.995.643	53,66%
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000	150.000.000	100



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	714.618.773	447.198.830	62,58
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	104.926.700	69.891.316	66,61
		4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	289.529.983	8.964.690	3,10
		5	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	107.784.500	93.443.706	86,69
		6	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	26.766.000	22.215.460	83
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.788.900	28.337.135	92,04
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		21.847.108.877	18.912.406.965	86,57%
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.543.233.259	17.808.054.505	86,69
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.303.875.618	1.104.352.460	84,70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

4.7.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

SPM berfungsi sebagai *instrument* untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting* bidang kesehatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Ke depannya nanti pengalokasian dan penyaluran DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.



Tabel 4.70.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	PENDANAAN	PAGU
1	2	3
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.761.071.569.373
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	623.983.908.236
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	10.863.967.229
	APBD	10.644.445.861
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	6.114.066.820
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	4.374.072.541
	e. Dana Bagi Hasil	156.306.500
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0
	APBN	0
	b. APBN-Dekonsentrasi	0
	c. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	219.521.368

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM bidang urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.71.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
			7.625.565.545	7.075.377.436	92,78
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		6.270.373.320	5.892.217.371	93,97
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6.270.373.320	5.892.217.371	93,97
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	3.518.480.206	3.478.890.310	98,87%
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	132.896.232	132.896.218	100,00 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	531.778.600	256.290.887	48,20%
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	82.187.463	81.347.459	98,98%
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	365.539.943	346.389.655	94,76%
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	647.009.654	643.271.491	99,42%
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	46.640.005	46.500.832	99,70%
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	54.914.655	52.467.382	95,54%
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	95.559.040	95.447.040	99,88%
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	333.979.992	303.286.332	90,81%
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	445.177.540	441.344.775	99,14%
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16.209.990	14.084.990	86,89%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA				
	1.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	721.699.241	680.462.282	94,29%
	2.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.652.373.300	3.595.623.115	98,45%



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (GF USAID)	219.521.368	219.521.368	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

4.7.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat penting. Terlebih, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib tersebut perlu dijadikan prioritas perencanaan maupun penganggaran daerah. Karena itu, pada konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diamanatkan agar Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM dan belanja. Hal ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan. Berkaitan pada bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan tersebut meliputi air minum dan limbah.

Tabel 4.72.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2,761,071,569,3731
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	106,714,730,603
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	8,944,033,637
	APBD	27,587,557,085
	a. APBD Murni	
	b. APBD DAU	1,890,798,171
	c. APBD DAK Fisik	6,818,426,000
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	234,809,466
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0



b. APBN-Tugas Pembantuan	0
Dana Lainnya	3.599.125.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
			12.698.115.692	12.685.416.944	99,89
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.045.936.226	2.037.530.864,0 0	99,59
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.045.936.226	2.037.530.864,0 0	99,59
	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	1.890.798.171	1.873.779.064,0 0	99,10
	2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	86.677.055	86.675.000	99,99
	3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	68.461.000	64.532.000	94,26
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		7.053.054.466	7.048.761.080	99,94
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.053.054.466	7.048.761.080	99,94
	1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	7.005.666.032	6.992.471.740	99,81
	2	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	5.358.068.269	5.355.262.200	99,95
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	112.744.927	111.737.600	99,11
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
		SPAM APBD PROVINSI	1.481.385.000	1.481.385.000	100,00
		SANIMAS APBN	1.600.000.000	1.600.000.000	100,00
		CSR JAMBANISASI BAZNAS, PT BPR BKK Muntilan (Perseroda), PT ASKRIDA	17.740.000	17.740.000	100,0
		PAMSIMAS	500.000.000	500.000.000	100,0

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

4.7.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk memprioritaskan perencanaan dan penganggarannya di bidang urusan perumahan rakyat, sebagaimana data tahun 2021 dan 2025 di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), diketahui terjadi peningkatan alokasi anggaran. Hal ini utamanya dalam rangka penerapan SPM.



Tabel 4.74.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.761.071.569.373
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	6.844.808.955
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	464.854.801
	APBD	464.854.801
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	464.854.801
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	b. APBN-Dekonsentrasi	0
	c. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.75.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
			464.854.801	437.278.552	94,07
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		464.854.801	437.278.552	94,07
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		18.621.308	12.201.222	65,52
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	7.352.477	5.678.000	77,23
	2	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	7.328.831	4.447.000	60,68
	3	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.940.000	2.076.222	52,70
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		446.233.493	425.077.330	95,26
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	4.157.101	2.524.330	60,72
	2	Pembangunan rumah bagi korban bencana	221.845.745	212.387.800	95,74
	3	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	220.230.647	210.165.200	95,43

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

4.7.5 BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas dilaksanakan dalam beberapa program. Adapun pendanaan bidang urusan trantibumlinmas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.76.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Satpol PP dan PK Serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.761.071.569.373
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	53.447.045.158
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	15.270.147.793



No.	PENDANAAN	PAGU
	APBD	15.270.147.793
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	15.270.147.793
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	b. APBN-Dekonsentrasi	0
	c. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Satpol PP & PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM bidang urusan Trantibumlinmas diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.77.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS	15.454.338.288	14.546.444.072	94,13
	TRANTIBUMLINMAS			
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	4.934.919.447	4.295.296.434	87,04
	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.637.681.673	3.335.715.352	91,70
	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patroli. pengamanan. dan pengawalan	2.710.001.892	2.444.306.552	90,20



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	121.603.465	119.881.465	98,58
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	242.057.496	239.816.160	99,07
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	121.292.832	117.206.060	96,63
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	70.013.815	63.743.770	91,04
	6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	258.824.613	254.421.353	98,30
	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	100.440.695	87.345.000	86,96
	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	9.250.000	8.994.992	97,24
	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	4.196.865	0	0
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1.286.004.274	951.276.082	73,97
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	191.436.023	162.059.987	84,65
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.902.650	45.627.394	59,64
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.043.665.601	743.588.701	71,25
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		11.233.000	8.305.000	73,93
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	11.233.000	8.305.000	73,93
KEBENCANAAN					
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		2.056.343.500	1.967.701.192	95,78
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	385.993.332	359.670.7222	93,18
	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	385.993.332	359.670.7222	93,18
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	257.148.000	255.983.110	99,55
	1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	249.168.000	248.036.850	99,55



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	2	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	3.680.000	3.679.260	99,98
	3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	4.300.000	4.267.000	99,23
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.406.255.000	1.330.495.295	94,61
	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	235.393.000	231.850.620	98,50
	2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	482.833.000	481.341.280	99,69
	3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	688.029.000	617.303.395	89,72
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	98.428.000	96.879.995	98,43
	1	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	9.382.000	8.984.180	95,76
	2	Penguatan Kelembagaan Bencana kabupaten/Kota	2.873.000	2.856.700	99,43
	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	14.817.000	14.735.972	99,45
	4	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kab/Kota	71.356.000	70.303.143	98,52
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR					
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		7.982.428.550	7.821.197.119	97,98
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.982.428.550	7.821.197.119	97,98
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	197.158.716	184.284.732	93,47
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	7.000.671.025	6.940.925.940	99,15
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	508.005.309	507.333.097	99,87
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	192.793.500	120.973.350	62,75
	5	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	83.800,000	67.680,000	80,76

Sumber: Satpol PP & PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2025

4.7.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas dilaksanakan dalam beberapa program. Adapun pendanaan bidang urusan



trantibumlinmas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.78.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.761.071.569.373
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	39.282.514.360
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	2.890.426.931
	APBD	2.890.426.931
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	2.890.426.931
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	c. APBN-Dekonsentrasi	0
	d. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2026

Pelaksanaan SPM bidang urusan Sosial diampu oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.79.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
BIDANG URUSAN SOSIAL			2.890.426.931	1.744.513.823	60,35
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		2.890.426.931	1.744.513.823	60,35
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		2.489.555.202	1.345.860.560	54,06
	1	Penyediaan Permakanan	99.286.233	85.282.628	85,89
	2	Penyediaan Sandang	14.923.299	14.914.330	99,94
	3	Penyediaan alat bantu	159.764.558	145.427.020	91,03
	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6.900.229	6.713.694	97,30
	5	Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual. dan sosial	1.958.632.000	845.151.500	43,15
	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar. serta gelandangan pengemis dan masyarakat	50.112.236	49.561.680	98,90
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.048.421	1.041.802	99,37
	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.048.421	1.041.802	99,37
	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.048.421	1.041.802	99,37
	10	Pemberian layanan kedaruratan	179.906.786	179.046.416	99,52
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.386.000	1.386.000	100
	12	Pemberian layanan rujukan	15.498.598	15.251.886	98,41
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		400.871.729	398.653.263	99,45
	1	Penyediaan makanan	135.410.660	135.375.270	99,97
	2	Penyediaan sandang	70.880.714	70.867.210	99,98
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	83.034.625	82.697.536	99,59
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	61.459.770	61.445.922	99,98
	5	Pelayanan dukungan Psikososial	50.085.960	48.267.325	96,37

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2026

Hal yang menjadi isu dalam implementasi SPM saat ini salah satunya adalah kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pemenuhan SPM, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan SPM. Berkaitan dengan itu pemerintah daerah perlu perlu memilah program dan kegiatan (sesuai Kepmendagri nomor 900-1317 Tahun 2023) yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh dinas terkait. Selain itu faktor keterbatasan Sumber



Daya Manusia dalam mendukung pemenuhan SPM di Kabupaten Magelang juga menjadi salah satu permasalahan dalam mengoptimalkan Penerapan SPM di Kabupaten Magelang.

Terkait isu dan permasalahan tersebut diatas, diperlukan strategi pengimplementasian SPM oleh Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan, program kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung terselenggaranya SPM sub urusan Bencana dan memastikan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan daerah.
- b. Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah.
- c. Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah
- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.
- e. Penerapan SPM perlu didukung oleh data yang valid dan terukur dengan pemenuhan yang dilakukan secara bertahap.
- f. Pelibatan dan kolaborasi multi pihak (*pentahelix*) dalam implementasi SPM sub urusan Bencana.
- g. Penguatan sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan SPM sub urusan Bencana baik secara teknis, substansi maupun administrasi.

BAB V

PENUTUP

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025**





BAB V

PENUTUP

LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Magelang Tahun 2025, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Keberhasilan serta prestasi yang telah diraih selama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun dari pihak lain yang turut mengapresiasi patut disyukuri mengingat keberhasilan dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya untuk dapat berkarya, bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin serta dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Namun demikian, masih perlu upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi ke depan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.



Melalui kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jalinan komunikasi yang telah berlangsung. Semoga hasil pembangunan yang telah diraih Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dapat dirasakan ke seluruh pelosok wilayah serta menyentuh semua lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini disusun untuk digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025





LAMPIRAN 2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah		
						Elemen data				
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
1	Pendidikan	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	%	32.522	84,75%	DISDIKBUD		
				Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan		38.376		DISDUKCAPIL		
		1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	%	168.281	93,36%	DISDIKBUD		
				Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan		180.255		DISDUKCAPIL		
		1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	6.450	100%	DISDIKBUD		
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah		6.450		DISDUKCAPIL		
		1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	1.176	36,70%	DISDIKBUD		
				Jumlah seluruh toilet		3.204		DISDIKBUD		
		1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	1.959	34,72%	DISDIKBUD		
				Jumlah ruang kelas		5.642		DISDIKBUD		
		2	Kesehatan	1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	%	6	0,05%	DINKES
						Jumlah ibu melahirkan tahun N		12.194		DINKES
				1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	%	10.738	15.85%	DINKES
						Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama		67.732		DINKES
				1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	%	13.032	97,19%	DINKES
Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.409					DINKES				
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	%	12.194	96,45%	DINKES		
				Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama		12.643		DINKES		
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar			Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	%	12.150	96,94%	DINKES		
				Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama		12.533		DINKES		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD Elemen data	CAPAIAN	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	%	57.64	99.80%	DINKES
				Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama		57.753		DINKES
		1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	169.386	100%	DINKES
				Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama		169.386		DINKES
		1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	585.720	99,79%	DINKES
				Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun		586.948		DINKES
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	%	172.485	100%	DINKES
				Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)		172.485		DINKES
		1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	127.815	95,93%	DINKES
				Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama		133.236		DINKES
		1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	23.021	100%	DINKES
				Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.		23.021		DINKES
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	2.616	100%	DINKES		
		Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama		2.616		DINKES		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	%	13.874	100%	DINKES
				Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.		13.874		DINKES
		1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	%	16.082	98,01%	DINKES
				Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama		16.408		DINKES
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	%	25.733,23	72,16%	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)		35.662,45		DPUPR
		1.c.2	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	%	721,85	70,72%	DPUPR
				Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)		1.020,66		DPUPR
		1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	%	1.294.609,00	95,54%	DPUPR
				Jumlah total penduduk kabupaten/kota		1.355.045,00		DPUPR
		1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	%	436.766,00	95,08%	DPUPR
				Jumlah rumah di Kabupaten /kota		459.388,00		DPUPR
		1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	%	1,869	12,78%	DPUPR
				Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)		14,62		DPUPR
		1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	%	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	DPUPR
				Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)		Tidak Dapat Dilaksanakan		DPUPR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah		
						Elemen data				
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
		1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	%	215,00	100%	DPUPR		
				Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku		215,00		DPUPR		
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	%	12,00	100%	DPUPR		
				Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk		12,00		DPUPR		
		1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	%	215	83.98%	DPUPR		
				Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota		256		DPUPR		
		1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	%	10,00	10,10%	DPUPR		
				Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun		99,00		DPUPR		
		4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	%	48	100%	DPRKP
						Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N		48		DPRKP
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani			Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	%	2,17	41.25%	DPRKP		
				Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N		5.26		DPRKP		
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	%	1.686	9,35%	DPRKP		
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N		18.041		DPRKP		
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	%	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	DPRKP		
				Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N		Tidak Dapat Dilaksanakan		DPRKP		
5	Ketentraman, Ketertiban	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	%	1	33,33%	BPBD		
				Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota		3		BPBD		
		1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	%	44	100%	SATPOL PP		
				Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan		44		SATPOL PP		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	%	29	82,86%	SATPOL PP
				Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi		35		SATPOL PP
		1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	360	0,11%	BPBD
				Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan		314.231		BPBD
		1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	251	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana		251		BPBD
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	%	108	85,71%	SATPOL PP		
		Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota		126		SATPOL PP		
6	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	214	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti		214		DINSOS PPKB PPPA
		1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	%	74	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti		74		DINSOS PPKB PPPA
		1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	186	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti		186		DINSOS PPKB PPPA
		1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	60	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti		60		DINSOS PPKB PPPA
		1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	480	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota		480		DINSOS PPKB PPPA
		1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	133.687	64.92%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota		205.933		DINSOS PPKB PPPA
7	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	20	100%	DISPERINNAKER
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota		20		DISPERINNAKER



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	128	2,34%	DISPERINNAKER
				Jumlah perusahaan		5.477		DISPERINNAKER
		2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	%	27.261	100%	DISPERINNAKER
				Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota		27.261		DISPERINNAKER
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	150	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)		150		DINSOS PPKB PPPA
		2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	142	100%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang		142		DINSOS PPKB PPPA
9	Pangan	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	%	60.74	79.64%	DISTAN PANGAN
				Target jumlah cadangan pangan		76.27		DISTAN PANGAN
10	Pertanahan	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	%	10.270.253	96,34%	DPUPR
				Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah		10.660.617		DPUPR
		2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	%	106.544	94,29%	DPUPR
				Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah		112.998		DPUPR
		2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	%	1	20,00%	DPUPR
				Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamankan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah		5		DPUPR



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
11	Lingkungan Hidup	2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	%	28	40,00%	DLH
				Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung		70		DLH
		2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	%	92.699,48	37,75%	DLH
				Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten		245.583,32		DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	%	332.961	98,83%	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 17 tahun		336.904		DISDUKCAPIL
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	%	248.337	78,48%	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak		316.443		DISDUKCAPIL
		2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	%	1	50,00%	DISDUKCAPIL
				2 dokumen		2		DISDUKCAPIL
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	%	1.027.063	98,89%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		1.038.628		DISDUKCAPIL
		2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	%	13.115	100%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan		13.115		DISDUKCAPIL
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	%	690.173	100%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan		690.173		DISDUKCAPIL
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	%	26.655	100%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan		26.655		DISDUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	%	Tuntas hasil 100%	Tuntas hasil 100%	DISPERMADES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)		Tuntas hasil 100%		DISPERMADES
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	%	31	18,90%	DISPERMADES
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)		164		DISPERMADES



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	%	32	84,21%	DISPERMADES
				Jumlah kerja sama desa yang ditangani		38		DISPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	%	2,14	104,43%	DINSOS PPKB PPPA
				Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan		2,03		DINSOS PPKB PPPA
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	%	151.556	77,27%	DINSOS PPKB PPPA
				Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun		196.132		DINSOS PPKB PPPA
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	%	7,89	63,53%	DINSOS PPKB PPPA
				Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan		12,42		DINSOS PPKB PPPA
15	Perhubungan	2.i.2	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	%	0,64	0,64%	DISHUB
				V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota		0,15		DISHUB
		2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	9	100%	DISHUB	
Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	9	DISHUB						
16	Komunikasi dan Informatika	2.i.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	47	100%	DISKOMINFO
				Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah		47		DISKOMINFO
		2.i.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi	%	17	100%	DISKOMINFO
				Jumlah Layanan Publik		17		DISKOMINFO
		2.i.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	911.774	100%	DISKOMINFO
Jumlah penduduk	911.774			DISKOMINFO				
17	Koperasi dan UKM	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume	%	217.132.040.801	-45,09%	DISDAGKOP UKM
				Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya		395.437.384.106		DISDAGKOP UKM
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	%	1.791	4,77%	DISDAGKOP UKM
Σ Usaha mikro	37.576	DISDAGKOP UKM						
18	Penanaman Modal	2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten	%	6.425.633.550.779	18,48%	DPMPTSP
				Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten		5.423.303.702.420		DPMPTSP



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		2.1.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	%	1.002.329.848.359	100,23%	DPMPTSP
				Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan		1.000.000.000.000		DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	%	4	100%	DISPARPORA
				Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota		4		DISPARPORA
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	%	51.771	17,01%	DISPARPORA
				Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota		304.320		DISPARPORA
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	2	0,47%	DISPARPORA
				Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)		429		DISPARPORA
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	%	6	100%	DISPARPORA
				Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional		6		DISPARPORA
20	Statistik	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%	1.420	100%	DISKOMINFO
				Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah		1.420		DISKOMINFO
21	Persandian	2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	%	713	77,67%	DISKOMINFO
				Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)		918		DISKOMINFO
22	Kebudayaan	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	96	3,61%	DISDIKBUD
				Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan		2.656		DISDIKBUD
		2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	%	2.485.754	50,10%	DISDIKBUD
				Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1		1.656.119		DISDIKBUD
23	Perpustakaan	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	Nilai	56,06	56,06	DISPUSPA



| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	Nilai	12,31	12,31	DISPUSPA
24	Kearsipan	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	75,05	75,05%	DISPUSPA
Urusan Pilihan								
25	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	%	20.725,85	101,55%	DISPETERIKAN
				Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)		20.410,00		
		3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	Kg / Kap / Tahun	9,59	9,59	DISPETERIKAN
26	Pariwisata	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	%	79.459.368.335,00	97,21%	DISPARPORA
				Realisasi investasi Tahun N		81.740.704.354,00		
		3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	%	297.495,00	0,20%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan asing tahun N-1		296.916,00		
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	%	3.478.348,00	4,04%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan tahun N-1		3.343.283,00		
27	Pertanian	3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	%	461.039,56	3,59%	DISTAN PANGAN
				Produksi tanaman pangan tahun N-1		445.048,86		
		3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	%	173457,77	-1,09%	DISTAN PANGAN
				Produksi hortikultura tahun N-1		175.362,75		
		3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	%	36046,22	-1,90%	DISPETERIKAN
				Produksi komoditas peternakan tahun N-1		36.745,88		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	141,28 141,28	100%	DISPETERIKAN DISPETERIKAN
28	Perdagangan	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	%	9.006 17.000	52,98%	DISDAGKOP UKM DISDAGKOP UKM
30	Perindustrian	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	%	91,70	91,70%	DISPERINNAKER
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	%	55 294	18,71%	DISPERINNAKER DISPERINNAKER
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	%	57 36	58,33%	DISPERINNAKER DISPERINNAKER
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri Total investasi seluruh sektor	%	787.426.702.852 1.692.923.873.788	46,51%	DISPERINNAKER DISPERINNAKER



LAMPIRAN 2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)	4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	%	17	100%	BPPKAD
				Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden		17		BPPKAD
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)	4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	%	845.171.943.868	29,65%	BPPKAD
				Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		2.850.084.762.056		BPPKAD
		4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	713.530.211.346	25,72%	BPPKAD
				Realisasi pendapatan daerah		2.773.838.765.906		BPPKAD
		4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	%	1.551.458.185.418	57,65%	BPPKAD
				Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N		2.691.353.364.242		BPPKAD
		4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	%	125.504.083.440,65	5,74%	BPPKAD
				Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa		2.188.265.082.740,5		BPPKAD
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)	4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1.476	63,02%	BKPPD
				Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2.342		BKPPD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FUNGSI PENGAWASAN)	4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	Nilai	5	5,00	INSPEKTORAT
		4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	Nilai	5	5,00	INSPEKTORAT
		4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	Nilai	5	5,00	INSPEKTORAT
		4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1 Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1 Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	%	16 24,	66,67%	INSPEKTORAT INSPEKTORAT
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan	Poin	40	40	BAGIAN PBJ
		4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	Poin	28,33	28,33	BAGIAN PBJ
		4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Poin	21,11	21,11	BAGIAN PBJ
6	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (HUBUNGAN PERWAKILAN DAERAH)	4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	Tepat	Tepat	BPPKAD
		4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	%	13 16	81,25%	SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD
7	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PELAYANAN PUBLIK)	4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	94,68	94,68	BAGIAN ORGANISASI
8	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)	4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	%	135	100,00%	BAPPEDA & LITBANGDA
				Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah		135		BAPPEDA & LITBANGDA

DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

16 MEI 2025

Penghargaan Pembentukan
Seleksi Daerah Peacemaker
Training Tingkat Provinsi
Dari Kementerian Hukum RI
Kantor Wilayah Jawa
Tengah Tahun 2025



15 MEI 2025

Penghargaan Peringkat
Pengelolaan JDIH
Terbaik Ke-II Kategori
Kabupaten/Kota Tingkat
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025



12 JUNI 2025

Penghargaan Pasar Tertib
Ukur Tahun 2025 Tingkat
Pusat/Kementerian
Perdagangan
"Pasar Tempuran"



DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

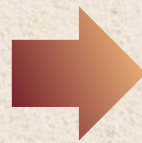
12 JUNI 2025

Penghargaan Pasar Tertib
Ukur Tahun 2025 Tingkat
Pusat/Kementerian
Perdagangan
“Pasar Borobudur”



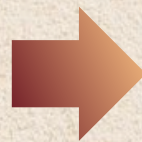
12 JUNI 2025

Penghargaan Pasar Tertib
Ukur Tahun 2025 Tingkat
Pusat/Kementerian
Perdagangan
“Pasar Muntilan”



12 JUNI 2025

Penghargaan Pasar Tertib
Ukur Tahun 2025 Tingkat
Pusat/Kementerian
Perdagangan
“Pasar Desa Sidowangi
Kajoran”



DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

12 JUNI 2025

Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025 Tingkat Pusat/Kementerian Perdagangan “Pasar Talun”



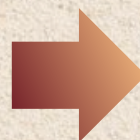
8 AGUSTUS 2025

Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya Tahun 2025 Tingkat Kementerian PPPA



21 AGUSTUS 2025

Penghargaan Peringkat 1 Lomba Desa Ekspor Tingkat Provisi Jawa Tengah Tahun 2025 Kepada CV. Gapoktan Ngundi Luhur Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang



DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

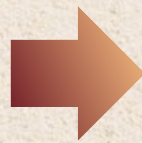
21 AGUSTUS 2025

Penghargaan Terbaik 1 Dalam Ajang Sipangan Daerah Award 2025 Sebagai Bentuk Apresiasi Atas Dedikasi Dan Kontribusinya Dalam Mendukung Penguatan Data Pangan



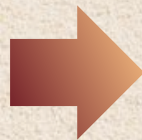
09 OKTOBER 2025

Penghargaan Juara 1 TPMD Role Model Tahun 2025 Tingkat Provinsi



10 OKTOBER 2025

Penghargaan Juara 1 Atas Prestasi Sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Bidang Inovasi Teknologi



DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

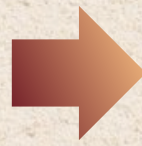
19 NOVEMBER 2025

Penghargaan Yang Diberikan Oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.) Berupa Piagam Kepada Sejumlah Kepala Daerah Di Jawa Tengah Sebagai Apresiasi Atas Terbentuknya Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Termasuk Kabupaten Magelang



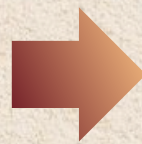
27 NOVEMBER 2025

Penghargaan Juara 3 Lomba Kelompok Tani/Gapoktan Kegiatan Perkebunan Tahun 2025 Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Pada 20 September 2025



28 NOVEMBER 2025

Penghargaan Swasti Saba, Peringkat Padapa Tingkat Pusat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)



DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

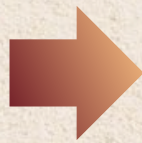
01 DESEMBER 2025

Penghargaan Peringkat
Nasional Apresiasi
Pembina Proklamasi Di
Daerah Tingkat Pusat



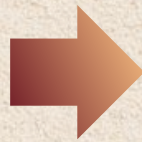
09 DESEMBER 2025

Penghargaan Inovasi
Daerah Kategori
Kabupaten Terinovatif,
Peringkat 11 Tingkat Pusat
(Kementerian Dalam Negeri)



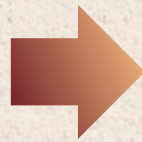
26 DESEMBER 2025

Penghargaan Juara 1
TPMD Role Model Tahun
2025 Tingkat Nasional

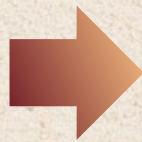


DAFTAR PENGHARGAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

Penghargaan OPD Yang
Mereplikasi Program Pasar
Pangan Aman Berbasis
Komunitas (PPABK) Tingkat
Provinsi Jawa Tengah Tahun
2025



Penghargaan Juara I
Kategori Berani PIK (Pusat
Informasi Dan Konseling)
Remaja Tingkat Provinsi
Tahun 2025





**Festival Lampion Waisak
di Candi Borobudur
Borobudur, Magelang, Jawa Tengah**